



# LAPORAN KINERJA

BADAN PENYULUHAN DAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA PERTANIAN  
TAHUN 2019



KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

# **LAPORAN KINERJA**

## **BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN TAHUN 2019**



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM  
PERTANIAN  
TAHUN 2020**



# KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT I

Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550  
Gedung B Lantai 3 Kantor Pusat Kementerian Pertanian Telepon / Fax. 021 - 78831857  
Website : <http://www.deptan.go.id/itjen/>

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BADAN PENYULUHAN DAN PEMNGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian untuk tahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perdebatan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 18 Februari 2020

Inspektur I

Ir. Susanto, MM  
NIP. 196205071992031001

## KATA PENGANTAR



Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) sebagai salah satu unit Eselon I di Kementerian Pertanian Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh Badan PPSDMP meliputi: Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; Pelaksanaan penyuluhan pertanian; Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian; Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian; Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

Laporan Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama periode jabatan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan kinerja Badan PPSDMP tahun 2019. Masukan, kritik, dan saran yang konstruktif dari semua pihak akan membantu penyempurnaan laporan ini.

Jakarta, Februari 2020  
Kepala Badan PPSDMP



**Prof.Dr.Ir. Dedi Nursyamsi,M.Agr**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan PPSDMP tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2015-2019 dan telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja Badan PPSDMP tahun 2019 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019.

Mengacu pada peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no.53 tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan ini memuat pencapaian kinerja program/kegiatan Badan PPSDMP tahun 2019. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan PPSDMP tahun 2015-2019, Visi Badan PPSDMP adalah : "Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian Yang Profesional, Mandiri, dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani". Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang telah ditetapkan adalah: Memantapkan Sistem Penyuluhan Pertanian yang Terpadu dan Berkelanjutan; Memperkuat Pendidikan Pertanian yang Kredibel; Memantapkan Sistem Pelatihan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang Berbasis Kompetensi dan Daya Saing; serta Memantapkan Sistem Administrasi dan Manajemen Yang Transparan dan Akuntabel. Sebagai dukungan terhadap visi dan misi tersebut, maka tujuan yang ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2015–2019, adalah : Peningkatkan kemandirian kelembagaan petani, Peningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian lulusan Pendidikan tinggi dan menengah pertanian, Peningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian melalui pelatihan pertanian, Peningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.

Sasaran Program Badan PPSDMP adalah meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan, meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional, meningkatnya kualitas layanan publik BPPSDMP, meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian, terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan BPPSDMP. Arah kebijakan Badan PPSDMP adalah optimalisasi peran penyuluhan dalam pendampingan program swasembada pangan di tingkat Balai Penyuluhan Pertanian dan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian, peningkatan daya saing dan kinerja balai diklat, transformasi STPP dan SMK-PP UPT menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian serta sertifikasi profesi pertanian, dan pemantapan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel. Fokus Badan PPSDMP dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, dilakukan melalui Peningkatan efektivitas Penyuluhan dalam Mendukung Pencapaian Target Pembangunan Pertanian yang mencakup pelaku utama dan pelaku usaha; penyuluh dan petugas teknis; dan aparatur pemerintah terkait pertanian lainnya, serta pemenuhan unsur daya saing tenaga kerja sektor pertanian.

Strategi Badan PPSDMP meliputi dua hal yaitu penguatan kelembagaan petani serta penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Badan PPSDMP tahun 2019 menetapkan sasaran program yaitu: Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu dipedesaan, Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional, Meningkatnya kualitas layanan publik BPPSDMP, Meningkatnya kualitas Pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian dan Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian.

Capaian kinerja Badan PPSDMP Tahun 2019 adalah sebagai berikut : a). Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional yaitu **104,27% (sangat berhasil)**; b). Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional yaitu **100% (berhasil)**; c). Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional yaitu **100,54% (sangat berhasil)**; d). Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP yaitu **103,59** Skala Likert (**sangat berhasil**); e). Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan yaitu **100,32% (sangat berhasil)**; f). Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan yaitu **107,61% (sangat berhasil)**; g). Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2019 belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal; h). Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) yaitu **102,92% (sangat berhasil)**.

Realisasi anggaran Badan PPSDMP tahun 2019 adalah Rp1.483.336.384.991,00 dari pagu sebesar Rp1.602.896.004.000,00. Persentase realisasi anggaran pagu tahun 2019 adalah **92,54%**. Realisasi anggaran Badan PPSDMP tahun 2019 bila dirinci perprogram/kegiatan yaitu a). Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian yaitu Rp248.452.200.239,00 (95,56%) dari target pagu Rp259.997.665.000,00; b). Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yaitu Rp501.869.475.902,00 (95,10%) dari target pagu Rp527.747.127.000,00; c). Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan PPSDMP yaitu Rp96.114.366.294,00 (78,35%) dari target pagu Rp122.710.816.000,00 dan Pendidikan Pertanian yaitu Rp636.870.342.556,00 (91,97%) dari target pagu Rp692.440.396.000,00.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang semua capaian kinerja sasaran strategis dapat lebih optimal. Melalui Laporan Kinerja Badan PPSDMP tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.

## DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| KATA PENGANTAR .....                              | i              |
| RINGKASAN EKSEKUTIF.....                          | ii             |
| DAFTAR ISI .....                                  | iv             |
| DAFTAR TABEL.....                                 | v              |
| DAFTAR GAMBAR.....                                | vi             |
| BAB I. PENDAHULUAN.....                           | 1              |
| A. Latar Belakang.....                            | 1              |
| B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....               | 4              |
| C. Organisasi dan Tata Kerja Badan PPSDMP.....    | 5              |
| D. Sumber Daya Manusia Badan PPSDMP Tahun 2019    | 21             |
| E. Dukungan Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2019..... | 22             |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....                  | 24             |
| A. Rencana Strategis.....                         | 24             |
| B. Perjanjian Kinerja tahun 2019.....             | 29             |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....              | 31             |
| A. Kriteria Ukuran Keberhasilan.....              | 31             |
| B. Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2019 .....  | 31             |
| 1 Pengukuran Capaian Kinerja Badan PPSDMP 2019    | 33             |
| 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Badan PPSDMP     |                |
| tahun 2015–2019.....                              | 61             |
| 3 Perbandingan capaian kinerja Badan PPSDMP       |                |
| pada tahun 2019 dengan target jangka              |                |
| menengah dalam Renstra (2015 sd 2019).....        | 68             |
| 4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan        |                |
| atau Peningkatan atau penurunan kinerja serta     |                |
| alternatif solusi.....                            | 70             |
| 5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya   | 80             |
| C. Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2019     | 82             |
| BAB IV. PENUTUP.....                              | 87             |
| Kesimpulan.....                                   | 88             |
| Rencana TindakLanjut.....                         | 90             |
| LAMPIRAN .....                                    | 93             |

## DAFTAR TABEL

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| Tabel 1. Pagu Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2019.....   | 23             |
| Tabel 2. Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2019.....  | 30             |
| Tabel 3. Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2019.....   | 32             |
| Tabel 4. Realisasi rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019..... | 42             |
| Tabel 5. Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani pada tahun 2019 .....  | 45             |
| Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Badan PPSDMP Tahun 2019.....   | 51             |
| Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Badan PPSDMP Tahun 2019.....                                     | 52             |
| Tabel 8. Lulusan Pendidikan Pertanian Pada UPT Lingkup Badan PPSDMP 2019.....   | 54             |
| Tabel 9. Sebaran lulusan UPT Pendidikan lingkup Badan PPSDMP tahun 2019 yang bekerja dibidang pertanian.....                                    | 55             |
| Tabel 10. Target dan Realisasi Nilai Rata-rata <i>Competency Gap Index</i> (CGI) peserta pelatihan di UPT Lingkup Badan PPSDMP tahun 2019.....  | 57             |
| Tabel 11. Rincian Nilai AKIP Badan PPSDMP tahun 2019  | 60             |
| Tabel 12. Hasil penilaian evaluasi SAKIP Badan PPSDMP oleh Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019.....  | 67             |
| Tabel 13. Nilai rata-rata IKM Unsur Pelayanan di UPT lingkup Badan PPSDMP tahun 2019.....   | 73             |
| Tabel 14. Pagu dan Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2019.....  | 82             |
| Tabel 15. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Output Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2019                                      | 83             |
| Tabel 16. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Output Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2019.....                                | 84             |
| Tabel 17. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Output Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP Tahun 2019.....                         | 85             |
| Tabel 18. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Output Program Pendidikan Pertanian Tahun 2019.....   | 85             |

## DAFTAR GAMBAR

|            |   | <b>Halaman</b> |
|------------|---|----------------|
| Gambar 1.  | Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Golongan Tahun 2019.....   | 22             |
| Gambar 2.  | Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2019.....  | 22             |
| Gambar 3.  | Persentase pagu anggaran Badan PPSDMP tahun 2019 .....  | 23             |
| Gambar 4.  | Realisasi capaian rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2015-2019                    | 61             |
| Gambar 5.  | Realisasi capaian rasio kelembagaan petani yang meningkat Kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional 2015-2019.....                                  | 62             |
| Gambar 6.  | Realisasi capaian Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2015-2019.....          | 63             |
| Gambar 7.  | Realisasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik BPPSDMP tahun 2015-2019.....   | 64             |
| Gambar 8.  | Realisasi rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tahun 2015-2019..... | 65             |
| Gambar 9.  | Realisasi penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan tahun 2015-2019.....   | 66             |
| Gambar 10. | Realisasi Capaian Kinerja Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, tahun 2015-2019 .....                              | 67             |
| Gambar 11. | Realisasi Capaian Kinerja Nilai Kinerja berdasarkan PMK 214 tahun 2017, tahun 2015-2019.....  | 68             |
| Gambar 12. | Realisasi Capaian Kinerja Nilai Kinerja berdasarkan PMK 214 tahun 2017, tahun 2015-2019   | 68             |
| Gambar 13. | Capaian kinerja pelaksanaan anggaran Badan PPSDMP tahun 2019 Berdasarkan aplikasi SMART Nomor 214/PMK.02/2017.....  | 80             |
| Gambar 14. | Persentase realisasi anggaran per kegiatan lingkup Badan PPSDMP tahun 2019.....   | 82             |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai NAWA CITA Presiden dan Wakil Presiden, sasaran pembangunan pertanian ke depan adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri, *serta* melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pertanian telah menetapkan Visi Pembangunan Pertanian yaitu "Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani". Misi yang akan ditempuh untuk mewujudkan Visi tersebut adalah (1) Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi; (2) Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian; (3) Mewujudkan Kesejahteraan Petani; dan (4) Mewujudkan Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan diperlukan sumberdaya manusia (SDM) pertanian yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis, sehingga pelaku utama dan pelaku usaha di Sektor Pertanian akan mampu membangun usahatani yang berdaya saing tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan SDM Pertanian, terutama pelaku utama dan pelaku usaha adalah melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) merupakan satuan organik di Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab terhadap pembangunan penyuluhan pertanian dan pengembangan SDM pertanian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 43 Tahun 2015, tugas pokok Badan PPSDMP adalah menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian. Badan PPSDMP terdiri atas Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, dan Sekretariat Badan. Selain itu, Badan PPSDMP didukung pula oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP), Balai Pelatihan Pertanian (BPP), dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP).

Kebijakan, program, dan kegiatan Badan PPSDMP harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pengembangan SDM Pertanian khususnya yang berkaitan dengan bidang penyuluhan, pendidikan, pelatihan serta standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian. Secara umum, **permasalahan pokok** yang terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, adalah sebagai berikut :

**a. Bidang penyuluhan pertanian:**

- 1) Kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian masih rendah;
- 2) Jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan masih belum memadai;
- 3) Kapasitas petani dan kelembagaan petani dalam mengelola dan menerapkan teknologi usaha tani masih rendah;
- 4) Transfer teknologi dari sumber informasi ke petani belum efektif;
- 5) Dukungan sarana, prasarana dan pembiayaan penyuluh belum optimal;
- 6) Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan bagi petani dan pelaku usaha.

**b. Bidang pelatihan pertanian:**

- 1) Jumlah dan kualitas, khususnya kapasitas dan kompetensi, widyaiswara dan tenaga kediklatan masih belum memadai;
- 2) Dukungan prasarana dan sarana kediklatan (asrama, kelas, laboratorium, sarana praktek) belum optimal;
- 3) Efektivitas pelaksanaan kegiatan pelatihan masih rendah;
- 4) Standarisasi mutu layanan kediklatan berdasarkan ISO belum terpenuhi.

**c. Bidang pendidikan pertanian:**

- 1) Minat generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke SMK-PP dan Polbangtan masih rendah;
- 2) Menurunnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian;
- 3) Kondisi sarana dan prasarana pendidikan belum memadai;
- 4) Rendahnya kompetensi dan profesionalisme SDM pendidikan pertanian.

**d. Bidang administrasi manajemen dan teknis lainnya:**

- 1) Penerapan *e-planning* dalam perencanaan program dan anggaran masih belum konsisten;
- 2) Kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik belum prima;
- 3) Efektivitas dan akuntabilitas kegiatan, serta pengendalian internal masih rendah;
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan pegawai belum sepenuhnya optimal dan berkesinambungan;
- 5) Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya belum optimal.

Sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam meningkatkan peran sektor pertanian diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan pertanian berkelanjutan, pemerintah (Kementerian Pertanian) berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan khususnya di bidang pertanian. Badan PPSDMP bertanggung jawab untuk menyediakan SDM pertanian yang kompeten dan profesional di bidangnya, melalui fungsi penyuluhan, pendidikan, pelatihan serta standardisasi dan sertifikasi profesi. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan PPSDMP perlu memperhatikan beberapa isu strategis yang menyangkut penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, khususnya yang berkaitan dengan bidang penyuluhan, pendidikan, pelatihan serta standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian. **Isu strategis** yang menyangkut penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, meliputi:

1. Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian Sebagai Pusat Koordinasi Program dan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Pembangunan Pertanian di Kecamatan;
2. Pengembangan Penyuluhan Pertanian berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Peningkatan Kompetensi SDM Pertanian melalui Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;
4. Pengembangan Balai Pelatihan Pertanian Bertaraf Internasional
5. Penumbuhan Minat Generasi Muda di Bidang Pertanian dan Regenerasi Petani
6. Penerapan *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik)

## **B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian, termasuk Badan PPSDMP.

Berdasarkan peraturan tersebut tugas Badan PPSDMP adalah menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh Badan PPSDMP meliputi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program dibidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
2. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
3. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dibidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian;

7. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

### **C. Organisasi dan Tata Kerja Badan PPSDMP**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP di Pusat, didukung oleh empat unit kerja Eselon II dan UPT yaitu :

1. Pusat Penyuluhan Pertanian;
2. Pusat Pendidikan Pertanian
3. Pusat Pelatihan Pertanian;
4. Sekretariat Badan PPSDMP.
5. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi;
6. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan;
7. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor;
8. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang;
9. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang;
10. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa;
11. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari;
12. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang;
13. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara;
14. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan;
15. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu;
16. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang;
17. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku;
18. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang;
19. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi;
20. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung;
21. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Sembawa;
22. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Banjarbaru;

23. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Kupang.

Tugas dan fungsi di pusat dan UPT adalah sebagai berikut :

### **1. Pusat Penyuluhan Pertanian**

Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan pertanian;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan pertanian;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; dan
- e. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian.

### **2. Pusat Pelatihan Pertanian**

Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pelatihan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerjasama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelatihan pertanian;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelatihan pertanian;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- e. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian; dan

- f. penyusunan dan pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

### **3. Pusat Pendidikan Pertanian**

Pusat Pendidikan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pendidikan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pendidikan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerja sama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan pertanian;
- b. Pelaksanaan pengkajian sumber daya manusia pertanian;
- c. Penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan pertanian;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan pertanian;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pertanian; dan
- f. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian.

### **4. Sekretariat Badan**

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan adminitrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan, rencana, program dan anggaran serta kerjasama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan

- e. pelaksanaan urusan tata usaha Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

### **5. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 100/Permentan/OT.140/10/2015 tentang organisasi dan tata kerja Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia bagi aparatur dan non aparatur pertanian, pelatihan prajabatan, dan pelatihan fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian bagi aparatur pertanian, serta mengembangkan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPMKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang manajemen dan kepemimpinan serta fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia bagi aparatur dan non aparatur dalam dan luar negeri;
- e. Pelaksanaan pelatihan prajabatan bagi aparatur;
- f. Pelaksanaan pelatihan fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian bagi aparatur;
- g. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- h. Pelaksanaan uji kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi aparatur;
- i. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian;
- j. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan di bidang manajemen kepemimpinan dan multimedia pertanian;

- k. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- l. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
- m. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- n. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan serta pengembangan model dan teknis pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia pertanian;
- o. Pengelolaan unit inkubator manajemen;
- p. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
- q. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- r. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis dan unit multi media pertanian;
- s. Pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan serta instansi PPMKP.

#### **6. Politeknik Pembangunan Pertanian (Medan, Yogyakarta-Magelang, Malang, Gowa, Manokwari)**

Tugas Pokok Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) adalah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan profesional di bidang penyuluhan pertanian dan peternakan, serta pendidikan dan pelatihan fungsional rumpun ilmu hayat pertanian. Polbangtan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan program pendidikan profesional penyuluhan pertanian dan peternakan;
- b. Pelaksanaan penelitian terapan penyuluhan pertanian dan peternakan;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan civitas dan hubungan dengan lingkungannya;
- e. Pelaksanaan administrasi umum, akademik dan mahasiswa;
- f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar fungsional rumpun ilmu hayat pertanian;

- g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan alih kelompok fungsional rumpun ilmu hayat pertanian.

Badan PPSDMP Kementerian Pertanian melalui Pusat Pendidikan Pertanian, menyelenggarakan lembaga pendidikan pertanian yaitu STPP yang saat ini bertransformasi menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian. Transformasi ini merupakan tindaklanjut dari Undang-undang Pendidikan Tinggi Pertanian Nomor: 12 tahun 2012 mengenai pendidikan vokasi pertanian. Sejak tahun 2018, Sekolah tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) telah beralih menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian, melalui Penetapan Menteri Pertanian RI Nomor: 25/Permentan/OT.020/5/2018 tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Pembangunan Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 36/Permentan/SM.220/8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian dan Peraturan. Arah politeknik pembangunan saat ini adalah mewujudkan Politeknik Pembangunan Pertanian Unggul dalam menyiapkan SDM Pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani menuju Indonesia lumbung pangan dunia tahun 2045.

## **7. Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 101/Permentan/OT.140/10/2013, Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian/peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP Lembang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang hortikultura bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;

- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang hortikultura bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang hortikultura;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Lembang.

## **8. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 107/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang kesehatan hewan (keswan) dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) bagi aparatur dan nonaparatur pertanian. BBPKH Cinagara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPKH Cinagara.

## **9. Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 103/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober tahun 2013, Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP Ketindan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan tanaman obat bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang tanaman pangan dan tanaman obat bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang tanaman pangan dan tanaman obat;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan

teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;

- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang peternakan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Ketindan.

#### **10. Balai Besar Pelatihan Pertanian Batu**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 105/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Batu mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan nonaparatur pertanian. BBPP Batu menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang peternakan;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang peternakan bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang peternakan;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;

- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang peternakan;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang peternakan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Batu.

#### **11. Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 104/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP Binuang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur dan non aparatur;

- g. Pelaksanan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Binuang.

## **12. Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 106/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP Batangkaluku menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;

- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang mekanisasi pertanian;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Batangkaluku.

### **13. Balai Besar Pelatihan Pertanian Kupang**

Balai Besar Pelatihan Pertanian Kupang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP Kupang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;

- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang peternakan;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang peternakan bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang peternakan;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang peternakan;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang peternakan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Kupang.

#### **14. Balai Pelatihan Pertanian Jambi**

Balai Pelatihan Pertanian Jambi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BPP Jambi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan rawa bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang perkebunan dan teknologi lahan rawa bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- j. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- k. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
- l. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- m. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- o. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- q. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BPP Jambi.

## **15. Balai Pelatihan Pertanian Lampung**

Balai Pelatihan Pertanian Lampung mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi bidang

pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BPP Lampung menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- j. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- k. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
- l. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- m. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- o. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- q. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BPP Lampung.

## **16. Sekolah Menengah Kejuruan Penyuluhan Pertanian Negeri (Sembawa, Banjarbaru, Kupang)**

Berdasarkan Permentan Nomor: 110/Permentan/OT.140/10/2013, tanggal 9 oktober 2013, Sekolah Menengah Kejuruan Penyuluhan Pertanian Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan mengembangkan metodologi pembelajaran pendidikan menengah kejuruan bidang pertanian. SMK-PPN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan proses belajar mengajar;
- c. Pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler;
- d. Pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler;
- e. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik;
- f. Pelaksanaan pengembangan metodologi pembelajaran dan bahan ajar bidang pertanian;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan metodologi pembelajaran bidang pertanian bagi pendidik;
- h. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai program pembangunan pertanian;
- i. Pengelolaan unit usaha sebagai sarana pembelajaran bagi peserta didik;
- j. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- l. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi SMK-PPN.

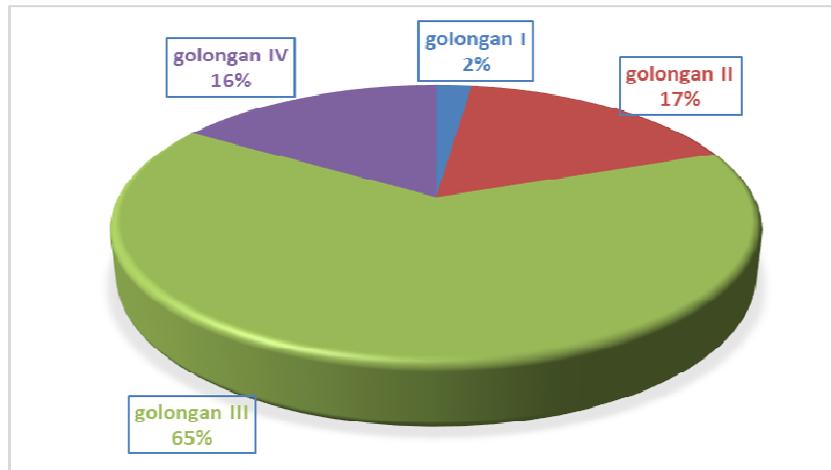
### **D. Sumber Daya Manusia Badan PPSDMP Tahun 2019**

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2019 Badan PPSDMP didukung oleh 2.030 orang aparat yang terdiri atas 1.264 orang aparat laki-laki dan 766 aparat perempuan.

Komposisi pegawai Badan PPSDMP tahun 2019 berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan secara rinci adalah sebagai berikut :

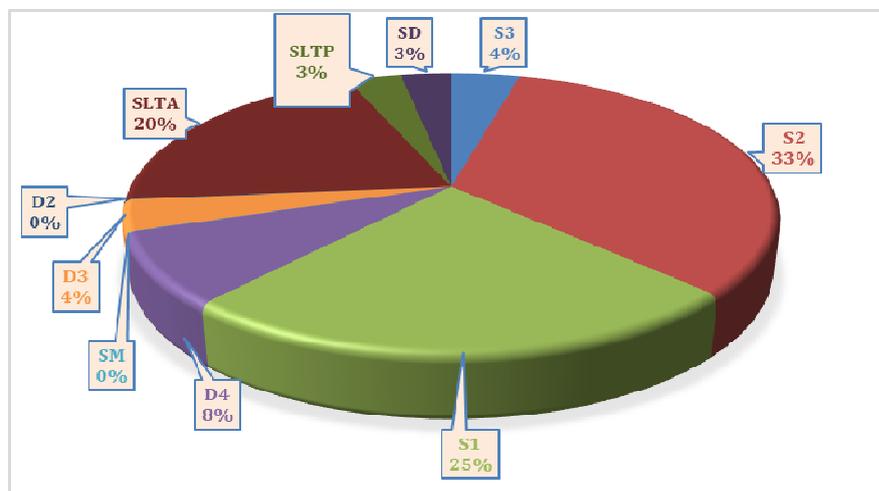
- a. Golongan, terdiri atas : golongan I yaitu 43 orang; golongan II yaitu 351 orang; golongan III yaitu 1.309 orang, dan golongan IV yaitu 327 orang.

Persentase jumlah pegawai Badan PPSDMP tahun 2019 pada Triwulan III (September) berdasarkan golongan pada gambar 1.



Gambar 1. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Golongan Tahun 2019

b. Pendidikan, terdiri atas: S3 (Doktor) sebanyak 83 orang, S2 (magister) yaitu 674 orang, S1 (sarjana) yaitu 493 orang, D4 yaitu 168 orang, SM yaitu 1 orang, D3 yaitu 73 orang, D2 yaitu 2 orang, SLTA yaitu 410 orang, SLTP yaitu 65 orang dan SD yaitu 61 orang. Komposisi pegawai Badan PPSDMP tahun 2019 berdasarkan tingkat pendidikan pada gambar 2.



Gambar 2. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2019

### E. Dukungan Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2019

Pagu anggaran Badan PPSDMP tahun 2019 adalah Rp1.602.896.004.000,00 terdiri dari anggaran : a. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Rp259.997.665.000,00 b. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Rp527.747.127.000,00 c. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

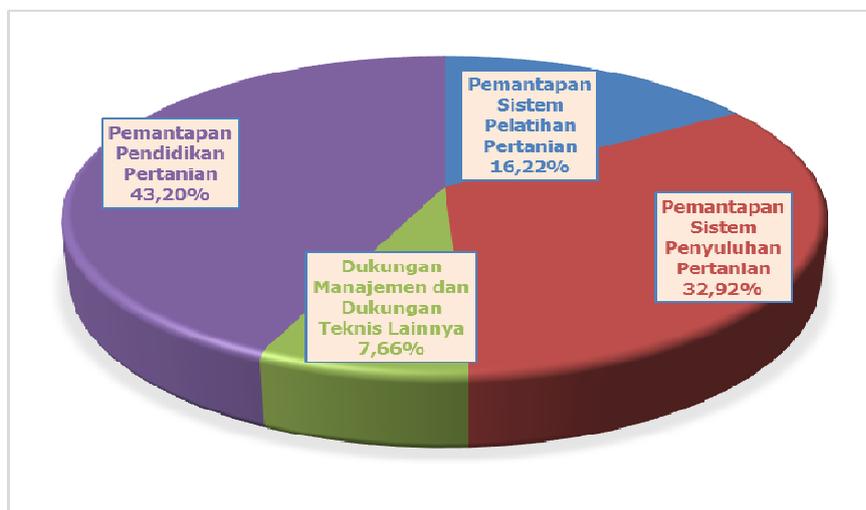
Rp122.710.816.000,00 dan d. Pendidikan Pertanian Rp692.440.396.000,00 Rincian pagu anggaran Badan PPSDMP tahun 2019 pada tabel 1.

Tabel 1  
Pagu Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2019

| No | Kegiatan                                       | PAGU (Rp)                |
|----|--|--------------------------|
| a. | Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian          | 259.997.665.000          |
| b. | Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian         | 527.747.127.000          |
| c. | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya | 122.710.816.000          |
| d. | Pemantapan Pendidikan Pertanian                | 692.440.396.000          |
|    | <b>TOTAL</b>                                   | <b>1.602.896.004.000</b> |

Sumber data. Sekretariat Badan PPSDMP, tahun 2019

Persentase pagu anggaran Badan PPSDMP tahun 2019 mulai dari yang tertinggi yaitu Pemantapan Pendidikan Pertanian 43,20%, Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian 32,92%, Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 16,22% dan terendah adalah Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 7,66%. Persentase pagu anggaran Badan PPSDMP tahun 2019 pada gambar 3.



Gambar 3. Persentase pagu anggaran Badan PPSDMP tahun 2019

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana strategis Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2015–2019 melalui Keputusan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 152/Kpts/RC.110/I/8/18 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 3506/OT.010/J/04/2015 Tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2015–2019 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 155/RC.110/I/8/17 menyangkut visi dan misi Badan PPSDMP adalah sebagai berikut :

##### **a. Visi**

Badan PPSDMP telah menetapkan visi pada Tahun 2015–2019 “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian Yang Profesional, Mandiri, dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”.

##### **b. Misi**

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Badan PPSDMP yang telah ditetapkan adalah:

- 1 Memantapkan Sistem Penyuluhan Pertanian yang Terpadu dan Berkelanjutan;
- 2 Memperkuat Pendidikan Pertanian yang Kredibel;
- 3 Memantapkan Sistem Pelatihan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang Berbasis Kompetensi dan Daya Saing; serta
- 4 Memantapkan Sistem Administrasi dan Manajemen Yang Transparan dan Akuntabel.

##### **c. Tujuan**

Tujuan yang ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2015–2019, sebagai berikut:

1. Peningkatan kemandirian kelembagaan petani;
2. Peningkatan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian lulusan pendidikan tinggi dan menengah pertanian;
3. Peningkatan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian melalui pelatihan pertanian;
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.

#### **d. Sasaran Program Badan**

Sasaran program Badan PPSDMP adalah :

1. Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan;
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional;
3. Meningkatnya kualitas layanan publik BPPSDMP;
4. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian;
5. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan BPPSDMP.

Indikator kinerja sasaran program sebagai berikut :

1. Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional;
2. Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional;
3. Rasio kelembagaan petani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional;
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPPSDMP;
5. Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan;
6. Penurunan rata-rata Competency Gap Index (CGI) peserta pelatihan;
7. Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
8. Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017.

### **e. Kebijakan**

Arah kebijakan Badan PPSDMP adalah:

1. Optimalisasi peran penyuluhan dalam pendampingan program swasembada pangan di tingkat Balai Penyuluhan Pertanian dan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian;
2. Peningkatan daya saing dan kinerja balai diklat;
3. Tranformasi STPP dan SMK-PP UPT menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian serta sertifikasi profesi pertanian; dan
4. Pemantapan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

Fokus Badan PPSDMP dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, dilakukan melalui Peningkatan efektifitas Penyuluhan dalam Mendukung Pencapaian Target Pembangunan Pertanian yang mencakup pelaku utama dan pelaku usaha; penyuluh dan petugas teknis; dan aparatur pemerintah terkait pertanian lainnya, serta pemenuhan unsur daya saing tenaga kerja sektor pertanian.

### **f. Strategi**

Strategi Badan PPSDMP meliputi Penguatan kelembagaan petani dan Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian. Dalam mewujudkan strategi Kementerian Pertanian yang terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, maka strategi yang akan dilakukan oleh Badan PPSMDP adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Langkah operasional yang ditempuh dalam mewujudkan strategi untuk pemantapan sistem penyuluhan pertanian, adalah:

- a) Pemberdayaan Poktan, Gapoktan, dan BUMP/KEP/Korporasi Petani/ Kelompok Usaha Bersama;
- b) Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Pusat Koordinasi Program dan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pertanian di Kecamatan;

- c) Pengembangan dan penyebaran informasi/materi penyuluhan pertanian melalui sistem teknologi, informasi dan komunikasi pertanian;
- d) Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB, Penyuluh Pertanian, dan swadaya/swasta;
- e) Meningkatkan sinergitas pemberdayaan penyuluhan antar dinas teknis dan balai penelitian;
- f) Penguatan program dan kerjasama;
- g) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana;
- h) *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP).

## 2. Strategi Pendidikan Pertanian;

Langkah operasional yang ditempuh dalam mewujudkan strategi untuk Pendidikan Pertanian, diantaranya:

- a) Transformasi pendidikan pertanian;
- b) Regenerasi petani melalui Program Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP);
- c) Peningkatan kualitas dosen, guru, dan calon tenaga pendidik melalui pendidikan tinggi dan pascasarjana;
- d) Pengabdian masyarakat di wilayah perbatasan;
- e) Pendampingan mahasiswa/alumni/pemuda tani dan dosen dalam peningkatan produksi komoditas strategis pertanian;
- f) Peningkatan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;
- g) Penguatan program dan kerjasama pendidikan pertanian;
- h) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pertanian;
- i) *Youth Enterpreunership And Employmnt Support Services In Agriculture Design Project* (YESS)

## 3. Strategi Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Langkah operasional yang ditempuh dalam mewujudkan strategi untuk pemantapan sistem pelatihan pertanian untuk meningkatkan daya saing dan kinerja balai pelatihan, diantaranya:

- a) Standarisasi mutu layanan kediklatan;

- b) Peningkatan Prasarana dan sarana UPT Pelatihan Pertanian;
  - c) Penguatan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai penyelenggara pelatihan non aparatur;
  - d) Peningkatan kapasitas widyaiswara dan tenaga kediklatan;
  - e) Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing;
  - f) Pengembangan program dan jejaring kerjasama pelatihan;
  - g) Peningkatan SKKNI sektor pertanian;
  - h) Peningkatan peserta sertifikasi SDM pertanian;
  - i) Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian;
  - j) *Rural Empowerment and Agriculture Development Scalling-Up Initiative* (READ-SI).
4. Strategi Pemantapan Sistem Administrasi dan Manajemen transparan dan Akuntabel
- a) Perencanaan program, kegiatan, anggaran berbasis kinerja, serta peningkatan kerjasama;
  - b) Pengembangan sistem pelaporan keuangan negara secara tertib;
  - c) Pemantapan reformasi birokrasi melalui pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan;
  - d) Penguatan sistem data, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta hubungan masyarakat, informasi publik dan perpustakaan;
  - e) *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* (IPDMIP).

#### **g. Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan Badan adalah **(1) Program Peningkatan Penyuluhan, dan Pelatihan Pertanian; dan (2) Program Pendidikan Pertanian**. Kegiatan utama yang mendukung program tersebut adalah :

- a. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian;
- b. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
- c. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
- d. Pemantapan Pendidikan Pertanian;

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Badan PPSDMP merupakan dokumen penugasan dari Menteri Pertanian kepada Kepala Badan PPSDMP yang ditetapkan pada bulan Januari 2019. Sasaran program yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu dipedesaan, dengan target indikator kinerja yaitu 15% rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional.
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional, dengan target indikator kinerja sebagai berikut :
  - a. 30% rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional
  - b. 2,4% rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional
3. Meningkatnya kualitas layanan publik BPPSDMP, dengan target indikator kinerja yaitu 3,34 skala likert Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP.
4. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian, dengan target indikator kinerja sebagai berikut :
  - a. 90% rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan
  - b. 20% penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan
5. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, dengan target indikator kinerja sebagai berikut :
  - a. 83 Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
  - b. 86,50 Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017)

Perjanjian Kinerja (PK) Badan PPSDMP tahun 2019 direvisi pada 12 Desember 2019. Revisi PK Badan PPSDMP tahun 2019 tersebut tidak merubah output/target fisik masing-masing indikator kinerja karena yang mengalami

perubahan adalah pada anggaran kegiatan. Rincian Perjanjian Kinerja (PK) Badan PPSDMP Tahun 2019 (Revisi Desember 2019) pada tabel 2.

Tabel 2  
Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2019

| NO | SASARAN PROGRAM  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET            |
|----|--|---|-------------------|
| 1. | Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu dipedesaan  | 1. Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional                       | 15%               |
| 2. | Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional  | 2. Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional                                    | 30%               |
|    |  | 3. Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional                  | 2,4%              |
| 3. | Meningkatnya kualitas layanan publik BPPSDMP   | 4. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP   | 3,34 Skala Likert |
| 4. | Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian   | 5. Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan | 90%               |
|    |  | 6. Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan   | 20%               |
| 5. | Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian | 7. Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian  | 83 Nilai          |
|    |  | 8. Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017)  | 86,50 Nilai       |

Sumber data. Sekretariat Badan PPSDMP, tahun 2019

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Kriteria Ukuran Keberhasilan**

Gambaran kinerja Badan PPSDMP dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2015 tersebut, maka digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80 s.d 100%), (3) cukup berhasil (capaian 60 s.d <80%) dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead indicator* adalah indikator yang pencapaiannya dibawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktivitas. Sedangkan *lag indicator* adalah indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator *output* atau indikator *outcome*. Berdasarkan ketentuan pada peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 196/PMK.02/2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor: 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka jenis indikator kinerja sasaran strategis (IKKS) pimpinan Kementerian/Lembaga adalah *outcome/impact (lag indicator)*. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) eselon I harus menggunakan jenis indikator *output/outcome*, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) eselon II harus menggunakan jenis indikator *output*. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Menteri hingga eselon II harus menggunakan *lag indicator*.

### **B. Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2019**

Capaian kinerja Badan PPSDMP diukur dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis pada PK Badan

PPSDMP tahun 2019. Rincian hasil capaian kinerja Badan PPSDMP Tahun 2019 pada tabel 3.

Tabel 3  
Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2019

| No | Sasaran Program  | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | % Capaian | Kategori        |
|----|--|--|--------|-----------|-----------|-----------------|
| 1. | Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu dipedesaan  | 1 Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional (%)                       | 15     | 15,64     | 104,27    | Sangat Berhasil |
| 2. | Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional  | 2 Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional (%)                                    | 30     | 30        | 100       | Berhasil        |
|    |  | 3 Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional (%)                  | 2,4    | 2,41      | 100,54    | Sangat Berhasil |
| 3. | Meningkatnya kualitas layanan publik BPPSDMP   | 4 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert)  | 3,34   | 3,46      | 103,59    | Sangat Berhasil |
| 4. | Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian   | 5 Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan (%) | 90     | 90,28     | 100,32    | Sangat Berhasil |
|    |  | 6 Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan (%)   | 20     | 18,59     | 107,61    | Sangat Berhasil |
| 5. | Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian | 7 Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai)  | 83     | 87,19     | 105,05    | Sangat berhasil |
|    |  | 8 Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) (Nilai)  | 86,5   | 89,03     | 102,92    | Sangat Berhasil |

Sumber data. Pusat dan Sekretariat Badan, tahun 2019

## 1. Pengukuran Capaian Kinerja Badan PPSDMP 2019

Realisasi capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2019 umumnya telah memenuhi target perjanjian kinerja Kepala Badan PPSDMP tahun 2019. Dari 8 (delapan) indikator kinerja, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang mencapai realisasi diatas 100% (kategori sangat berhasil) dan 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai realisasi 100% (kategori berhasil).

Pengukuran capaian kinerja Badan PPSDMP 2019 masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut:

### a. Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional

Sistem Pertanian Terpadu (SPT) merupakan sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan ilmu lain yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan, sehingga diharapkan dapat sebagai salah satu solusi bagi peningkatan produktivitas lahan, program pembangunan dan konservasi lingkungan, serta pengembangan desa secara terpadu dan berkelanjutan. Penerapan sistem pertanian terpadu diperlukan suatu upaya untuk mendorong para petani dan kelembagaan petani melalui praktek bertani yang produktif, kompetitif, dan efisien serta mampu mempertahankan kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha sehingga mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok/kelembagaan petani.

Kelembagaan petani merupakan lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani, yang dibentuk atas dasar kepentingan yang sama, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota yang dinamakan dengan kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelembagaan petani

lainnya.

Cara mencapai target indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019 antara lain melalui kegiatan:

- 1) Sekolah Lapangan (SL), yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Daerah Irigasi melalui *Integrated Partisipatory Developmnet and Management of Irigation Project* (IPDMIP), dan melalui Proyek *Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling-up Innitatif* (READSI);
- 2) Adaptasi Teknologi yang dilaksanakan di BPP, Pelatihan Pejabat Fungsional dan Pelatihan Non Aparatur, Pelatihan Penyuluh melalui Proyek IPDMIP, Pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen, dan Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan oleh Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan);
- 3) Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya yang dilaksanakan di Pos Penyuluhan Pertanian Pedesaan (Posluhdes), pelatihan dan pemagangan di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S), *Agrosociopreneur* melalui Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP).

Pencapaian indikator kinerja ini diukur melalui perbandingan kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional dengan target 15% atau dengan rumus:

$$\left( \frac{\sum \text{Kelembagaan petani yang telah menerapkan sistem pertanian terpadu}}{\sum \text{total kelembagaan petani di Indonesia}} \right) \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu diperoleh dari Jumlah poktan yang telah mengikuti kegiatan Sekolah Lapangan (SL), Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita, Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya. Sedangkan jumlah total kelembagaan petani merupakan jumlah poktan nasional pada tahun 2018 yang terdaftar

dalam SIMLUHTAN.

Perhitungan capaian indikator Rasio Kelembagaan Petani yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional adalah:

Target Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019 sebesar 15%, maka jumlah kelompok tani yang menjadi target yaitu **15% x 588.637 = 88.296 poktan.**

Rincian dari target rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019 terdiri dari:

#### I. Sekolah Lapang (SL)

Sekolah lapang adalah proses pembelajaran non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usaha, identifikasi dan mengatasi permasalahan, mengambil keputusan serta menerapkan teknologi yang sesuai dengan sumberdaya setempat secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga usahatani lebih efisien, berproduktifitas tinggi dan berkelanjutan. Proses pembelajaran dilakukan dilapangan dimana tersedia objek nyata yang dijadikan materi pembelajaran. Kelompok tani yang mengikuti kegiatan Sekolah Lapangan tersebar di 33 provinsi. Pelaksanaan kegiatan SL selain di BPP, dilaksanakan juga pada Proyek IPDMIP, dan Proyek READSI

#### A. Jumlah poktan yang mengikuti kegiatan SL di BPP sebanyak 46.500 Poktan

Pelaksanaan sekolah lapangan dilaksanakan di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dimana wilayah kerja tersebut dipilih 5 (lima) wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP). Dengan demikian dalam setiap wilayah kerja BPP terdapat 5 (lima) WKPP sebagai pelaksana sekolah lapangan. Fasilitator pelaksanaan sekolah lapangan di WKPP adalah penyuluh pertanian yang bertugas di wilayah kerja tersebut. Durasi pelaksanaan sekolah

lapangan selama 1 (satu) musim tanam yang disesuaikan dengan musim di lokasi tersebut. BPP dapat memilih musim tanam periode April s.d September atau Oktober s.d Maret, pilihan ini diterapkan dengan mempertimbangkan jenis komoditi dan musim pada lokasi. Jumlah peserta sekolah lapangan disetiap WKPP sebanyak 15 orang yang berasal dari 6 kelompok tani di dalam WKPP, dengan rincian 1 (satu) kelompok utama (5 orang) berasal dari lokasi pelaksanaan dan 5 (lima) kelompok pendamping (masing-masing diwakili 2 orang). Metode pembelajaran dalam pelaksanaan sekolah lapangan menggunakan prinsip-prinsip belajar sambil berbuat (*learning by doing*) sehingga peserta memahami cara pengambilan keputusan dalam mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Rincian Kegiatan SL (Pusluh) adalah  $1550 \text{ BPP} \times 5 \text{ WKPP/PP} \times 6 \text{ Poktan} = 46.500 \text{ Poktan}$ .

**B. Daerah Irigasi melalui *Integrated Partisipatory Developmnet and Management of Irrigation Project (IPDMIP)* sebanyak 14.589 Poktan**

Proyek IPDMIP dirancang untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai kendala dan meningkatkan produktivitas pertanian, serta mengurangi kemiskinan di pedesaan, mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan gizi. IPDMIP meningkatkan nilai pertanian irigasi berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan dan sumber penghidupan di pedesaan. Proyek ini mengadopsi pendekatan penetapan sasaran yang inklusif di daerah irigasi sehingga menguntungkan semua petani yang aktif. Kegiatan SL proyek IPDMIP, dimana 4.863 kegiatan SL telah membina 3 (tiga) poktan dengan rincian sebagai berikut:  $4.863 \text{ SL} \times 3 \text{ Poktan} = 14.589 \text{ Poktan}$ .

**C. *Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling-up Innitiatif (READSI)* sebanyak 1.001 Poktan**

Proyek READSI merupakan inisiasi peningkatan skala atas Proyek *Rural Empowerment and Agricultural Development (READ)* yang telah dilaksanakan Badan PPSDMP sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 pada 5 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah melalui pendanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Pemerintah Indonesia dari *International Fund for Agricultural Development (IFAD)*. Proyek READ dinilai berhasil oleh Bappenas karena dapat meningkatkan pendapatan dan produksi serta memperkuat kelembagaan tingkat desa melalui satu paket lengkap program pemberdayaan yang terintergrasi. Untuk menjaga keberlanjutan pada tahun 2015-2017 dilakukan kegiatan Replikasi READ di 2 Provinsi yaitu Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur di 4 (empat) kabupaten melalui Proyek READ-SI.

Tujuan Proyek READSI adalah pemberdayaan rumah tangga di pedesaan dilokasi proyek baik secara individu maupun secara kelompok dengan keterampilan membangun rasa percaya diri dan memanfaatkan sumberdaya untuk mendapatkan pendapatan dari sektor pertanian dan non pertanian serta meningkatkan taraf hidupnya dengan secara berkelanjutan.

## II. Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita

### **A. Adaptasi Teknologi yang dilaksanakan di BPP sebanyak 1.700 Poktan**

Pelaksanaan kegiatan adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita merupakan tindaklanjut dari hasil kegiatan penelitian teknologi yang bersumber dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan diujicobakan pada Kawasan tertentu oleh Balai Penyuluhan Pertanian. Penelitian dan penyuluhan pertanian merupakan komponen yang berperan penting dalam mewujudkan peningkatan produktivitas komoditas pertanian dalam mendukung swasembada berkelanjutan menuju kedaulatan pangan. Kelompok tani yang mengikuti kegiatan Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita tersebar di

33 provinsi. Kegiatan SL proyek IPDMIP, dimana 4.863 kegiatan SL telah membina 3 (tiga) poktan dengan rincian sebagai berikut: Adaptasi Teknologi yang dilaksanakan di BPP adalah 68 Unit x 5 BPP x 5 Poktan = 1.700 Poktan.

#### **B. Pelatihan Pejabat Fungsional sebanyak 5.432 Poktan**

Badan PPSDMP tahun 2019 telah melaksanakan Diklat fungsional bagi aparatur penyuluh pertanian sebanyak 679 orang berasal dari 33 provinsi seluruh Indonesia. Pelatihan diselenggarakan di 7 (tujuh) UPT pelatihan lingkup Badan PPSDMP yaitu di Batangkaluku, Binuang, Ketindan, Kupang, Lembang, Jambi dan Lampung. Pasca mengikuti pelatihan tersebut setiap penyuluh pertanian diwajibkan membina minimal 8 (delapan) poktan, sehingga ditahun 2019 poktan binaan yang telah terbentuk adalah mencapai 5.432 poktan. Rincian kegiatan Pelatihan Pejabat Fungsional adalah 679 Penyuluh Pertanian x 8 Poktan = 5.432 Poktan.

#### **C. Pelatihan Penyuluh melalui Proyek IPDMIP sebanyak 3.560 poktan**

Pada tahun 2019, Badan PPSDMP telah melaksanakan pelatihan penyuluh melalui proyek IPDMIP bagi 445 penyuluh. Setiap Penyuluh yang telah dilatih diwajibkan untuk membina minimal 8 (delapan) poktan, sehingga telah terbentuk 3.560 poktan. Rincian Pelatihan Penyuluh melalui Proyek IPDMIP adalah 445 penyuluh x 8 poktan = 3.560 poktan.

#### **D. Pelatihan Teknis Non Aparatur sebanyak 1.804 Poktan**

Badan PPSDMP telah melaksanakan pelatihan teknis non aparatur bagi petani di tahun 2019, dari 18.049 orang petani yang dilatih merupakan perwakilan dari masing-masing poktan sebanyak 10 orang, yang diwajibkan membina poktan masing-masing setelah mengikuti pelatihan. Rincian Pelatihan Non Aparatur = 18.049 Petani/10 Poktan= 1.804 Poktan.

#### **E. Pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen sebanyak 860 Poktan**

Pengabdian pada masyarakat dilaksanakan oleh 215 orang Dosen dari UPT Pendidikan yaitu di Medan, Bogor, Magelang, Yogyakarta, Malang, Gowa, Manokwari, Sembawa dan Banjarbaru. Setiap 1 (orang) dosen wajib membina 2 poktan penerima manfaat masing-masing sebanyak 2 kali. Sehingga ditahun 2019 telah membina 860 poktan. Rincian pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen adalah  $215 \text{ Dosen} \times 2 \text{ kali} \times 2 \text{ penerima manfaat (kelompok)} = 860 \text{ Poktan}$ .

#### **F. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan oleh Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) sebanyak 1.210 Poktan**

Mahasiswa UPT Pendidikan berjumlah 1.210 orang yang berada di polbangtan Medan, Bogor, Magelang, Yogyakarta, Malang, Gowa dan Manokwari, wajib melaksanakan praktek kerja lapangan, dimana 1 (satu) orang mahasiswa wajib membina 1 (satu) poktan. Mahasiswa Polbangtan Tahun 2019 telah membina 1.210 poktan. Rincian Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan oleh Mahasiswa Polbangtan adalah  $1.210 \text{ Mahasiswa} \times 1 \text{ Poktan} = 1.210 \text{ Poktan}$ .

### III. Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya:

#### **A. Penyuluh Pertanian Swadaya sebanyak 14.000 Poktan**

Penyuluh swadaya adalah mitra bagi penyuluh PNS/THLTBPP yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas penyuluhan pertanian. Penumbuhan dan pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya merupakan upaya untuk memberikan kesempatan bagi para petani ahli untuk memotivasi petani lainnya dalam menerapkan teknologi terutama untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas strategis nasional. Tujuan dari kegiatan ini adalah : meningkatkan peran dan motivasi penyuluh

pertanian swadaya dalam melakukan kegiatan pembelajaran sebagai mitra kerja penyuluh pertanian PNS dalam pendampingan kelompok tani dan meningkatkan wawasan dan kemampuan penyuluh pertanian swadaya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan pertanian. Fasilitasi penumbuhan dan pengembangan penyuluh pertanian swadaya melalui kegiatan demplot sebagai sarana pembelajaran bagi kelompok tani dalam penerapan sistem pertanian terpadu (SPT). Kelompok tani binaan penyuluh swadaya tersebar di 33 provinsi.

Rincian penumbuhan dan pengembangan penyuluh pertanian swadaya yang dilaksanakan di Pos Penyuluhan Pertanian Pedesaan (Posluhdes) adalah  $3.500 \text{ PPS} \times 4 \text{ Poktan} = 14.000 \text{ Poktan}$ .

#### **B. Pelatihan dan pemagangan di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) sebanyak 936 Poktan**

Pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya (P4S) merupakan salah satu kelembagaan pelatihan/ permagangan petani yang tumbuh dan berkembang dari petani oleh petani dan untuk petani yang secara langsung berperan aktif dalam pembangunan pertanian di wilayahnya, dalam rangka meningkatkan peran dan kapasitas P4S sebagai pusat pembelajaran tani melalui kegiatan pelatihan/permagangan yang memenuhi standar/kaidah kaidah proses belajar mengajar pemerintahan melaksanakan pembinaan dan bimbingan bagi pengelola P4S yang mencakup aspek kelembagaan, sarana prasarana, ketenagaan, penyelenggaraan pelatihan/permagangan, pengembangan usaha agribisnis dan jejaring kerja proses penumbuhan kelembagaan usaha agribisnis dan jejaring kerja proses penumbuhan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya dapat dilakukan melalui kegiatan :

1. Sosialisasi dan penumbuhan kesadaran tentang peran, manfaat dan keuntungan mendirikan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya
2. Studi banding pada P4S yang relative berhasil
3. Pelatihan manajemen dan kepemimpinan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya
4. Fasilitas pendirian kelembagaan pelatihan pertanian swadaya yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan berdasarkan indicator klasifikasi kelas P4S menjadi kelas pertama madya atau utama bahkan aditama.

Jumlah P4S binaan dari UPT pelatihan lingkup Badan yaitu di batangkaluku, binuang, ketindan, kupang, lembang, jambi dan lampung adalah 234 P4S. Setiap 1 (satu) P4S diwajibkan membina minimal 4 poktan. Tahun 2019 P4S telah membina 936 poktan.

Rincian pelatihan dan pemagangan di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) adalah 234 P4S x 4 Poktan Binaan = 936 Poktan.

### **C. *Agrosociopreneur* dengan Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) sebanyak 500 Kelompok**

PWMP merupakan salah satu kegiatan Kementan dalam rangka mewujudkan regenerasi petani yang dirancang untuk penyadaran, penumbuhan, pengembangan dan pemandirian minat, ketrampilan, dan jiwa kewirausahaan generasi muda di bidang pertanian. Selanjutnya, mengembangkan peluang bisnis bagi lulusan sehingga mampu menjadi *job-creator* di sektor pertanian (agribisnis), dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan pertanian sebagai center of agripreneur developmen berbasis inovasi agribisnis

Realisasi rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019 telah melebihi target 15% (88.296 poktan), karena realisasi telah mencapai

15,64% (92.092 poktan). Adapun perhitungan rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional sebagai berikut:

$$= \frac{92.092 \text{ poktan}}{588.637 \text{ poktan}} \times 100 = 15,64\%$$

Rincian realisasi rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019 pada tabel 4.

Tabel 4  
Realisasi rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019

| URAIAN   |   | JUMLAH         |
|--|---|----------------|
| <b>Jumlah Poktan yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu (Poktan)</b> |   | <b>92.092</b>  |
| <b>a.</b>  | <b>Jumlah poktan yang mengikuti kegiatan SL</b>                                   | <b>62.090</b>  |
| -  | Sekolah Lapangan  | 46.500         |
| -  | IPDMIP  | 14.589         |
| -  | READSI  | 1.001          |
| <b>b.</b>  | <b>Jumlah poktan yang mengikuti kegiatan adaptasi teknologi spesifik lokalita</b> | <b>14.566</b>  |
| -  | Pusluh  | 1.700          |
| -  | Pelatihan pejabat fungsional  | 5.432          |
| -  | IPDMIP  | 3.560          |
| -  | Pelatihan teknis non aparatur   | 1.804          |
| -  | Pengabdian kepada masyarakat  | 860            |
| -  | PKL mahasiswa polbangtan  | 1.210          |
| <b>c.</b>  | <b>Jumlah Tumbuh kembang penyuluh swadaya</b>                                     | <b>15.436</b>  |
| -  | Posluhdes   | 14.000         |
| -  | P4S   | 936            |
| -  | Agrosociopreneur (PWMP)   | 500            |
| <b>Jumlah Poktan Nasional (berdasarkan SIMLUHTAN)</b>                  |   | <b>588.637</b> |
| <b>RASIO (%)</b>   |   | <b>15,64</b>   |

Sumber data. Pusat Lingkup Badan PPSDMP

Persentase capaian kinerja rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional pada tahun 2019 :

$$= \frac{15,64}{15} \times 100 = 104,27\% \text{ (sangat berhasil).}$$

**b. Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional pada tahun 2019**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani. Kelembagaan petani merupakan lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani, yang dibentuk atas dasar kepentingan yang sama, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota yang dinamakan dengan kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelembagaan petani lainnya.

Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dilakukan melalui pemberdayaan petani dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal untuk untuk mengubah pola pikir dan sikap petani serta meningkatkan usaha tani serta kemampuan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri dalam melaksanakan fungsinya.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian sehingga dapat terbentuk kelembagaan petani yang memiliki kemampuan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya serta berjiwa kewirausahaan dan mandiri guna mendukung terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Salah satu indikator peningkatan kapasitas kelembagaan petani adalah peningkatan skor dan kelas kemampuan poktan.

Kegiatan peningkatan kapasitas poktan diawali dengan melakukan pemetaan atas keberadaan dan keragaan dari masing-masing kelompok tani oleh penyuluh pertanian untuk mengetahui kemampuan dari aspek manajemen teknis maupun manajemen administrasi mencakup kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi usaha tani, dan mengembangkan usaha tani itu sendiri.

Adapun hasil pemetaan keragaan kelembagaan petani ditindaklanjuti dengan pembagian kelas kemampuan khususnya kelas kemampuan kelompok tani. Untuk mendukung kinerja penyuluh pertanian dalam pengawalan dan pendampingan kepada kelompok tani dan kelembagaan tani lainnya diberikan fasilitas berupa Biaya operasional penyuluh (BOP) yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas poktan dengan peningkatan skor dan kelas masing-masing poktan. Penilaian kelas kemampuan kelompok tani merupakan salah satu bentuk pembinaan untuk memberikan motivasi kepada kelompok tani agar lebih berprestasi dalam hal mencapai kelas kemampuan yang lebih tinggi. Selain itu dapat diketahui kelemahan-kelemahan kelompok yang dinilai sehingga memudahkan untuk melakukan pembinaan.

Penilaian dilakukan setiap tahun pada bulan November. Kegiatan penilaian dilakukan oleh masing-masing penyuluh pertanian wilayah kerja binaannya. Kelas kemampuan kelompok tani dibagi dalam 4 (empat) kelas yaitu :

- Kelas pemula dengan skor 0-245
- Kelas lanjut dengan skor 246-455
- Kelas madya dengan skor 456-700
- Kelas utama dengan skor 701-1000

Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pengembangan SDM pertanian yang akan terwujud melalui program-program penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, pendidikan pertanian, serta standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

Pencapaian indikator kinerja rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional pada tahun 2019 diukur melalui perbandingan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional atau dengan rumus:

$$\left( \frac{\sum \text{Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya}}{\sum \text{total kelembagaan petani di Indonesia}} \right) \text{st. 2014}$$

Keterangan :

- 1) Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya berasal dari jumlah Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TBPP, masing-masing penyuluh baik Penyuluh Pertanian PNS dan THI-TBPP diwajibkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani (Poktan) sebanyak 5 (lima) poktan di wilayah kerjanya.
- 2) Total kelembagaan petani merupakan jumlah poktan nasional yang terdaftar dalam SIMLUHTAN pada posisi 31 Desember 2018 yaitu 588.637 poktan.

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut, maka capaian indikator Rasio Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional adalah :

$$X = \frac{176.591}{588.637} \times 100\% = 30\%$$

Pada tahun 2019 realisasi rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional sebesar 30% dari target 30% maka persentase capaiannya sebesar 100% atau dengan **kategori berhasil**.

Secara rinci jumlah poktan yang meningkat kapasitasnya terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5  
Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani pada tahun 2019

| No | Uraian            | Kelas Kelompok |                |               |              |                |
|----|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
|    |                   | Pemula         | Lanjut         | Madya         | Utama        | Jumlah         |
| 1. | Peningkatan Kelas | -              | 12.177         | 2.536         | 288          | 15.001         |
| 2. | Peningkatan Skor  | 33.297         | 111.449        | 15.745        | 1.099        | 161.590        |
|    | <b>TOTAL</b>      | <b>33.297</b>  | <b>123.626</b> | <b>18.281</b> | <b>1.387</b> | <b>176.591</b> |

Sumber: SIMLUHTAN dan SILUHTAN BPPSDMP, 2019

Pada tabel 5, jumlah poktan yang meningkat kapasitasnya sebanyak 176.591 poktan yang berasal dari peningkatan kelas dan peningkatan skor poktan. Untuk peningkatan kelas poktan dari kelas Pemula ke Lanjut sebanyak 12.177 poktan, dari Lanjut ke Madya sebanyak 2.536 poktan,

dari Madya ke Utama sebanyak 288 poktan sehingga total peningkatan kelas sebanyak 15.001 poktan. Sedangkan Peningkatan Skor di kelas Pemula sebanyak 33.297 poktan, di kelas Lanjut sebanyak 111.449 poktan, di kelas Madya sebanyak 15.745 poktan dan kelas Utama sebanyak 1.099 poktan, sehingga total Peningkatan Skor sebanyak 161.590 poktan.

Realisasi Pengukuran Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019 telah memenuhi target yaitu **176,591 poktan**.

Sehingga realisasi/target =  $176,591/176,591 \times 100 = 100\%$

Persentase capaian kinerja Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional adalah **30/30 x 100 = 100% (berhasil)**.

**c. Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan salah satu terobosan dalam rangka mengembangkan penyuluhan pertanian yang dihela pasar melalui penerapan berbagai metode pemberdayaan. Dengan adanya model ini diharapkan dapat diperoleh alternatif pemberdayaan petani dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh petani secara profesional di sektor pertanian.

Kelembagaan ekonomi petani adalah kelembagaan petani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki kegiatan usahatani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang

ditumbuhkembangkan oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha.

Tujuan dari kelembagaan petani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) antara lain: 1). Mendorong terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani yang berbadan hukum; 2). Terbentuknya bisnis petani dalam skala ekonomi berbasis kawasan pertanian; 3). Kelembagaan Ekonomi Petani yang telah berbadan hukum memiliki izin usaha yang terdaftar dilembaga resmi; 4). Mendorong para petani untuk berkelompok besar dalam satu manajemen berbasis kawasan pertanian.

Pengukuran rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional 2019 dengan target 2,4% adalah dengan rumus :

$$= \frac{\text{Total KEP (ditahun 2019)}}{\text{Total Poktan Nasional}} \times 100$$

Keterangan :

1. Total KEP tahun 2019 sebanyak 14.204 unit. Rincian jumlah total KEP tahun 2019 adalah sebagai berikut :
  - a) Jumlah KEP sampai dengan tahun 2019 sebanyak 12.080 unit
  - b) Jumlah P4S tahun 2019 sebanyak 1.207 unit
  - c) Jumlah kelompok usaha pertanian melalui kegiatan PWMP sebanyak 917 unit
2. Total Poktan Nasional = 588.637 poktan

Jumlah total KEP tahun 2019 adalah 14.204 poktan. Realisasi meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional dengan indikator kinerja rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional adalah :

$$= \frac{14.204}{588.637} \times 100 = 2,41\%$$

Sehingga persentase capaian kinerja rasio kelembagaan petani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional dengan target 2,4% adalah :

$$= \frac{2,41}{2,4} \times 100 = 100,54\% \text{ (sangat berhasil)}$$

**d. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik Badan PPSDMP tahun 2019**

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat unit kerja pelayanan publik lingkup Kementerian Pertanian bahwa Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM adalah hasil pengukuran dari kegiatan SKM berupa angka dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi masyarakat terhadap suatu jenis Pelayanan Publik. Unit Kerja Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat UKPP adalah satuan kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang secara langsung memberikan pelayanan publik kepada masyarakat lingkup Kementerian Pertanian.

Pemberi Pelayanan Publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan. Penerima Pelayanan Publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Kepuasan Masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat

terhadap kinerja pelayanan yang diberikan aparatur penyelenggara pelayanan publik. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat meliputi:

- 1) Persyaratan yaitu ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan suatu jenis Pelayanan Publik yang meliputi persyaratan administratif dan teknis.
- 2) Sistem, mekanisme dan prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi Pemberi Pelayanan Publik dan Penerima Pelayanan Publik termasuk pengaduan.
- 3) Waktu penyelesaian yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan publik.
- 4) Biaya atau tarif yaitu besaran biaya atau tarif yang dikenakan kepada Penerima Pelayanan dalam mengurus dan/atau mendapatkan Pelayanan dari UKPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Produk spesifikasi jenis pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 6) Kompetensi pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- 7) Perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- 8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- 9) Prasarana dan sarana yaitu berupa penunjang utama terselenggaranya pelayanan public dan alat atau bahan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan publik.

Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik BPPSDMP dengan target yaitu 3,34 Skala Likert. Pengukuran Nilai IKM adalah jumlah nilai IKM dari semua unit kerja pelayanan publik/jumlah unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan public yang

didapat dari hasil survei kepuasan masyarakat dari seluruh unit kerja pelayanan publik pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) lingkup BPPSDMP. Realisasi dan pengukuran IKM adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\sum \text{Nilai IKM dari semua unit kerja pelayanan publik}}{\sum \text{Unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik}}$$

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup BPPSDMP pada semester I dilaksanakan di 19 (sembilan belas) unit pelaksana teknis dengan responden dipilih secara acak dan penginputan menggunakan dua versi yaitu manual dan melalui aplikasi [ikm.pertanian.go.id](http://ikm.pertanian.go.id) yang terdiri dari: peserta pelatihan, peserta magang, mahasiswa, siswa, alumni dan orang tua siswa memperoleh nilai rata-rata 3,41 dengan nilai IKM 85,37 dengan kriteria mutu layanan BAIK. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup BPPSDMP pada semester II dilaksanakan di 20 (dua puluh) unit pelaksana teknis dengan responden dipilih secara acak dan penginputan melalui aplikasi [ikm.pertanian.go.id](http://ikm.pertanian.go.id) yang terdiri dari: peserta pelatihan, peserta magang, mahasiswa, siswa, alumni dan orang tua siswa memperoleh nilai rata-rata 3,51 dengan nilai IKM 87,88 dengan kriteria mutu layanan BAIK.

Pengukuran IKM BPPSDMP Tahun 2019 yang didapatkan dari 9.562 responden adalah nilai rata-rata 3,46 Skala Likert, nilai IKM 86,62 dengan kriteria mutu layanan **BAIK**. Rincian rekapitulasi hasil IKM lingkup BPPSDMP tahun 2019 pada tabel 6.

Tabel 6  
Rekapitulasi Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Badan PPSDMP  
Tahun 2019

| No. | UPT                  | Responden    | Nilai Rata-Rata | Nilai IKM    | Mutu Pelayanan  |
|-----|----------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1   | PPMKP Ciawi          | 257          | 3,89            | 97,35        | A (Sangat Baik) |
| 2   | Polbangtan Malang    | 762          | 3,35            | 83,78        | B (Baik)        |
| 3   | Polbangtan Bogor     | 746          | 3,58            | 89,5         | A (Sangat Baik) |
| 4   | Polbangtan Medan     | 444          | 3,32            | 83,08        | B (Baik)        |
| 5   | Polbangtan Manokwari | 442          | 3,16            | 78,96        | B (Baik)        |
| 6   | Polbangtan Gowa      | 491          | 3,39            | 84,94        | B (Baik)        |
| 7   | Polbangtan YoMa      | 1.36         | 3,26            | 81,51        | B (Baik)        |
| 8   | BBPP Lembang         | 769          | 3,83            | 95,58        | A (Sangat Baik) |
| 9   | BBPP Batangkaluku    | 284          | 3,63            | 90,61        | A (Sangat Baik) |
| 10  | BBPP Batu            | 578          | 3,52            | 87,99        | B (Baik)        |
| 11  | BBPP Ketindan        | 378          | 3,33            | 83,23        | B (Baik)        |
| 12  | BBPKH Cinagara       | 1.154        | 3,55            | 88,64        | A (Sangat Baik) |
| 13  | BBPP Kupang          | 253          | 3,35            | 83,89        | B (Baik)        |
| 14  | BBPP Binuang         | 263          | 3,67            | 91,68        | A (Sangat Baik) |
| 15  | BPP Jambi            | 116          | 3,51            | 87,71        | B (Baik)        |
| 16  | BPP Lampung          | 245          | 3,46            | 83,88        | B (Baik)        |
| 17  | SMK-PP Sembawa       | 133          | 3,38            | 84,43        | B (Baik)        |
| 18  | SMK-PP Banjarbaru    | 458          | 3,38            | 83,72        | B (Baik)        |
| 19  | SMK-PP Kupang        | 285          | 3,69            | 92,36        | A (Sangat Baik) |
| 20  | PEPI                 | 144          | 3,65            | 91,37        | A (Sangat Baik) |
|     | <b>BPPSDMP</b>       | <b>9.562</b> | <b>3,46</b>     | <b>86,62</b> | <b>B (Baik)</b> |

Sumber data. Sekretariat Badan 2019

UPT yang memperoleh nilai IKM tertinggi periode 2019 yaitu PPMKP Ciawi dengan nilai rata-rata 3,89 dan nilai IKM 97,35 mutu layanan SANGAT BAIK. UPT yang memperoleh nilai IKM terendah periode 2019 yaitu Polbangtan Manokwari dengan nilai rata-rata 3,16 dan nilai IKM 78,98 mutu layanan BAIK. Hasil pengolahan data survei kepuasan masyarakat lingkup Badan PPSDMP tahun 2019 pada tabel 7.

Tabel 7  
Rekapitulasi Hasil Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat  
Lingkup Badan PPSDMP Tahun 2019

| No | Unsur Pelayanan                         | Nilai rata-rata | Nilai IKM   |
|----|---|-----------------|-------------|
| 1. | Persyaratan                             | 86,06           | 3,44        |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur          | 84,67           | 3,39        |
| 3. | Waktu Penyelesaian                      | 84,54           | 3,38        |
| 4. | Biaya atau Tarif                        | 88,52           | 3,54        |
| 5. | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan      | 89,25           | 3,57        |
| 6. | Kompetensi Pelaksana                    | 85,06           | 3,4         |
| 7. | Perilaku Pelaksana                      | 88,60           | 3,54        |
| 8. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 85,04           | 3,4         |
| 9. | Prasarana dan Sarana                    | 87,06           | 3,48        |
|    | <b>Nilai</b>                            | <b>86,62</b>    | <b>3,46</b> |

Sumber data. Sekretariat Badan 2019

Unsur Pelayanan yang mendapatkan penilaian terbaik yaitu Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Publik dengan nilai rata-rata 3,57, sedangkan unsur pelayanan yang mendapatkan penilaian terendah adalah pada Waktu Penyelesaian dengan nilai rata-rata 3,38.

Persentase capaian kinerja meningkatnya kualitas layanan public Badan PPSDMP dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik BPPSDMP yaitu :

$$\frac{3,46}{3,34} \times 100 = 103,59\% \text{ (sangat berhasil)}$$

**e. Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tahun 2019**

Salah satu tugas kementerian pertanian melalui pusat pendidikan pertanian, Badan PPSDMP adalah mencetak calon wirausaha muda pertanian unggulan, sebagai upaya menarik animo generasi muda terhadap dunia pertanian. Saat ini, pusat pendidikan pertanian, mempunyai program **Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian** yang telah berjalan sejak tahun 2016. Program ini terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap kemandirian. Diharapkan dengan adanya proram ini, lulusan dan alumni POLBANGTAN dan faperta perguruan tinggi mitra dapat menjadi wirausaha muda sukses

dan berhasil, yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja muda, dan dapat menjadi petani muda berprestasi dengan jiwa agribisnis yang handal, kreatif, inovatif, profesional dan mampu bersaing di dunia internasional. Salah satu pertimbangan dilaksanakannya program ini adalah, sebagian besar lulusan POLBANGTAN/PT.Mitra terkendala oleh sulitnya memperoleh modal usaha untuk usaha agrisnis mereka. Untuk itu, kementerian pertanian memandang penting untuk mendukung upaya menumbuh kembangkan wirausahawan muda pertanian melalui program pemberian bantuan modal kerja usaha bagi lulusan dari POLBANGTAN/PT.Mitra dapat meningkat dan menciptakan wirausahawan muda.

**Retooling** adalah kegiatan pelatihan bagi mahasiswa polbangtan yang dilaksanakan Pusdiktan bekerjasama dengan Best Planter Indonesia (BPI) di bogor dalam rangka mencetak asisten unggul perkebunan sawit setelah selesai akan disalurkan ke perusahaan sawit.

Pengukuran kinerja meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian dengan indikator kinerja rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan dengan **target 90%** adalah dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah lulusan pendidikan bekerja dibidang pertanian}}{\text{Jumlah lulusan pendidikan pertanian}} \times 100$$

Keterangan rumus rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan.

Untuk mencapai target 90% dari rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan adalah = 90% x 1.266 = **1.139 orang**.

Jumlah lulusan pendidikan pertanian pada tahun 2019 adalah **1.266 orang**. Lulusan Pendidikan pertanian tahun 2019 terdiri dari 831 orang jumlah lulusan Polbangtan dan 435 orang lulusan SMKPP. Rincian jumlah

lulusan pendidikan pertanian pada masing-masing UPT lingkup Badan PPSDMP tahun 2019 pada tabel 8.

Tabel 8

## Lulusan Pendidikan Pertanian Pada UPT Lingkup Badan PPSDMP 2019

| No | Nama UPT                   | Jumlah Lulusan |
|----|----------------------------|----------------|
|    | <b>Polbangtan</b>          |                |
| 1. | Polbangtan Bogor           | 179            |
| 2. | Polbangtan Malang          | 171            |
| 3. | Polbangtan Yogya- Magelang | 204            |
| 4. | Polbangtan Medan           | 79             |
| 5. | Polbangtan Gowa            | 133            |
| 6. | Polbangtan Manokwari       | 65             |
|    | Jumlah 1                   | 831            |
|    | <b>SMK-PP</b>              |                |
| 1. | SMK-PP Sembawa             | 184            |
| 2. | SMK-PP Banjarbaru          | 146            |
| 3. | SMK-PP Kupang              | 105            |
|    | Jumlah 2                   | 435            |
|    | <b>Total 1+2</b>           | <b>1.266</b>   |

Sumber data. Pusat Pendidikan Pertanian, 2019

Lulusan Polbangtan terbanyak adalah dipolbangtan YOMA dan lulusan paling sedikit di polbangtan Gowa. Lulusan SMKPP terbanyak adalah di SMKPP Sembawa dan lulusan paling sedikit di SMKPP Kupang.

Lulusan UPT pendidikan pertanian lingkup Badan PPSDMP yang bekerja di bidang pertanian pada tahun 2019 adalah **1.143 orang**. Sebaran lulusan UPT lingkup Badan PPSDMP tahun 2019 bekerja dibidang pertanian adalah yang bekerja dibidang pertanian, perkebunan dan wirausaha yaitu 68 orang, PWMP yaitu 873 orang, Retooling yaitu 70 orang, dan kuliah dibidang pertanian yaitu 132 orang. Sebaran lulusan UPT Pendidikan lingkup Badan PPSDMP tahun 2019 yang bekerja dibidang pertanian pada tabel 9.

Tabel 9  
Sebaran lulusan UPT Pendidikan lingkup Badan PPSDMP tahun 2019  
yang bekerja dibidang pertanian

| No | Satker       | Lulusan      | Sebaran Lulusan Yang Bekerja Di Bidang Pertanian |            |           |            |              |
|----|--------------|--------------|--|------------|-----------|------------|--------------|
|    |              |              | Bekerja  | PWMP       | Retooling | Kuliah     | Jumlah       |
| 1  | Medan        | 179          | 0  | 74         | 5         | 0          | 79           |
| 2  | Bogor        | 171          | 0  | 171        | 8         | 0          | 179          |
| 3  | Yoma         | 204          | 0  | 191        | 13        | 0          | 204          |
| 4  | Malang       | 79           | 0  | 157        | 14        | 0          | 171          |
| 5  | Gowa         | 133          | 0  | 109        | 24        | 0          | 133          |
| 6  | Manokwari    | 65           | 0  | 57         | 6         | 0          | 63           |
| 7  | Sembawa      | 184          | 52   | 42         | 0         | 50         | 144          |
| 8  | Banjarbaru   | 146          | 14   | 42         | 0         | 36         | 92           |
| 9  | Kupang       | 105          | 2  | 30         | 0         | 46         | 78           |
|    | <b>TOTAL</b> | <b>1.266</b> | <b>68</b>  | <b>873</b> | <b>70</b> | <b>132</b> | <b>1.143</b> |

Sumber data. Pusat Pendidikan Pertanian, 2019

Jumlah lulusan yang bekerja di bidang pertanian paling banyak adalah dari UPT polbangtan YOMA dan paling sedikit adalah dari polbangtan Manokwari.

Realisasi lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada 2019 yaitu **1.143 orang** telah melebihi dari target yaitu **1.139 orang**.

Pengukuran realisasi rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada 2019 yaitu :  $1.143/1.266 \times 100 = 90,28\%$

Persentase capaian kinerja Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tahun 2019 adalah :

$$\frac{90,28}{90} \times 100 = 100,32\% \text{ (sangat berhasil)}$$

f. **Penurunan rata-rata *Competency Gap Index* (CGI) peserta pelatihan tahun 2019**

Penurunan rata-rata competency gap index peserta pelatihan dimaksudkan untuk mengukur kesenjangan kompetensi individu terhadap standar kompetensi yang dipersyaratkan atas jabatan atau pekerjaan

individu setelah mengikuti diklat atau pelatihan. Kompetensi SDM adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

Pengukuran kinerja meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian dengan indikator kinerja Penurunan rata-rata *Competency Gap Index* (CGI) peserta pelatihan dengan target 20% adalah dengan rumus :

= Standar Kompetensi Kerja (SKK) – rata-rata nilai kompetensi (70% x nilai pengetahuan dan keterampilan + 30% x nilai sikap dan perilaku).

Penjelasan rumus formula CGI yaitu:

- 1) Nilai Standar Kompetensi Kerja (SKK) menggunakan bobot 70 – 100% disesuaikan dengan bobot jenis pelatihan
- 2) Nilai Kompetensi diperoleh dari hasil evaluasi pada saat pelaksanaan pelatihan dengan nilai rata-rata 70% dikali nilai pengetahuan dan keterampilan (nilai peningkatan pengetahuan dan keterampilan yaitu nilai rata-rata (kemajuan berlatih + penguasaan materi (LP6) ditambah nilai rata-rata 30% dikali nilai aspek sikap dan perilaku (LP7) diperoleh dari penilaian sikap dan perilaku.

Target Penurunan rata-rata *Competency Gap Index* (CGI) peserta pelatihan tahun 2019 adalah 20%. Realisasi meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian dengan indikator kinerja penurunan rata-rata *Competency Gap Index* (CGI) peserta pelatihan tahun 2019 adalah **18,59%** artinya indikator sudah sangat berhasil. Rincian Target dan Realisasi Nilai Rata-rata *Competency Gap Index* (CGI) peserta pelatihan di UPT Lingkup Badan PPSDMP tahun 2019 pada tabel 10.

Tabel 10  
Target dan Realisasi Nilai Rata-rata *Competency Gap Index* (CGI)  
peserta pelatihan di UPT Lingkup Badan PPSDMP tahun 2019

| NO | UPT                | Target (%)   | Realisasi (%) | Capaian<br>(Target/Realisasi x 100) |
|----|--------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| 1  | PPMKP CIAWI        | 20,00        | 18,24         | 109,65                              |
| 2  | BBPKH CINAGARA     | 20,00        | 18,63         | 107,35                              |
| 3  | BBPP LEMBANG       | 20,00        | 14,65         | 136,52                              |
| 4  | BBPP KETINDAN      | 20,00        | 19,82         | 100,91                              |
| 5  | BBPP BATU          | 20,00        | 19,89         | 100,55                              |
| 6  | BBPP BATANGKALUKU  | 20,00        | 17,80         | 112,36                              |
| 7  | BBPP BINUANG       | 20,00        | 19,56         | 102,25                              |
| 8  | BBPP KUPANG        | 20,00        | 20,43         | 97,90                               |
| 9  | BPP LAMPUNG        | 20,00        | 16,03         | 124,77                              |
| 10 | BBPP JAMBI         | 20,00        | 20,81         | 96,11                               |
|    | <b>RATA - RATA</b> | <b>20,00</b> | <b>18,59</b>  | <b>107,61</b>                       |

Sumber data.Puslatan 2019

Penurunan rata-rata *Competency Gap Index* (CGI) peserta pelatihan dimaksudkan untuk mengukur kesenjangan kompetensi individu terhadap standar kompetensi yang dipersyaratkan atas jabatan atau pekerjaan individu setelah mengikuti diklat atau pelatihan. Kompetensi SDM adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

Persentase capaian kinerja meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian dengan indikator kinerja Penurunan rata-rata *Competency Gap Index* (CGI) peserta pelatihan tahun 2019 adalah :

$$\frac{20}{18,59} \times 100 = 107,61\% \text{ (sangat berhasil)}$$

Dalam rangka pencapaian tujuan perjanjian kinerja (PK) penurunan *Competency Gap Indeks* (CGI) pelatihan diperoleh dari hasil capaian indikator kinerja kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian yang meliputi :

1. Pelatihan mendukung komoditas strategis pertanian.

Pelatihan dimaksud diarahkan kepada peningkatan kemampuan penyuluh, petugas dan penerima manfaat dalam melakukan persiapan, penanaman, pemeliharaan benih/bibit sehingga dapat

tumbuh dan berproduksi secara baik di sentra produksi/ pengembangan komoditas strategis serta dikawasan tertinggal, terluar dan terdepan (3T). Komoditas strategis dimaksud meliputi (1) Tanaman Pangan diutamakan padi, jagung, kedelai melalui program UPSUS PAJALE, (2) Hortikultura diutamakan bawang merah, bawang putih dan aneka cabe, (3) Perkebunan diutamakan kopi, kakao, karet, tebu, kelapa dalam, (4) Peternakan diutamakan dalam bentuk peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting melalui program UPSUS SIWAB (5) Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Pelatihan dialokasikan di 10 (sepuluh) UPT Pelatihan Pertanian Pusat dalam bentuk : (a) pelatihan teknis bagi Aparatur dan Non Aparatur (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, alat dan mesin pertanian (alsintan)); (b) Pelatihan fungsional bidang pertanian dan non pertanian; (c) pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian dalam rangka mendukung reformasi birokrasi.

2. Penguatan Kelembagaan P4S sebagai Pusat Pemberdayaan Petani.  
Klasifikasi Lembaga Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya berkembang dari inisiasi petani di perdesaan yang dikelola oleh petani untuk mengembangkan usaha tani mereka, sangat berpotensi dalam pemberdayaan petani ke depan. Keberadaan kelembagaan P4S sangat strategis untuk terus diberdayakan, antara lain melalui aspek manajemen diklat/magang maupun pengembangan usaha, sehingga kontribusinya dalam mempercepat penerapan teknologi baru di bidang pertanian/ agribisnis di tingkat petani dan masyarakat perdesaan meningkat secara nyata. Sehubungan dengan hal tersebut telah terbit Permentan nomor 33 Tahun 2016, bahwa kelembagaan pelatihan pertanian swadaya terdiri dari P4S dan Lembaga Pelatihan Swadaya lainnya;
3. Sertifikasi Kompetensi Profesi SDM Bidang Pertanian  
Sertifikasi kompetensi sektor pertanian adalah proses pemberian sertifikat kompetensi sektor pertanian yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi dengan mengacu

kepada standar kompetensi kerja. Dalam pelaksanaan sertifikasi/uji kompetensi diperlukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sertifikasi sampai dengan penerbitan sertifikat dan pemeliharaan sertifikatnya. LSP juga bertugas dalam penyediaan sarana prasarana sertifikasi, perangkat sertifikasi SDM yang kompeten dalam pelaksanaan sertifikasi, dan asesor kompetensi. Peserta sertifikasi adalah SDM yang mempunyai profesi tertentu. Peserta sertifikasi adalah seseorang yang telah menempuh pendidikan atau seseorang yang telah mengikuti pelatihan atau seseorang yang telah berpengalaman dalam bidangnya dan mendaftarkan diri untuk mengikuti asesmen dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam skema sertifikasi. Asesor kompetensi adalah seseorang yang mempunyai kompetensi di bidang profesi tertentu dan mendapat penugasan dari LSP untuk melaksanakan penilaian secara profesional pada peserta sertifikasi.

**g. Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2019**

Nilai AKIP BPPSDMP adalah berdasarkan penilaian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Cara pengambilan data adalah dengan melihat hasil penilaian AKIP BPPSDMP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Nilai AKIP merupakan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai AKIP terdiri dari 5 Komponen yaitu Perencanaan kinerja (bobot 30%), Pengukuran kinerja (25%), Pelaporan kinerja (15%), Evaluasi internal (10%), dan Evaluasi internal (10%), dan Capaian kinerja (20%).

Target Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal tahun 2019 adalah nilai 83.

Rumus Nilai AKIP Badan PPSDMP :

= Nilai komponen perencanaan kinerja (30%)+nilai komponen pengukuran kinerja (25%)+nilai komponen pelaporan kinerja (15%)+nilai komponen evaluasi Internal (10%)+nilai komponencapaian kinerja (20%)

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan PPSDMP pada tahun 2019, nilai AKIPnya adalah 87,19. Rincian nilai AKIP Badan PPSDMP tahun 2019 pada tabel 11.

Tabel 11  
Rincian Nilai AKIP Badan PPSDMP tahun 2019

| No                            | Komponen Yg Dinilai       | Bobot      | Nilai tahun 2019       | %             |
|-------------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------|
| 1                             | Perencanaan Kinerja       | 30         | 27.97                  | 93,22         |
| 2                             | Pengukuran Kinerja        | 25         | 22.40                  | 89,58         |
| 3                             | Pelaporan Kinerja         | 15         | 13.62                  | 90,80         |
| 4                             | Evaluasi Kinerja/Internal | 10         | 8.83                   | 88,33         |
| 5                             | Capaian Kinerja           | 20         | 14.38                  | 71,88         |
| Nilai Hasil Evaluasi          |                           | <b>100</b> | <b>87,19</b>           | <b>134,14</b> |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja |                           |            | <b>A (Sangat Baik)</b> |               |

Sumber. Inspektorat Jenderal, 2019

Capaian kinerja Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal tahun 2019 yaitu :

$$= 87,19/83 \times 100$$

$$= \mathbf{105,05\% \text{ (kategori sangat berhasil)}}$$

#### h. Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017 di tahun 2019

Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan indikator kinerja Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017 adalah dengan ditetapkannya target capaian kinerja yaitu 86,50 Nilai. Realisasi pencapaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2019 adalah **nilai 89,03.**

Rincian pencapaian kinerja tahun 2019 adalah :

1. Capaian keluaran program = 100
2. Penyerapan anggaran = 92,54
3. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan = 94,15
4. Efisiensi = 9,21
5. Capaian sasaran program = 100
6. Rata-rata nilai satker = 81,22

Sumber data adalah berdasarkan PMK 214 tahun 2017 melalui aplikasi SMART.

Persentase capaian kinerja Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017 di tahun 2019 adalah :

$$= 89,03/86,50 \times 100$$

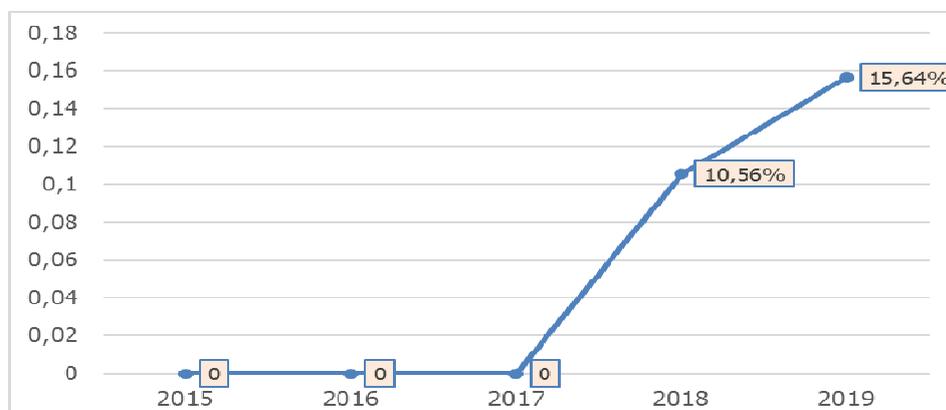
$$= \mathbf{102,92\% \text{ (sangat berhasil)}}$$

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Badan PPSDMP tahun 2015–2019.

- a. Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional pada tahun 2015-2019.

Realisasi pencapaian kinerja rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019 adalah **15,64%** dari target 15%.

Realisasi capaian rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2015-2019 pada gambar 4.



Gambar 4. Realisasi capaian rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2015-2019

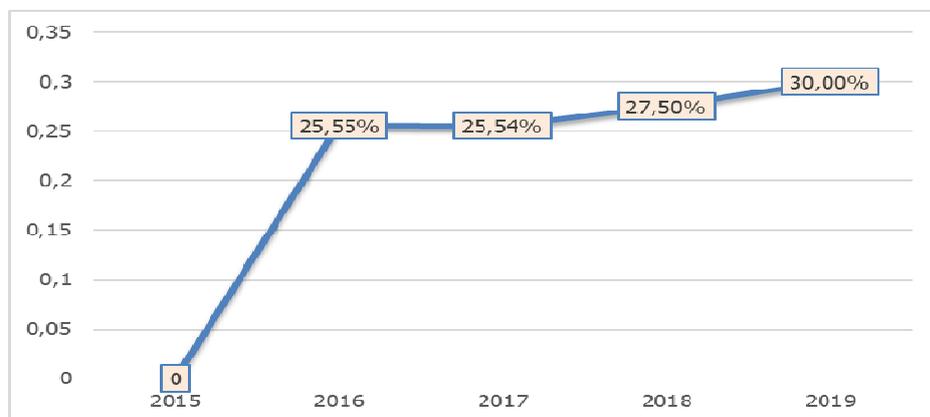
Perkembangan realisasi rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 dan 2019. Indikator kinerja rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional baru menjadi target PK Kepala Badan mulai tahun 2018.

Realisasi capaian kinerja rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional pada tahun 2018 sebesar 10,56% dan tahun 2019 sebesar 15,64%.

- b. Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional pada tahun 2015-2019.

Realisasi pencapaian kinerja Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional pada tahun 2019 yaitu **30%** dari target 30% .

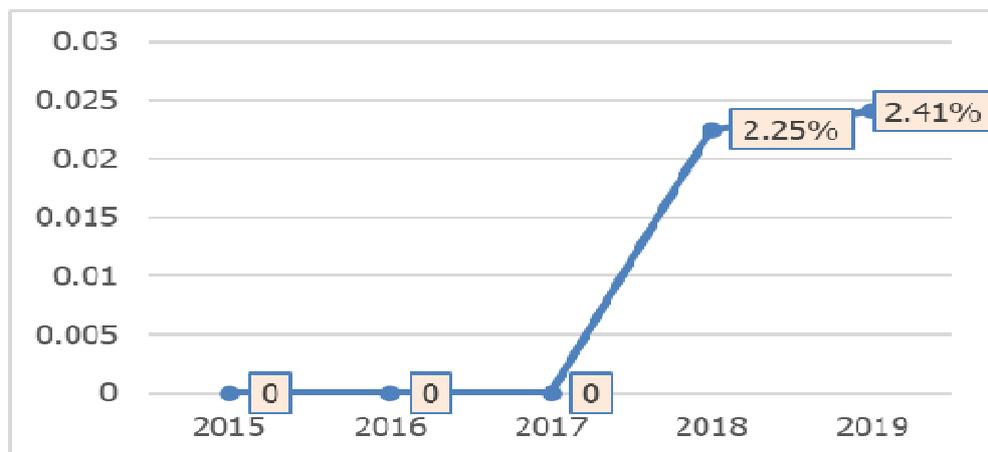
Realisasi rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2015-2019 pada gambar 5.



Gambar 5. Realisasi capaian rasio kelembagaan petani yang meningkat Kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional 2015-2019

Perkembangan realisasi rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional dari tahun 2015–2019 secara umum selalu meningkat. Realisasi capaian kinerja rasio pada tahun 2016 sebesar 25,55%, tahun 2017 sebesar 25,54%, tahun 2018 sebesar 27,50% dan tahun 2019 sebesar 30%.

- c. Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional pada tahun 2015-2019. Realisasi pencapaian kinerja rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019 adalah **2,41%** dari target 2,4%. Realisasi rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2015-2019 pada gambar 6.



Gambar 6. Realisasi capaian Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2015-2019

Perkembangan realisasi rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 dan 2019. Indikator kinerja rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional baru menjadi target PK Kepala Badan mulai tahun 2018.

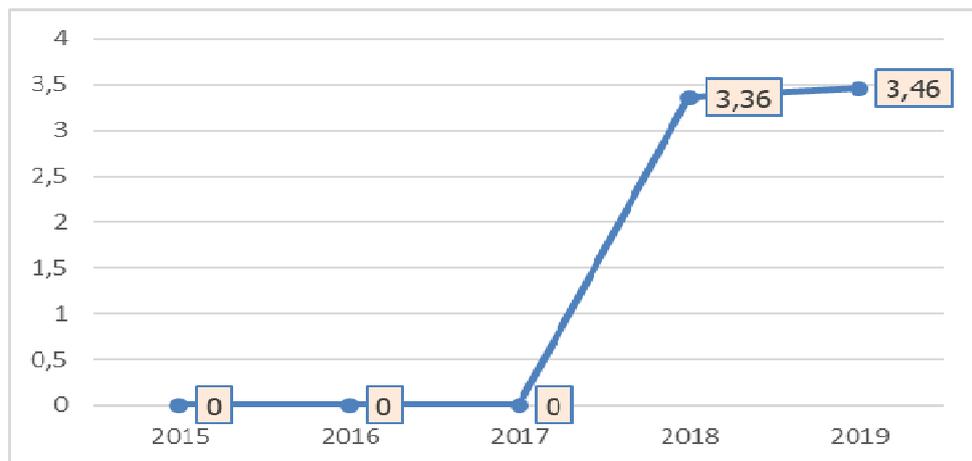
Realisasi capaian kinerja rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional pada tahun 2018 sebesar 2,25% dan tahun 2019 sebesar 2,41%.

- d. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert) pada tahun 2015-2019.

Realisasi pencapaian kinerja penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan publik BPPSDMP tahun 2019 adalah **3,46 Skala**

**Likert** dan telah melebihi dari target yaitu 3,34 Skala Likert. Penilaian tersebut dilakukan oleh para *stakeholders* yang berhubungan langsung dengan unit kerja layanan masyarakat di 19 Unit Pelayanan teknis lingkup BPPSDMP. Berdasarkan Rencana Strategis BPPSDMP, Indikator Kinerja Sasaran Program IKM atas layanan publik BPPSDMP diterapkan pada tahun 2018.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik BPPSDMP tahun 2015-2019 pada gambar 7.



Gambar 7. Realisasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik BPPSDMP tahun 2015-2019

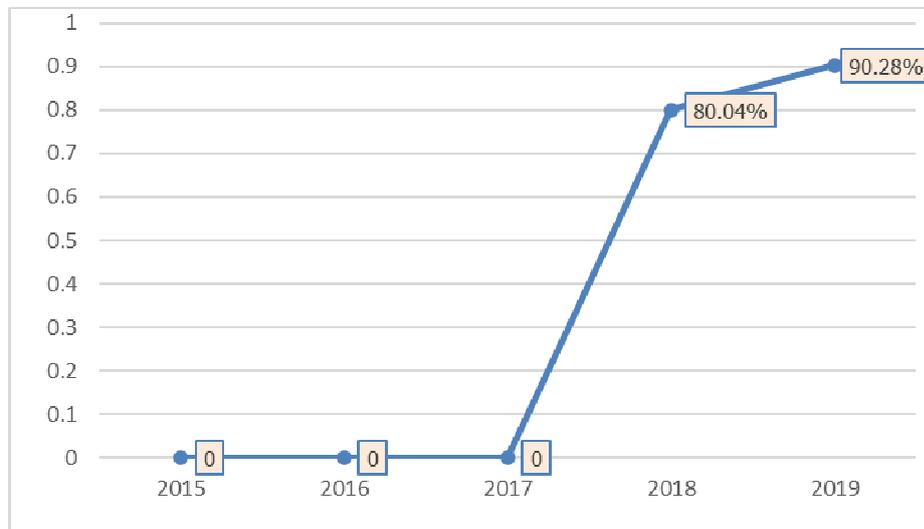
Perkembangan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik BPPSDMP menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 dan 2019. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik BPPSDMP baru menjadi target PK Kepala Badan mulai tahun 2018.

Realisasi capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik BPPSDMP pada tahun 2018 sebesar 3,36 Skala Likert dan tahun 2019 sebesar 3,46 Skala Likert.

e. Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tahun 2015-2019.

Realisasi pencapaian kinerja rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan ditahun 2019 adalah **90,28%** dari target 90%.

Realisasi rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tahun 2015-2019 pada gambar 8.



Gambar 8. Realisasi rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tahun 2015-2019

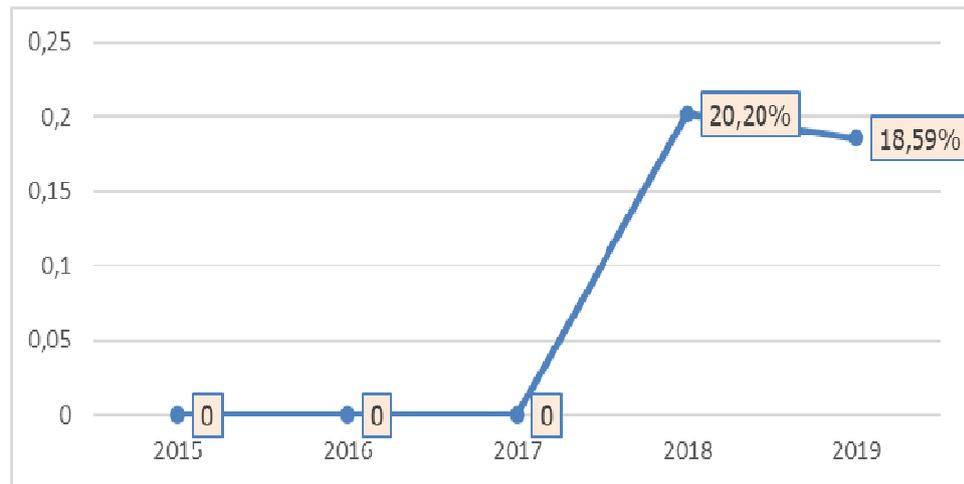
Perkembangan realisasi rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 dan 2019. Indikator kinerja rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan baru menjadi target PK Kepala Badan mulai tahun 2018.

Realisasi capaian kinerja rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan pada tahun 2018 sebesar 80,04% dan tahun 2019 sebesar 90,28%.

- f. Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan tahun 2015-2019.

Realisasi pencapaian kinerja penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan sudah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu **18,59%** dari target 20%.

Realisasi Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan tahun 2015-2019 pada gambar 9.



Gambar 9. Realisasi penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan tahun 2015-2019

Perkembangan realisasi penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 dan 2019. Indikator kinerja penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan baru menjadi target PK Kepala Badan mulai tahun 2018.

Realisasi capaian kinerja penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan pada tahun 2018 sebesar 20,20% dan tahun 2019 sebesar 18,59%.

- g. Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2015-2019.

Realisasi pencapaian kinerja Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2019 adalah nilai 87,19 dari target nilai 83.

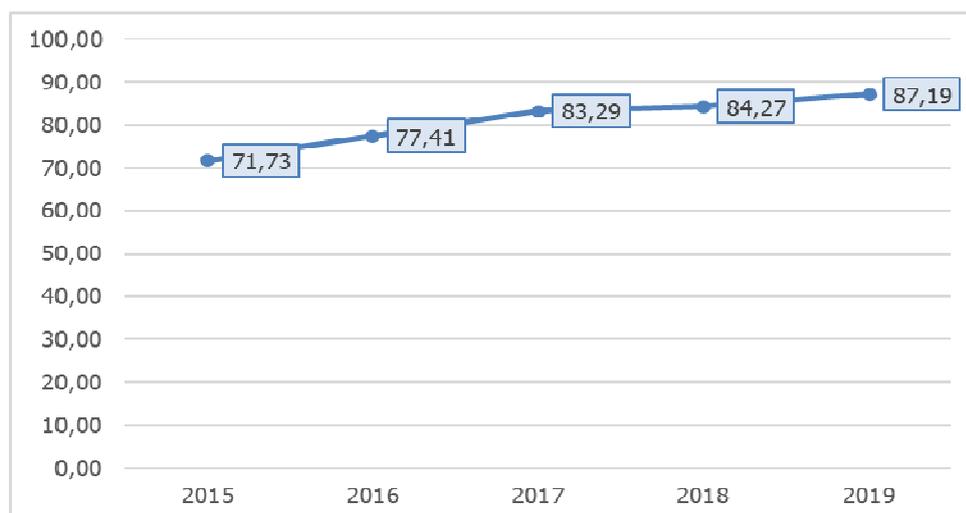
Hasil evaluasi Nilai AKIP Badan PPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementan dari tahun 2015 sd 2019 yaitu 71,73 (2015); 77,41 (2016); 83,29 (2017); 84,27 (2018); dan 87,19 (2019) pada tabel 11.

Tabel 12  
Hasil penilaian evaluasi SAKIP Badan PPSDMP oleh Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019

| No                          | Komponen Yg Dinilai                | Bobot      | Tahun        |              |              |              |              |
|-----------------------------|------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                             |                                    |            | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
| 1                           | Perencanaan Kinerja                | 30         | 22,14        | 24,61        | 27,06        | 27,06        | 27,97        |
| 2                           | Pengukuran Kinerja                 | 25         | 18,96        | 19,27        | 20,83        | 21,15        | 22,40        |
| 3                           | Pelaporan Kinerja                  | 15         | 10,33        | 10,33        | 12,28        | 12,28        | 13,62        |
| 4                           | Evaluasi Kinerja/Evaluasi Internal | 10         | 5,88         | 7,38         | 7,29         | 7,96         | 8,83         |
| 5                           | Capaian Kinerja                    | 20         | 14,42        | 15,83        | 15,83        | 15,83        | 14,38        |
| <b>Nilai Hasil Evaluasi</b> |                                    | <b>100</b> | <b>71,73</b> | <b>77,41</b> | <b>83,29</b> | <b>84,27</b> | <b>87,19</b> |

Sumber Data. Sekretariat Badan, tahun 2015-2019

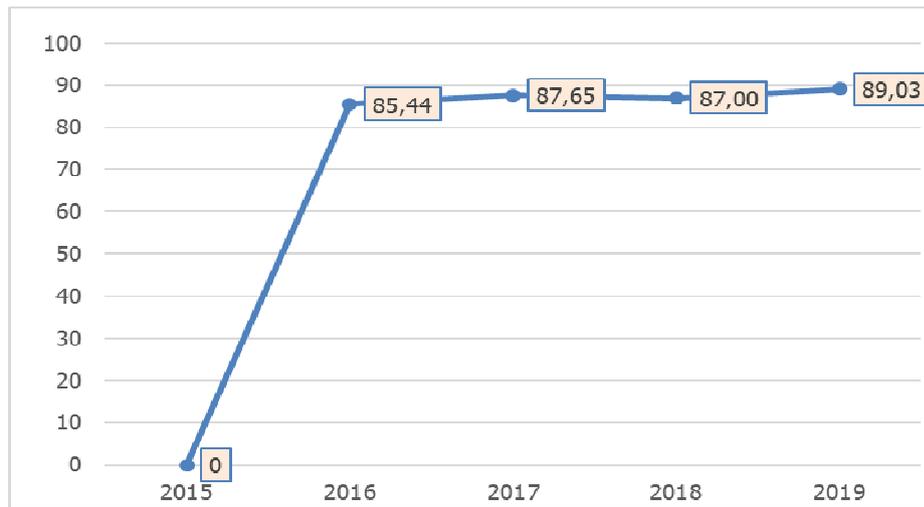
Realisasi Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 pada gambar 10.



Gambar 10. Realisasi Capaian Kinerja Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, tahun 2015-2019

- h. Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) tahun 2015-2019, tahun 2019.

Realisasi pencapaian kinerja Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) di tahun 2019 adalah nilai **89,03** dari target nilai 86,5. Realisasi Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017, selama tahun 2015-2019 pada gambar 11.



Gambar 11. Realisasi Capaian Kinerja Nilai Kinerja berdasarkan PMK 214 tahun 2017, tahun 2015-2019

Perkembangan realisasi capaian Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Indikator kinerja Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) baru menjadi target PK Kepala Badan mulai tahun 2018, tetapi data realisasi nilai kinerja dari tahun 2015 sd 2017 didapat dari hasil monitoring nilai kinerja unit eselon I yaitu Badan PPSDMP.

Realisasi capaian kinerja Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) pada tahun 2016 sebesar 85,44%, tahun 2017 sebesar 87,65%, tahun 2018 sebesar 87,00% dan tahun 2019 sebesar 89,03%.

### 3. Perbandingan capaian kinerja Badan PPSDMP pada tahun 2019 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2015 sd 2019)

- a. Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019.

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional **tahun 2019** adalah **15,64%**. Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional adalah **15%**. Realisasi capaian kinerja telah melebihi target Renstra Badan PPSDMP (2015-2019).

- b. Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019.

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional **tahun 2019 adalah 30%**. Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional adalah **30%**. Realisasi capaian kinerja telah memenuhi target Renstra Badan PPSDMP (2015-2019).

- c. Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019.

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional **tahun 2019 adalah 2,41%**. Target jangka menengah dalam renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional adalah **2,4%**. Realisasi capaian kinerja telah melebihi target Renstra Badan PPSDMP (2015-2019).

- d. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert), tahun 2019.

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert) penilaian para pengguna layanan di UPT lingkup BPPSDMP **tahun 2019 adalah 3,46%**. Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP, yaitu nilai **3,34** (Skala Likert). Realisasi capaian kinerja telah melebihi target Renstra Badan PPSDMP (2015-2019).

- e. Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan, tahun 2019.

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan **tahun 2019 adalah 90,28%**. Target jangka menengah

dalam renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indikator kinerja Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun 2019 adalah **90%**. Realisasi capaian kinerja telah melebihi target Renstra Badan PPSDMP (2015-2019).

- f. Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan.

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan **tahun 2019** adalah **18,59%**. Target jangka menengah dalam renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indikator kinerja Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan adalah **20%**. Realisasi capaian kinerja telah melebihi target Renstra Badan PPSDMP (2015-2019).

- g. Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2019.

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian **tahun 2019** adalah **87,19**. Target jangka menengah dalam renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk indikator kinerja nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah **nilai 83**. Realisasi capaian kinerja telah melebihi target Renstra Badan PPSDMP (2015-2019).

- h. Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) tahun 2019.

Realisasi capaian untuk indikator kinerja nilai kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) pada **tahun 2019** adalah nilai **89,03**. Target jangka menengah dalam renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk indikator kinerja nilai kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) adalah nilai **86,5**. Realisasi capaian kinerja telah melebihi target Renstra Badan PPSDMP (2015-2019).

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi**

- a. Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019.

Persentase realisasi capaian kinerja rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani

nasional tahun 2019 yaitu sebesar 104,27% (sangat berhasil). Keberhasilan melebihi target yang telah ditetapkan didukung oleh:

- 1) Kemampuan penyuluh pertanian sudah optimal dalam memahami dan menyampaikan materi teknologi pertanian yang merupakan bagian dari sistem pertanian terpadu kepada petani di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP);
- 2) Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan dalam melaksanakan program-program yang dialokasikan kepada kelembagaan petani yang memiliki perilaku dan sikap terbuka untuk menerapkan sistem pertanian terpadu;
- 3) Adanya dukungan program pembangunan pertanian berupa kegiatan penumbuhan dan pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya, Sekolah Lapangan, dan Adaptasi Spesifik Teknologi Lokalita.

b. Rasio Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional tahun 2019.

Persentase realisasi capaian kinerja rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019 yaitu sebesar 100% (berhasil). Keberhasilan memenuhi target yang telah ditetapkan didukung oleh :

- 1) Pemberian dukungan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS dan BOP bagi THL-TBPP dalam kegiatan Pengawasan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian di masing-masing Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP).
- 2) Pengawasan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian bagi Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TBPP terhadap kelembagaan petani dilaksanakan secara optimal baik melalui metode Sistem Kerja LAKUSUSI (Latihan Kunjungan dan Supervisi), Sekolah Lapangan, Adaptasi Spesifik Teknologi Lokalita, dukungan penyediaan materi-materi dan informasi penyuluhan pertanian yang disebarluaskan melalui berbagai media cetak (tabloid, brosur, leaflet, juknis/juklak, pedoman dll), media elektronik (tv, radio, aplikasi berbasis web (Cyber Extension, dll), media sosial (Whatsapp, Facebook, Instragram) Pemutaran Film, Video Grafis, Info Grafis, Video

Conference.

- 3) Peningkatan kapasitas bagi penyuluh PNS dan THLTBPP melalui pertemuan yang dilaksanakan secara rutin di WKBPP/Satminkal penyuluh pertanian, sosialisasi, bimtek dan lain lain.
  - 4) Pemberian dukungan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS dan BOP bagi THL-TBPP dalam kegiatan Pengawasan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian di masing-masing Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP);
  - 5) Pengawasan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian bagi Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TBPP terhadap kelembagaan petani dilaksanakan secara optimal baik melalui metode Sistem Kerja LAKUSUSI (Latihan Kunjungan dan Supervisi), Sekolah Lapangan, Adaptasi Spesifik Teknologi Lokalita, dukungan penyediaan materi-materi dan informasi penyuluhan pertanian yang disebarluaskan melalui berbagai media cetak (tabloid, brosur, leaflet, juknis/juklak, pedoman dll), media elektronik (TV, radio, aplikasi berbasis web (Cyber Extension dll), media sosial (Whatsapp Facebook, Instragram) Pemutaran Film, Video Grafis, Info Grafis, Video Conferen;
  - 6) Peningkatan kapasitas bagi penyuluh PNS dan THLTBPP melalui pertemuan yang dilaksanakan secara rutin di WKBPP/Satminkal penyuluh pertanian, sosialisasi, bimtek dan lain lain.
- c. Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019.
- Persentase realisasi capaian kinerja Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019 yaitu sebesar 100,54% (sangat berhasil). Keberhasilan memenuhi target yang telah ditetapkan didukung oleh :
- 1) Pengawasan dan pendampingan oleh Penyuluh Pertanian dalam peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi petani;
  - 2) Dukungan fasilitasi biaya operasional oleh Pemerintah Pusat dan Daerah digunakan untuk :

- a) Pembuatan akta badan hukum (Koperasi/PT)
  - b) Izin usaha
  - c) Pembelajaran penguatan kapasitas kelembagaan petani
  - d) Pembelajaran pengembangan agribisnis komoditi unggulan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani
- d. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert), tahun 2019.

Persentase realisasi capaian kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert) tahun 2019 yaitu sebesar 103,59 Skala Likert (sangat berhasil). Keberhasilan telah melebihi target yang telah ditetapkan, disebabkan oleh tingginya nilai kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat/peserta pelatihan terhadap UPT lingkup Badan PPSDMP pada semester I dan II tahun 2019. Hasil pengukuran IKM Badan PPSDMP tahun 2019 didapatkan nilai rata-rata 3,46 dengan nilai IKM 86,62 dengan kriteria mutu pelayanan nilai B (Baik). Hasil pengolahan data survei kepuasan masyarakat lingkup Badan PPSDMP tahun 2019 pada tabel 13.

Tabel 13  
Nilai rata-rata IKM Unsur Pelayanan di UPT lingkup Badan PPSDMP tahun 2019

| No | Unsur Pelayanan                           | Nilai rata-rata | Nilai IKM   |
|----|---|-----------------|-------------|
| 1  | Persyaratan                               | 86,06           | 3,44        |
| 2  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur            | 84,67           | 3,39        |
| 3  | Waktu Pelayanan                           | 84,54           | 3,38        |
| 4  | Biaya atau Tarif                          | 88,52           | 3,54        |
| 5  | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Publik | 89,25           | 3,57        |
| 6  | Kompetensi Pelaksana                      | 85,06           | 3,40        |
| 7  | Perilaku Pelaksana                        | 88,60           | 3,54        |
| 8  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan   | 85,04           | 3,40        |
| 9  | Prasarana dan Sarana                      | 87,06           | 3,48        |
|    | <b>Nilai</b>                              | <b>86,62</b>    | <b>3,46</b> |

Sumber Data.Sekretariat Badan, 2019

Nilai rata-rata tertinggi dari unsur pelayanan adalah pada Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Publik yaitu 89,25 dan terendah pada unsur Waktu Pelayanan yaitu 84,54. Nilai IKM tertinggi pada Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Publik yaitu 3,57 dan terendah unsur Waktu Pelayanan yaitu 3,38.

- e. Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tahun 2019.

Persentase realisasi capaian kinerja rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tahun 2019 yaitu sebesar 100,32% (sangat berhasil). Keberhasilan telah melebihi target yang telah ditetapkan, disebabkan adanya program PWMP dan Retooling bagi lulusan Pendidikan tinggi dan menengah.

- f. Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan tahun tahun 2019.

Persentase realisasi capaian kinerja Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan tahun tahun 2019 yaitu sebesar 107,61% (sangat berhasil). Keberhasilan telah melebihi target yang telah ditetapkan, didukung masing masing dari Bidang Program dan Kerjasama, Bidang Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan, Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, serta UPT Pelatihan Pertanian Lingkup BPPSDMP. Rincian dukungan keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Bidang Program dan Kerjasama, yaitu :

- a) Optimalisasi koordinasi dengan UPT Pelatihan Pertanian tingkat Pusat dan Daerah dalam menyusun dan menyiapkan bahan rencana kerja dan anggaran pelatihan pertanian serta penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama pelatihan pertanian;
- b) Koordinasi dalam proses perencanaan anggaran tahunan mulai dari rancangan pagu indikatif, pagu anggaran, pagu alokasi anggaran, sampai terbitnya DIPA;
- c) Koordinasi dan sinkronisasi dalam merancang dan mempertajam kegiatan di UPT Pelatihan Pertanian Tingkat Pusat dan Provinsi;
- d) Optimalisasi dalam memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran PSPP di UPT Pelatihan Pertanian Tingkat Pusat serta pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pelatihan pertanian;
- e) Koordinasi dan sinkronisasi serta peran aktif dalam kerjasama di forum Nasional, Internasional, ASEAN dan lain-lain khususnya

- mengenai peningkatan kompetensi SDM Pertanian melalui kegiatan magang, workshop, training dan lainnya;
- f) Koordinasi dalam meningkatkan peran sistem pengendalian internal di lingkup Pusat Pelatihan Pertanian dan UPT Pelatihan Pertanian tingkat Pusat;
  - g) Koordinasi dalam menyusun rencana evaluasi kinerja PSPP serta melakukan evaluasi rencana kerja anggaran di Puslatan dan UPT Pelatihan Pertanian Tingkat Pusat;
  - h) Optimalisasi kehumasan melalui pemberitaan dan publikasi serta peningkatan pengembangan IT mengenai kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian;
  - i) Sinkronisasi, Koordinasi dan Optimalisasi dalam merancang, melaksanakan dan memantau kegiatan READ-SI di tingkat Pusat dan lokasi Program READ-SI di 6 provinsi dan 18 Kabupaten;
  - j) Optimalisasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyusunan dokumen terkait data SDM Pertanian, penyiapan database kerjasama pelatihan pertanian;
  - k) Koordinasi dengan Bagian Perencanaan Anggaran BPPSDMP, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementan, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK, Direktorat Jenderal Anggaran, Bappenas, Kementerian Luar Negeri.
  - l) Optimalisasi dalam melaksanakan urusan kegiatan ketatausahaan, dan perlengkapan Puslatan.
  - m) Penumbuhan Wirausaha muda pertanian melalui program magang ke Jepang program Magang/PKL siswa SMK, Politeknik, Diploma dan Perguruan Tinggi, dan lain-lain di UPT Pelatihan;
  - n) Pengembangan dan Penyiapan Wirausaha Muda Pertanian melalui program Magang Jepang Pola baru dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan, bekerjasama dengan Yayasan Amal Masyarakat Pertanian Indonesia (YAMPI), Ikatan Alumni Magang

Jepang (IKAMAJA), Asosiasi petani Jepang (JAEC, IAEA Gunma dan NAEC);

- o) Mendapat kepercayaan dari organisasi negara-negara Islam (OKI) melalui COMCEC untuk melaksanakan 3 project dibidang zero waste peternakan (Integrated Farming System), Reducing Loosess on Livestock Production dan Agriculture Marketing Information System (AMIS) selama 3 tahun berturut-turut;
  - p) Kerjasama dengan ILO untuk penyiapan kurikulum dan bahan ajar pemberdayaan petani;
  - q) Membangun model kemitraan antara UPT Pelatihan dengan Petani Mitra/Binaan di Wilayah Bandung Barat (koorporasi petani) kerjasama dengan Technical Taiwan Mission (TTM);
  - r) Menyelenggarakan pelatihan, permagangan dan exchange farmers internasional di UPT Pelatihan dan P4S sebanyak 24 batch (kegiatan) bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, Sekretariat ASEAN, Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang, JICA, The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic cooperation (COMCEC) dan Asian Productivity Organization (APO);
2. Bidang Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan yaitu :
- a) Pengembangan Website Puslatan dengan mengintegrasikan 9 aplikasi mendukung pelatihan dan penilaian angka kredit berbasis IT (e dupak);
  - b) Membuka akses UPT pelatihan kepada masyarakat luas melalui kunjungan, permagangan, pelatihan singkat (Pelatihan Teknologi Tepat Guna/PTPTG) dari Perguruan tinggi, instansi pemerintah dan masyarakat umum lainnya;
  - c) Pengembangan pelatihan berbasis teknologi informasi (e\_training dan Blended Learning) untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pelatihan, meningkatkan keterjangkauan peserta pelatihan dan mendekatkan pelatihan kepada masyarakat;

- d) Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian sudah berjalan dengan baik dan Pengembangan Evaluasi penyelenggaraan pelatihan berbasis WEB (PPMKP Ciawi, BBPP Batangkaluku) yang diintegrasikan dengan aplikasi *Electronic* Sistem Informasi Pelatihan Pertanian (e\_SIPP) yang dikembangkan oleh Pusat Pelatihan Pertanian sebagai basis data pengembangan SDM Pertanian melalui pelatihan;
  - e) Penumbuhan, pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan Pelatihan Petani dan kelembagaan pelatihan pertanian;
  - f) Kerjasama FK Nasional P4S dengan Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Pertanian dalam pendampingan dan pembinaan P4S;
  - g) Melaksanakan kerjasama dengan TNI AD untuk melatih Babinsa dibidang pengawalan dan budidaya tanaman pangan (PAJALE);
  - h) Meningkatkan kompetensi SDM Pertanian (Petani, Penyuluh dan Widyaiswara) berkerjasama dengan PT MARS Symbioscience.
3. Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yaitu :
- a) Meningkatkan daya saing dan kompetensi SDM pertanian untuk memasuki dunia usaha dan dunia industry melalui sertifikasi SDM pertanian;
  - b) Penyusunan SKKNI sektor pertanian , Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Skema sertifikasi profesi bidang pertanian
  - c) Penyusunan SKKNI, Modul, Bahan Ajar dan TOT bekerjasama dengan Sustainability Coffee Partnership Indonesia (SCOPI) dan penyusunan SKKNI Kakao dengan Cacao Sustainability Partnership (CSP);
4. UPT Pelatihan Pertanian Lingkup BPPSDMP
- a) Peran aktif dalam pengembangan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan berbasis Online oleh UPT Pelatihan Pertanian yaitu PPMKP Ciawi, BBPP Ketindan, BBPP Batu);
  - b) Optimalisasi kegiatan peningkatan kompetensi SDM Pertanian baik aparatur, pelaku utama dan pelaku usaha mendukung program strategis Kementerian Pertanian melalui kegiatan pelatihan.

- c) Ketertiban dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan serta peran aktif dalam pengembangan Pola Pelatihan Keliling Bagi Penyuluh Pertanian di BPP (BPP Jambi) dan on Site Training Model (OTM) di BBPP Lembang;
- d) Pengembangan Jejaring kerjasama Pengembangan Sapi Belgian Blue di UPT Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan Balai Embrio Trasfer Cipelang Bogor;
- e) Kerjasama BBPKH Cinagara dengan Ditjen PKH dan FAO dibidang ilmu kedokteran Hewan kesehatan global (One Health Approach);
- f) Ketertiban dalam mengembangkan jenis diklat manajemen dan kepemimpinan bagi aparatur dan non aparatur berbasis kebutuhan masyarakat melalui AKD dan IKD;
- g) Optimalisasi dalam memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi diklat untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan diklat;
- h) Koordinasi penyusunan target outcome penyelenggaraan diklat yang ditetapkan dalam Tujuan Instruksional Khusus Diklat diikuti dengan pemantauan, pelaksanaan, dan evaluasi capaian target;
- i) Koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kurikulum, modul, dan bahan ajar yang up to date dan tepat waktu;
- j) Menetapkan sasaran peserta diklat dalam upaya mendukung peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai bagi aparatur dan non aparatur;
- k) Menyelenggarakan diklat berbasis pelayanan prima dan peningkatan kompetensi peserta;
- l) Menerapkan IT dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat yang responsif dan berkesinambungan;
- n) Melaksanakan evaluasi pasca diklat dan bimbingan lanjutan untuk menjamin pencapaian target outcome dan menjaga kualitas penyelenggaraan diklat;

- o) Memanfaatkan database peserta diklat untuk pendaftaran online, penerimaan peserta, administrasi diklat, evaluasi pasca diklat, bimbingan lanjutan, dan untuk keperluan evaluasi lainnya;
  - p) Meningkatkan kualitas diklat khususnya diklat yang sudah terakreditasi melalui kegiatan check and review secara rutin;
  - q) Membuat usulan akreditasi untuk diklat-diklat unggulan yang lainnya;
  - r) Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan diklat yang bersifat pengembangan karakter dan motivasi untuk berprestasi ;
  - s) Meningkatkan kompetensi dan daya saing aparatur kediklatan
  - t) Menetapkan spesialisasi dan pengembangan kapasitas widyaiswara sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya di bidang teknis manajemen dan kepemimpinan pertanian serta teknis non RIHP dan multimedia;
  - u) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terlatih melalui kegiatan pelatihan, 'In House Training', magang, workshop, dll;
- g. Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Capaian kinerja Nilai AKIP Badan PPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2019 yaitu 105,05% (sangat berhasil). Keberhasilan melebihi target yang telah ditetapkan pada PK Sekretariat Badan tahun 2019 didukung oleh meningkatnya nilai evaluasi SAKIP tahun 2019 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian evaluasi SAKIP dilakukan oleh tim Inspektorat Jenderal. Komponen yang dinilai pada evaluasi SAKIP meliputi komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja/evaluasi internal dan capaian kinerja.

- h. Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) tahun 2019

Persentase realisasi capaian kinerja Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) tahun 2019 yaitu sebesar 102,92% (sangat berhasil). Keberhasilan telah melebihi target yang telah ditetapkan, didukung

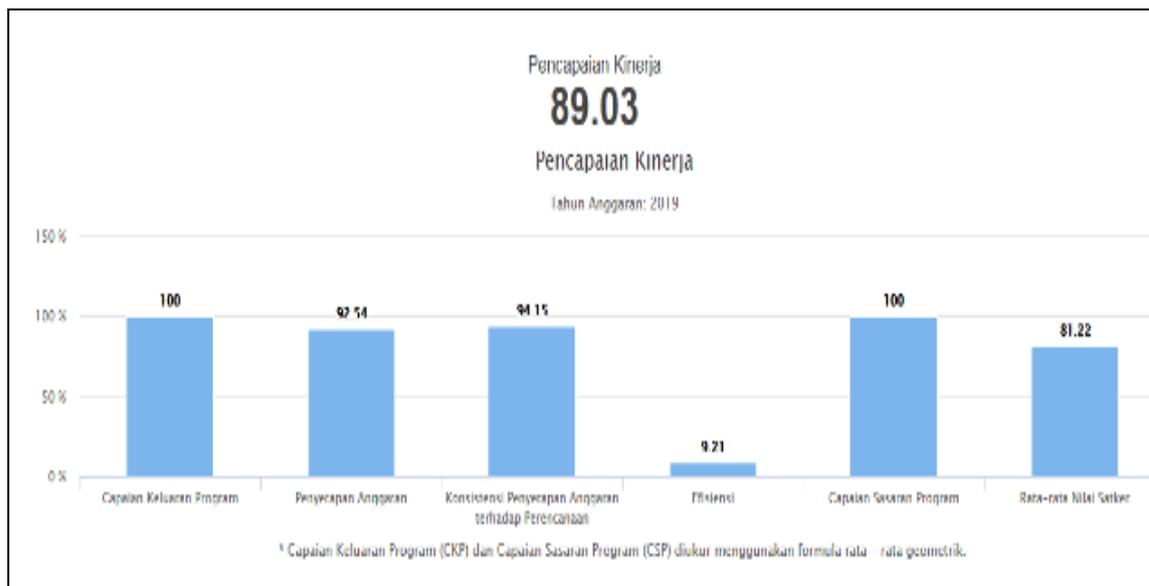
Realisasi Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) tahun 2019 telah melebihi target. Keberhasilan Nilai Kinerja Badan PPSDMP tahun 2019 didukung sebagai berikut :

- 1) Efisiensi perhitungan dan program-program Sekretariat Badan tahun 2018 telah tercapai dan memenuhi target
- 2) Para petugas admin aplikasi SMART di Pusat dan Satker lingkup Badan PPSDMP telah tertib dalam mengisi dan mengupdate data.
- 3) Adanya pengawalan dan pembinaan petugas admin aplikasi SMART.

## 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Berdasarkan aplikasi SMART PMK 214 yang telah diimplementasikan di seluruh satker lingkup BPPSDMP pada tahun 2019, Pencapaian pelaksanaan anggaran Kinerja lingkup BPPSDMP Tahun 2019 adalah **Nilai 89,03** dan termasuk dalam kategori Baik dan Efisien.

Capaian kinerja pelaksanaan anggaran Badan PPSDMP tahun 2019 berdasarkan aplikasi SMART Nomor 214/PMK.02/2017 pada gambar 13.



Gambar 13. Capaian kinerja pelaksanaan anggaran Badan PPSDMP tahun 2019 Berdasarkan aplikasi SMART Nomor 214/PMK.02/2017

### Keterangan :

**Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 39 sebagai berikut:**

- a. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% dikategorikan dengan Sangat Baik;
- b. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% - 90% dikategorikan dengan Baik;
- c. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% - 80% dikategorikan dengan Cukup;
- d. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% - 60% dikategorikan dengan Kurang;
- e. Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% dikategorikan dengan Sangat Kurang.

Berdasarkan gambar, pencapaian nilai kinerja Badan PPSDMP pada tahun 2019 termasuk kedalam kategori **BAIK (NK Anggaran lebih dari 80%-90%)**. Persentase capaian kinerja anggaran Badan PPSDMP tahun 2019 adalah **Nilai 89,03** dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase capaian keluaran program adalah 100%;
2. Persentase penyerapan anggaran adalah 92,54%;
3. Persentase konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan adalah 94,15%;
4. Persentase efisiensi adalah 9,21%;
5. Persentase capaian sasaran program adalah 100%;
6. Persentase rata-rata nilai satker adalah 81,22%;

Analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan PMK 214/2017 dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus penghitungan sebagaimana berikut :

**Rumus :**

$$\mathbf{NE = 50\% + (E/20 \times 50)}$$

Keterangan :     NE     = Nilai Efisiensi  
                          E     = Efisiensi

\* Catatan :

Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh *range* nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%.

Persentase capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2019 dalam hal efisiensi adalah mencapai 9,21% maka penghitungan koefisien nilai efisiensinya adalah:

$$\begin{aligned} \mathbf{NE} &= \mathbf{50\% + (9,21/20 \times 50)} \\ &= 0,5 + (0,0921/20 \times 50) \\ &= 0,5 + 0,25075 \\ &= \mathbf{0,73025 \text{ atau } 73,025\%} \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, koefisien nilai efisiensi sumberdaya anggaran Badan PPSDMP pada tahun 2019 adalah **73,025%**.

### C. Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2019

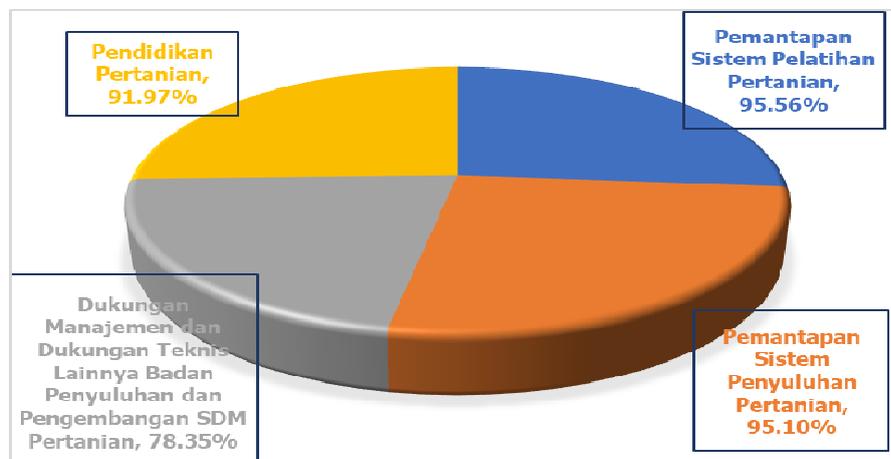
Realisasi anggaran Badan PPSDMP tahun 2019 adalah Rp1.483.336.384.991,00 dari pagu sebesar Rp1.602.896.004.000,00. Persentase realisasi anggaran pagu Tahun 2019 adalah **92,54%**. Realisasi anggaran Badan PPSDMP tahun 2019 bila dirinci yaitu Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian sebesar Rp248.452.200.239,00, Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian sebesar Rp185.853.327.019,00, Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan PPSDMP adalah Rp38.443.729.842,00 dan Pendidikan Pertanian sebesar Rp184.641.024.408,00. Pagu dan realisasi anggaran Badan PPSDMP tahun 2019 pada tabel 14.

Tabel 14  
Pagu dan Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2019

| No | Kegiatan   | Anggaran (Rp)            |                          |              |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
|    |  | Pagu                     | Realisasi                | %            |
| 1  | Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian  | 259.997.665.000          | 248.452.200.239          | 95,56        |
| 2  | Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian   | 527.747.127.000          | 501.869.475.902          | 95,10        |
| 3  | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian | 122.710.816.000          | 96.144.366.294           | 78,35        |
| 4  | Pendidikan Pertanian   | 692.440.396.000          | 636.870.342.556          | 91,97        |
|    | <b>TOTAL</b>   | <b>1.602.896.004.000</b> | <b>1.483.336.384.991</b> | <b>92,54</b> |

Sumber data. Sekretariat Badan, tahun 2019

Persentase realisasi anggaran per kegiatan lingkup Badan PPSDMP tahun 2019 pada gambar 14.



Gambar 14. Persentase realisasi anggaran per kegiatan lingkup Badan PPSDMP tahun 2019

Realisasi anggaran per output kegiatan tahun 2019 yang *tertinggi* adalah Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian yaitu 95,56%, sedangkan *terendah* adalah pada Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yaitu 78,35%.

Rincian realisasi anggaran per output program kegiatan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

### 1. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2019.

Realisasi anggaran per output kegiatan pemantapan sistem pelatihan Pertanian tahun 2019 adalah Rp248.452.200.239,00 (**95,56%**) dari Pagu Rp259.997.665.000,00. Pagu dan realisasi anggaran per output kegiatan pemantapan sistem pelatihan pertanian tahun 2019 pada tabel 15.

Tabel 15  
Pagu dan Realisasi Anggaran Per Output Kegiatan Pemantapan  
Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2019

| No | OUTPUT  | PAGU                   | REALISASI              | %             |
|----|---|------------------------|------------------------|---------------|
| 1  | Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian                                 | 71.486.343.000         | 70.182.270.914         | 98,18%        |
| 2  | Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian  | 7.145.580.000          | 6.904.982.367          | 96,63%        |
| 3  | Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani                                   | 4.754.850.000          | 4.719.148.220          | 99,25%        |
| 4  | Peningkatan Kompetensi Tenaga Kediklatan Pertanian                                | 3.709.000.000          | 3.433.223.100          | 92,56%        |
| 5  | Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani | 20.905.492.000         | 13.685.481.065         | 65,46%        |
| 6  | Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan  | 35.891.611.000         | 35.175.949.192         | 98,01%        |
| 7  | Layanan Sarana dan Prasarana Internal   | 25.870.166.000         | 25.308.009.426         | 97,83%        |
| 8  | Layanan Perkantoran   | 90.234.623.000         | 89.043.135.955         | 98,68%        |
|    | <b>Total</b>  | <b>259.997.665.000</b> | <b>248.452.200.239</b> | <b>95,56%</b> |

Sumber data. Sekretariat Badan, tahun 2019

Realisasi anggaran per output kegiatan pemantapan sistem pelatihan pertanian tahun 2019 yang *tertinggi* adalah Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani yaitu 99,25%, sedangkan *terendah* adalah pada Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani yaitu **65,46%**.

## 2. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2019

Realisasi anggaran per output kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian tahun 2019 adalah Rp501.869.475.902,00 (**95,10%**) dari pagu Rp527.747.127.000,00. Pagu dan realisasi anggaran per output kegiatan pemantapan sistem pelatihan pertanian tahun 2019 pada tabel 16.

Tabel 16  
Pagu dan Realisasi Anggaran Per Output Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2019

| No | OUTPUT  | PAGU                   | REALISASI              | %             |
|----|---|------------------------|------------------------|---------------|
| 1  | Peningkatan Kinerja Penyuluh  | 440.527.033.000        | 420.616.552.780        | 95,48%        |
| 2  | Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian  | 8.370.000.000          | 8.075.950.000          | 96,49%        |
| 3  | Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani  | 2.500.000.000          | 2.478.345.000          | 99,13%        |
| 4  | Penyuluhan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi  | 7.750.000.000          | 7.241.324.500          | 93,44%        |
| 5  | Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di Balai Penyuluhan Pertanian  | 3.400.000.000          | 3.343.445.310          | 98,34%        |
| 6  | Fasilitas Teknis Dukungan Penyuluhan Pertanian  | 33.131.578.000         | 30.974.352.152         | 93,49%        |
| 7  | Gerakan Pemberdayaan Petani Mendukung UPSUS   | 23.250.000.000         | 23.031.728.780         | 99,06%        |
| 8  | Program Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani | 8.818.516.000          | 6.107.777.380          | 69,26%        |
|    | <b>Total</b>  | <b>527.747.127.000</b> | <b>501.869.475.902</b> | <b>95,10%</b> |

Sumber data: Sekretariat Badan, tahun 2019

Realisasi anggaran per output kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian tahun 2019 yang *tertinggi* adalah Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani yaitu 99,13%, sedangkan *terendah* adalah Program Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani yaitu 69,26%.

## 3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya BPPSDMP Tahun 2019.

Realisasi anggaran per output Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya BPPSDMP Tahun 2019 adalah Rp96.144.366.294,00 (**78,35%**) dari

pagu Rp122.710.816.000,00. Rincian pagu dan realisasi anggaran per output kegiatan pemantapan sistem pelatihan pertanian tahun 2019 pada tabel 17.

Tabel 17  
Pagu dan Realisasi Anggaran Per Output Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP Tahun 2019

| No | OUTPUT  | PAGU                   | REALISASI             | %             |
|----|---|------------------------|-----------------------|---------------|
| 1  | Program Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani | 41.769.450.000         | 17.520.914.353        | 41,95%        |
| 2  | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I   | 49.697.791.000         | 48.187.265.865        | 96,96%        |
| 3  | Layanan Sarana dan Prasarana Internal   | 3.257.512.000          | 3.117.343.716         | 95,70%        |
| 4  | Layanan Perkantoran   | 27.986.063.000         | 27.318.842.360        | 97,62%        |
|    | <b>Total</b>  | <b>122.710.816.000</b> | <b>96.144.366.294</b> | <b>78,35%</b> |

Sumber data. Sekretariat Badan, tahun 2019

Realisasi anggaran per output Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya BPPSDMP tahun 2019 yang *tertinggi* adalah pada Layanan Perkantoran yaitu 97,62%, sedangkan *terendah* adalah pada Program Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani yaitu 41,95%.

#### 4. Program Pendidikan Pertanian Tahun 2019

Realisasi anggaran per output Program Pendidikan Pertanian Tahun 2019 adalah Rp636.870.342.556,00 (**91,97%**) dari pagu Rp692.440.396.000,00. Pagu dan realisasi anggaran per output kegiatan pemantapan sistem pelatihan pertanian tahun 2019 pada tabel 18.

Tabel 18  
Pagu dan Realisasi Anggaran Per Output Program Pendidikan Pertanian Tahun 2019

| No | OUTPUT  | PAGU            | REALISASI       | %      |
|----|---|-----------------|-----------------|--------|
| 1  | Mahasiswa yang Mengikuti Pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian | 130.119.750.000 | 114.716.644.799 | 88,16% |
| 2  | Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 melalui Tugas Belajar            | 20.958.750.000  | 17.062.411.670  | 81,41% |
| 3  | Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Pendidikan Vokasi Pertanian        | 8.637.891.000   | 7.426.325.951   | 85,97% |

| No | OUTPUT  | PAGU                   | REALISASI              | %            |
|----|---|------------------------|------------------------|--------------|
| 4  | Mahasiswa/ Alumni dari Perguruan Tinggi yang Melakukan Pendampingan Dalam Kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Pertanian | 92.706.095.000         | 84.389.706.648         | 91,03%       |
| 5  | Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Dalam Rangka Regenerasi Petani   | 34.607.145.000         | 30.698.991.745         | 88,71%       |
| 6  | Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP  | 30.355.252.000         | 27.268.990.267         | 89,83%       |
| 7  | Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi melalui Pengabdian Masyarakat di Wilayah Perbatasan dan Kawasan Pertanian         | 1.345.500.000          | 1.005.803.542          | 74,75%       |
| 8  | Penajaman Kompetensi SDMP   | 6.192.235.000          | 3.778.568.907          | 61,02%       |
| 9  | Kelembagaan Politeknik Pembangunan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan   | 1.245.520.000          | 1.108.722.499          | 89,02%       |
| 10 | Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian   | 216.899.335.000        | 212.363.907.830        | 97,91%       |
| 11 | Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan   | 39.490.680.000         | 32.244.820.556         | 81,65%       |
| 12 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di sektor Pertanian (YESS)  | 3.419.867.000          | 2.748.879.592          | 80,38%       |
| 13 | Layanan Sarana dan Prasarana Internal   | 904.640.000            | 746.987.550            | 82,57%       |
| 14 | Layanan Perkantoran   | 105.557.736.000        | 101.309.581.000        | 95,98%       |
|    | <b>Total</b>  | <b>692.440.396.000</b> | <b>636.870.342.556</b> | <b>91,97</b> |

Sumber data. Sekretariat Badan PPSDMP, tahun 2019

Realisasi anggaran per output Program Pendidikan Pertanian tahun 2019 yang *tertinggi* adalah Layanan Perkantoran yaitu 95,98%, sedangkan *terendah* adalah pada Penajaman Kompetensi SDM Pertanian yaitu 61,02%.

## BAB IV

### PENUTUP

Pengukuran capaian kinerja Badan PPSDMP Tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2019. Sasaran program Badan PPSDMP yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2019 adalah :

Persentase capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan PPSDMP Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 1. Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional yaitu **104,27%**; 2. Rasio kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional yaitu **100%**; 3). Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional yaitu **100,54%**; 4). Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP yaitu **103,59%**; 5). Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan yaitu **100,32%**; 6). Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan yaitu **107,61%**; 7). Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2019 yaitu **105,05%**; 8). Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) yaitu **102,92%**.

Realisasi anggaran Badan PPSDMP tahun 2019 adalah Rp1.483.336.384.991,00 dari pagu sebesar Rp1.602.896.004.000,00. Persentase realisasi anggaran pagu tahun 2019 adalah **92,54%**. Realisasi anggaran Badan PPSDMP tahun 2019 bila dirinci per program/ kegiatan : a). Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian yaitu Rp248.452.200.239,00 (95,56%) dari target pagu Rp259.997.665.000,00; b). Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yaitu Rp501.869.475.902,00 (95,10%) dari target pagu Rp527.747.127.000,00; c). Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan PPSDMP yaitu Rp96.114.366.294,00 (78,35%) dari target pagu Rp122.710.816.000,00 dan Pendidikan Pertanian yaitu Rp636.870.342.556,00 (91,97%) dari target pagu Rp692.440.396.000,00.

## Kesimpulan

1. Kemampuan penyuluh pertanian sudah optimal dalam memahami dan menyampaikan materi teknologi pertanian yang merupakan bagian dari sistem pertanian terpadu kepada petani di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP). Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan oleh Penyuluh Pertanian Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan untuk melaksanakan program-program yang dialokasikan kepada kelembagaan petani yang memiliki perilaku dan sikap terbuka dan merupakan keluaran dari sistem pertanian terpadu. Adanya dukungan program pemerintah berupa Sekolah Lapangan, Adaptasi Spesifik Teknologi Lokalita dan Demplot Penyuluh Swadaya. Kondisi potensi Sumber Daya Alam yang mendukung untuk penyelenggaraan sistem pertanian terpadu.
2. Pelaksanaan SL di beberapa WKPP dibina/ didampingi oleh Penyuluh Pertanian yang sama karena jumlah penyuluh tidak sebanding dengan jumlah desa
3. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup BPPSDMP Tahun 2018 diperoleh dari pengukuran indeks kepuasan masyarakat lingkup BPPSDMP pada semester I yang dilaksanakan di 19 (sembilan belas) unit pelaksana teknis dengan responden dipilih secara acak dan penginputan menggunakan dua versi yaitu manual dan melalui aplikasi [ikm.pertanian.go.id](http://ikm.pertanian.go.id) yang terdiri dari : peserta pelatihan, peserta magang, mahasiswa, siswa, alumni dan orang tua siswa memperoleh nilai rata-rata 3,41 dengan nilai IKM 85,37 dengan kriteria mutu layanan BAIK, sedangkan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup BPPSDMP pada semester II dilaksanakan di 20 (dua puluh) unit pelaksana teknis dengan responden dipilih secara acak dan penginputan melalui aplikasi [ikm.pertanian.go.id](http://ikm.pertanian.go.id) yang terdiri dari: peserta pelatihan, peserta magang, mahasiswa, siswa, alumni dan orang tua siswa memperoleh nilai rata-rata 3,51 dengan nilai IKM 87,88 dengan kriteria mutu layanan BAIK. Pengukuran IKM BPPSDMP Tahun 2019 didapat nilai rata-rata 3,46 dengan nilai IKM 86,62 dengan kriteria mutu layanan BAIK. Unsur Pelayanan yang mendapatkan penilaian terbaik yaitu Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Publik dengan nilai rata-rata 3,57. Unsur pelayanan yang mendapatkan penilaian terendah pada Waktu Pelayanan dengan nilai rata-rata 3,38. UPT yang memperoleh nilai IKM

tertinggi periode 2019 yaitu PPMKP Ciawi dengan nilai rata-rata 3,89 dan nilai IKM 97,35 mutu layanan SANGAT BAIK. UPT yang memperoleh nilai IKM terendah periode 2019 yaitu Polbangtan Manokwari dengan nilai rata-rata 3,16 dan nilai IKM 78,98 mutu layanan BAIK.

4. Program PWMP dan Retooling bagi lulusan Pendidikan tinggi dan menengah merupakan factor yang menunjang keberhasilan rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tahun 2019.
5. Faktor yang menyebabkan tingginya capaian kinerja Pusat Pelatihan Pertanian tahun 2019 antara lain : (a) Ketertiban dalam mengembangkan jenis diklat manajemen dan kepemimpinan bagi aparatur dan non aparatur berbasis kebutuhan masyarakat melalui AKD dan IKD; (b) Peran aktif dalam pengembangan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan berbasis Online oleh UPT Pelatihan Pertanian yaitu PPMKP Ciawi, BBPP Ketindan, BBPP Batu; (c) Optimalisasi kegiatan peningkatan kompetensi SDM Pertanian baik aparatur, pelaku utama dan pelaku usaha mendukung program strategis Kementerian Pertanian melalui kegiatan pelatihan; (d) Ketertiban dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan serta peran aktif dalam pengembangan Pola Pelatihan Keliling Bagi Penyuluh Pertanian di BPP Jambi dan on Site Training Model (OTM) di BBPP Lembang; (e) Pengembangan Jejaring kerjasama Pengembangan Sapi Belgian Blue di UPT Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan Balai Embrio Trasfer Cipelang Bogor; (f) Optimalisasi dalam memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi diklat untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan diklat; (g) Koordinasi penyusunan target outcome penyelenggaraan diklat yang ditetapkan dalam Tujuan Instruksional Khusus Diklat diikuti dengan pemantauan, pelaksanaan, dan evaluasi capaian target; (h) Koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kurikulum, modul, dan bahan ajar yang up to date dan tepat waktu; (i) Menyelenggarakan diklat berbasis pelayanan prima dan peningkatan kompetensi peserta; (j) Menerapkan IT dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat yang responsif dan berkesinambungan dan melaksanakan evaluasi pasca diklat dan bimbingan

lanjutan untuk menjamin pencapaian target outcome dan menjaga kualitas penyelenggaraan diklat; (k) Memanfaatkan database peserta diklat untuk pendaftaran online, penerimaan peserta, administrasi diklat, evaluasi pasca diklat, bimbingan lanjutan, dan untuk keperluan evaluasi lainnya; (l) Meningkatkan kualitas diklat khususnya diklat yang sudah terakreditasi melalui kegiatan check and review secara rutin serta meningkatkan penyelenggaraan kegiatan diklat yang bersifat pengembangan karakter dan motivasi untuk berprestasi; (j) Meningkatnya kompetensi dan daya saing aparatur kediklatan, (k) Menetapkan spesialisasi dan pengembangan kapasitas widyaiswara sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya di bidang teknis manajemen dan kepemimpinan pertanian serta teknis non RIHP dan multimedia; (l) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terlatih melalui kegiatan pelatihan, In House Training, magang, workshop, dll;

6. Meningkatnya nilai AKIP Badan PPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ditahun 2019, disebabkan penilaian evaluasi SAKIP yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

### **Rencana Tindak Lanjut :**

1. Penguatan peran, tugas dan fungsi BPP sebagai pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis, dan pusat pengembangan jejaring kemitraan yang dapat mensinergikan berbagai program dan kegiatan pembangunan pertanian.
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, Pendidikan, penyuluhan dan mendorong motivasi SDM untuk mengembangkan kapasitasnya atas dasar inisiatif dan prakarsa sendiri.
3. Dukungan sarana dan prasarana bagi optimalisasi kinerja kelembagaan penyuluhan, ketenagaan dan kelembagaan petani
4. Pusat pelatihan pertanian akan melaksanakan beberapa langkah kedepan antara lain : Melakukan perbaikan dalam proses perencanaan, anggaran, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan, cermat memilih lokasi kegiatan pelaksanaan, cermat dalam menyusun merencanakan kegiatan yang melibatkan ketiga serta merancang kegiatan pengadaan; Meningkatkan

koordinasi dalam penjadwalan kegiatan antara bidang lingkup Pusat Pelatihan Pertanian; Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dengan UPT Pelatihan Pertanian lingkup BPPSDMP; Melakukan pelaksanaan pengendalian internal lingkup Pusat Pelatihan Pertanian secara periodik atau per triwulan, mulai dari perancangan dan perencanaan kegiatan, supervise dan monitoring kegiatan dan pelaporan; UPT Pelatihan Pertanian hendaknya mengawal pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Latihan/Diklat (IKD/IKL) agar sesuai dengan jenis pelatihan yang dilaksanakan dan mengawal dan mengevaluasi hasil penerapan hasil berlatih purnawidya dalam bentuk pengawalan pendampingan dan bimbingan lanjutan.

5. Pusat Pendidikan Pertanian akan melakukan koordinasi yang baik antara pemangku kebijakan, pelaksana kegiatan dan SDM yang kompeten serta dukungan dana yang cukup bagi terlaksananya kegiatan serta menyusun time schedule pelaksanaan seluruh kegiatan.
6. Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian akan memperbaiki dan lebih meningkatkan IKM dengan melakukan upaya sebagai berikut :
  - a. Mempersingkat alur prosedur pelayanan dalam SOP agar lebih singkat dan efektif;
  - b. Mereviu uraian tugas dan pekerjaan agar lebih produktif dan efisien dalam bekerja, serta meminimalisir kesimpangsiuran tugas;
  - c. Meningkatkan sarana dan prasarana pada masing-masing unit kerja.
  - d. Menyediakan sistem pengaduan yang mudah diakses oleh responden
  - e. Menyediakan kotak saran atau keluhan ditempat yang mudah dijangkau
  - f. Menginventarisir pengaduan dan tindak lanjut terhadap penanganan pengaduan;
  - g. Menerapkan SOP layanan secara konsisten;
  - h. Menerapkan target waktu penyelesaian layanan;
  - i. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui diklat, magang, dan studi banding;
  - j. Evaluasi Standar Pelayanan Publik;
  - k. Mempermudah alur pelayanan;

- l. Menempatkan petugas pelayanan sesuai dengan tugas dan kompetensinya;
- m. Pembinaan kepada petugas pelayanan dalam meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya; dan
- n. Memberikan *reward and punishment* kepada petugas pelayanan.

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN PERTANIAN  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM  
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233  
SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 (REVISI DESEMBER)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dedi Nursyamsi  
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrul Yasin Limpo  
Jabatan : Menteri Pertanian

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Desember 2019

Pihak Kedua,

  
Syahrul Yasin Limpo

Pihak Pertama,

  
Dedi Nursyamsi



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 (REVISI DESEMBER)**

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN**

| NO | SASARAN PROGRAM   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET            |
|----|---|---|-------------------|
| 1. | Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan  | 1 Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional                        | 15 %              |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Petani Nasional   | 2 Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional                                     | 30,0 %            |
|    |   | 3 Rasio kelembagaan petani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional                   | 2,4 %             |
| 3. | Meningkatnya kualitas layanan publik BPPSDMP  | 4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPPSDMP  | 3,34 Skala Likert |
| 4. | Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan Pertanian  | 5 Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan | 90 %              |
|    |   | 6 Penurunan rata-rata Competency Gap Index (CGI) peserta pelatihan  | 20 %              |
| 5. | Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian | 7 Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian   | 83 Nilai          |
|    |   | 8 Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017)   | 86,50 Nilai       |

| Kegiatan  | Anggaran                     |
|---|------------------------------|
| <b>I. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian</b>                                  | <b>Rp. 910.455.608.000</b>   |
| 1. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian  | Rp. 259.997.665.000          |
| 2. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian   | Rp. 527.747.127.000          |
| 3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian | Rp. 122.710.816.000          |
| <b>II. Program Pendidikan Pertanian</b>   | <b>Rp. 692.440.396.000</b>   |
| Pendidikan Pertanian  | Rp. 692.378.596.000          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>Rp. 1.602.896.004.000</b> |

Jakarta, 12 Desember 2019

Kepala Badan,

Dedi Nursyamsi



**PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN LINGKUP BPPSDMP  
PERIODE SD 31 DESEMBER 2019 (MINGGU IV)**

**I REALISASI KEGIATAN UTAMA**

| NO | KEGIATAN  | ANGGARAN (RP)            |                          |               |                        |              |
|----|---|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|--------------|
|    |   | PAGU                     | REALISASI                | %             | SISA                   | %            |
| 1  | Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian   | 259,997,665,000          | 248,452,200,239          | 95.56%        | 11,545,464,761         | 4.44%        |
| 2  | Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian  | 527,747,127,000          | 501,869,475,902          | 95.10%        | 25,877,651,098         | 4.90%        |
| 3  | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya<br>Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian | 122,710,816,000          | 96,144,366,294           | 78.35%        | 26,566,449,706         | 21.65%       |
| 4  | Pendidikan Pertanian  | 692,440,396,000          | 636,870,342,556          | 91.97%        | 55,570,053,444         | 8.03%        |
|    | <b>TOTAL</b>  | <b>1,602,896,004,000</b> | <b>1,483,336,384,991</b> | <b>92.54%</b> | <b>119,559,619,009</b> | <b>7.46%</b> |

**II REALISASI BELANJA**

| NO | JENIS BELANJA   | ANGGARAN (RP)            |                          |               |                        |              |
|----|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|--------------|
|    |                 | PAGU                     | REALISASI                | %             | SISA                   | %            |
| 1  | BELANJA PEGAWAI | 147,581,637,000          | 144,107,761,497          | 97.65%        | 3,473,875,503          | 2.35%        |
| 2  | BELANJA BARANG  | 1,211,215,008,000        | 1,099,961,106,418        | 90.81%        | 111,253,901,582        | 9.19%        |
| 3  | BELANJA MODAL   | 244,099,359,000          | 239,267,517,076          | 98.02%        | 4,831,841,924          | 1.98%        |
|    | <b>TOTAL</b>    | <b>1,602,896,004,000</b> | <b>1,483,336,384,991</b> | <b>92.54%</b> | <b>119,559,619,009</b> | <b>7.46%</b> |

**III REALISASI KEWENANGAN**

| NO | JENIS KEWENANGAN | ANGGARAN (RP)            |                          |               |                        |              |
|----|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|--------------|
|    |                  | PAGU                     | REALISASI                | %             | SISA                   | %            |
| 1  | KANTOR PUSAT     | 342,426,086,000          | 282,703,757,576          | 82.56%        | 59,722,328,424         | 17.44%       |
| 2  | KANTOR DAERAH    | 782,137,885,000          | 743,016,231,045          | 95.00%        | 39,121,653,955         | 5.00%        |
| 3  | DEKONSENTRASI    | 478,332,033,000          | 457,616,396,370          | 95.67%        | 20,715,636,630         | 4.33%        |
|    | <b>TOTAL</b>     | <b>1,602,896,004,000</b> | <b>1,483,336,384,991</b> | <b>92.54%</b> | <b>119,559,619,009</b> | <b>7.46%</b> |

**IV REALISASI KEGIATAN PER KEWENANGAN**

| NO | KEGIATAN / KEWENANGAN   | ANGGARAN (RP)            |                          |               |                        |               |
|----|---|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|---------------|
|    |   | PAGU                     | REALISASI                | %             | SISA                   | %             |
| 1  | <b>PEMANTAPAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN</b>                     | <b>527,747,127,000</b>   | <b>501,869,475,902</b>   | <b>95.10%</b> | <b>25,877,651,098</b>  | <b>4.90%</b>  |
| a  | Pusat Penyuluhan Pertanian / Kantor Pusat (KP)                    | 50,320,094,000           | 45,158,079,532           | 89.74%        | 5,162,014,468          | 10.26%        |
| b  | Dekonsentrasi (DK)  | 477,427,033,000          | 456,711,396,370          | 95.66%        | 20,715,636,630         | 4.34%         |
| 2  | <b>PEMANTAPAN SISTEM PELATIHAN PERTANIAN</b>                      | <b>259,997,665,000</b>   | <b>248,452,200,239</b>   | <b>95.56%</b> | <b>11,545,464,761</b>  | <b>4.44%</b>  |
| a  | Pusat Pelatihan Pertanian / Kantor Pusat (KP)                     | 41,163,643,000           | 33,098,075,224           | 80.41%        | 8,065,567,776          | 19.59%        |
| b  | UPT Pelatihan / Kantor Daerah (KD)                                | 218,834,022,000          | 215,354,125,015          | 98.41%        | 3,479,896,985          | 1.59%         |
| 3  | <b>DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS<br/>LAINNYA BPPSDMP</b> | <b>122,710,816,000</b>   | <b>96,144,366,294</b>    | <b>78.35%</b> | <b>26,566,449,706</b>  | <b>21.65%</b> |
| a  | Sekretariat Badan PPSDMP / Kantor Pusat (KP)                      | 122,710,816,000          | 96,144,366,294           | 78.35%        | 26,566,449,706         | 21.65%        |
| 4  | <b>PENDIDIKAN PERTANIAN</b>                                       | <b>692,440,396,000</b>   | <b>636,870,342,556</b>   | <b>91.97%</b> | <b>55,570,053,444</b>  | <b>8.03%</b>  |
| a  | Pusat Pendidikan Pertanian / Kantor Pusat (KP)                    | 128,231,533,000          | 108,303,236,526          | 84.46%        | 19,928,296,474         | 15.54%        |
| b  | UPT Pendidikan / Kantor Daerah (KD)                               | 563,303,863,000          | 527,662,106,030          | 93.67%        | 35,641,756,970         | 6.33%         |
| c  | Dekonsentrasi (DK)  | 905,000,000              | 905,000,000              | 100.00%       | -                      | 0.00%         |
|    | <b>TOTAL</b>  | <b>1,602,896,004,000</b> | <b>1,483,336,384,991</b> | <b>92.54%</b> | <b>119,559,619,009</b> | <b>7.46%</b>  |

**V REALISASI SATKER KANTOR DAERAH/UPT PELATIHAN PERTANIAN**

| NO | SATUAN KERJA   | ANGGARAN (RP)          |                        |               |                      |              |
|----|--|------------------------|------------------------|---------------|----------------------|--------------|
|    |  | PAGU                   | REALISASI              | %             | SISA                 | %            |
| 1  | BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG                                  | 12,905,970,000         | 12,646,963,636         | 97.99%        | 259,006,364          | 2.01%        |
| 2  | PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN (PPMKP) CIAWI | 43,610,306,000         | 43,535,287,575         | 99.83%        | 75,018,425           | 0.17%        |
| 3  | BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG, KALSEL                    | 16,361,165,000         | 15,275,070,969         | 93.36%        | 1,086,094,031        | 6.64%        |
| 4  | BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN MALANG - JATIM            | 24,056,124,000         | 23,811,303,407         | 98.98%        | 244,820,593          | 1.02%        |
| 5  | BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANG KALUKU, SULAWESI SELATAN    | 20,801,901,000         | 20,650,248,423         | 99.27%        | 151,652,577          | 0.73%        |
| 6  | BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU, MALANG JAWA TIMUR           | 22,091,645,000         | 21,708,541,520         | 98.27%        | 383,103,480          | 1.73%        |
| 7  | BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG - JABAR                    | 27,038,597,000         | 26,690,943,405         | 98.71%        | 347,653,595          | 1.29%        |
| 8  | BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI                                    | 16,678,726,000         | 16,493,620,952         | 98.89%        | 185,105,048          | 1.11%        |
| 9  | BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA-BOGOR JABAR         | 20,809,602,000         | 20,205,168,943         | 97.10%        | 604,433,057          | 2.90%        |
| 10 | BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT                       | 14,479,986,000         | 14,336,976,185         | 99.01%        | 143,009,815          | 0.99%        |
|    | <b>TOTAL</b>   | <b>218,834,022,000</b> | <b>215,354,125,015</b> | <b>98.41%</b> | <b>3,479,896,985</b> | <b>1.59%</b> |

**VI REALISASI SATKER KANTOR DAERAH/UPT PENDIDIKAN PERTANIAN**

| NO | SATUAN KERJA  | ANGGARAN (RP)          |                        |               |                      |              |
|----|---|------------------------|------------------------|---------------|----------------------|--------------|
|    |   | PAGU                   | REALISASI              | %             | SISA                 | %            |
| 1  | POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) BOGOR                                   | 168,195,525,000        | 162,308,218,670        | 96.50%        | 5,887,306,330        | 3.50%        |
| 2  | POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) YOGYAKARTA - MAGELANG KAMPUS MAGELANG   | 44,124,397,000         | 34,605,810,839         | 78.43%        | 9,518,586,161        | 21.57%       |
| 3  | POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) YOGYAKARTA - MAGELANG KAMPUS YOGYAKARTA | 39,691,235,000         | 35,875,258,532         | 90.39%        | 3,815,976,468        | 9.61%        |
| 4  | POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG                                  | 76,510,912,000         | 72,472,863,669         | 94.72%        | 4,038,048,331        | 5.28%        |
| 5  | POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MEDAN                                   | 49,135,434,000         | 42,493,890,156         | 86.48%        | 6,641,543,844        | 13.52%       |
| 6  | POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) GOWA                                    | 82,428,069,000         | 82,004,419,606         | 99.49%        | 423,649,394          | 0.51%        |
| 7  | POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MANOKWARI                               | 29,508,537,000         | 29,023,967,385         | 98.36%        | 484,569,615          | 1.64%        |
| 8  | SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI SEMBAWA/PALEMBANG                                | 32,147,442,000         | 30,078,701,885         | 93.56%        | 2,068,740,115        | 6.44%        |
| 9  | SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI BANJARBARU, KALSEL                               | 22,652,813,000         | 21,843,721,136         | 96.43%        | 809,091,864          | 3.57%        |
| 10 | SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KUPANG, NTT                                      | 18,909,499,000         | 16,955,254,152         | 89.67%        | 1,954,244,848        | 10.33%       |
|    | <b>TOTAL</b>  | <b>563,303,863,000</b> | <b>527,662,106,030</b> | <b>93.67%</b> | <b>4,832,076,827</b> | <b>0.86%</b> |

**VII REALISASI SATKER KANTOR PUSAT**

| NO | ESELON II                  | ANGGARAN (RP)          |                        |               |                       |               |
|----|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|    |                            | PAGU                   | REALISASI              | %             | SISA                  | %             |
| 1  | PUSAT PELATIHAN PERTANIAN  | 41,163,643,000         | 33,098,075,224         | 80.41%        | 8,065,567,776         | 19.59%        |
| 2  | PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN | 50,320,094,000         | 45,158,079,532         | 89.74%        | 5,162,014,468         | 10.26%        |
| 3  | SEKRETARIAT BADAN PPSDMP   | 122,710,816,000        | 96,144,366,294         | 78.35%        | 26,566,449,706        | 21.65%        |
| 4  | PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN | 128,231,533,000        | 108,303,236,526        | 84.46%        | 19,928,296,474        | 15.54%        |
|    | <b>TOTAL</b>               | <b>342,426,086,000</b> | <b>282,703,757,576</b> | <b>82.56%</b> | <b>59,722,328,424</b> | <b>17.44%</b> |

**VIII REALISASI SATKER DEKONSENTRASI**

| NO | KEGIATAN  | ANGGARAN (RP)          |                        |               |                       |              |
|----|---|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
|    |   | PAGU                   | REALISASI              | %             | SISA                  | %            |
| 1  | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN, DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA              | 897,320,000            | 865,214,310            | 96.42%        | 32,105,690            | 3.58%        |
| 2  | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT                         | 37,828,582,000         | 36,880,867,688         | 97.49%        | 947,714,312           | 2.51%        |
| 3  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY  | 6,116,828,000          | 5,898,109,989          | 96.42%        | 218,718,011           | 3.58%        |
| 4  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR                          | 55,878,722,000         | 53,270,364,700         | 95.33%        | 2,608,357,300         | 4.67%        |
| 5  | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI RIAU                   | 8,072,634,000          | 7,491,025,032          | 92.80%        | 581,608,968           | 7.20%        |
| 6  | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH     | 8,327,226,000          | 8,091,419,440          | 97.17%        | 235,806,560           | 2.83%        |
| 7  | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR          | 6,037,740,000          | 5,757,205,599          | 95.35%        | 280,534,401           | 4.65%        |
| 8  | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BALI                   | 7,169,820,000          | 6,643,213,155          | 92.66%        | 526,606,845           | 7.34%        |
| 9  | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT                       | 13,451,404,000         | 12,518,800,075         | 93.07%        | 932,603,925           | 6.93%        |
| 10 | DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA   | 5,218,198,000          | 5,144,738,000          | 98.59%        | 73,460,000            | 1.41%        |
| 11 | DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG                                | 2,944,022,000          | 2,901,038,100          | 98.54%        | 42,983,900            | 1.46%        |
| 12 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT            | 4,401,818,000          | 4,369,376,000          | 99.26%        | 32,442,000            | 0.74%        |
| 13 | DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT   | 4,070,028,000          | 3,963,900,700          | 97.39%        | 106,127,300           | 2.61%        |
| 14 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT         | 14,657,088,000         | 13,821,679,265         | 94.30%        | 835,408,735           | 5.70%        |
| 15 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU               | 9,047,560,000          | 8,520,151,900          | 94.17%        | 527,408,100           | 5.83%        |
| 16 | DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO  | 4,040,154,000          | 3,962,165,100          | 98.07%        | 77,988,900            | 1.93%        |
| 17 | DINAS PERTANIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR                                      | 25,394,692,000         | 23,863,168,118         | 93.97%        | 1,531,523,882         | 6.03%        |
| 18 | DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU   | 6,796,234,000          | 6,673,314,400          | 98.19%        | 122,919,600           | 1.81%        |
| 19 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA                    | 1,809,473,000          | 1,769,223,934          | 97.78%        | 40,249,066            | 2.22%        |
| 20 | DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA                    | 11,168,076,000         | 10,770,743,428         | 96.44%        | 397,332,572           | 3.56%        |
| 21 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI ACEH                                      | 31,505,456,000         | 30,890,045,700         | 98.05%        | 615,410,300           | 1.95%        |
| 22 | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA                     | 34,076,260,000         | 33,082,704,100         | 97.08%        | 993,555,900           | 2.92%        |
| 23 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI                  | 8,693,002,000          | 8,177,803,392          | 94.07%        | 515,198,608           | 5.93%        |
| 24 | DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN        | 15,045,790,000         | 14,287,304,082         | 94.96%        | 758,485,918           | 5.04%        |
| 25 | DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN   | 7,788,352,000          | 7,693,752,000          | 98.79%        | 94,600,000            | 1.21%        |
| 26 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH                               | 57,489,796,000         | 54,114,548,800         | 94.13%        | 3,375,247,200         | 5.87%        |
| 27 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT         | 10,094,110,000         | 9,659,880,900          | 95.70%        | 434,229,100           | 4.30%        |
| 28 | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN                 | 12,076,204,000         | 11,568,289,580         | 95.79%        | 507,914,420           | 4.21%        |
| 29 | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA                              | 8,088,362,000          | 7,808,587,740          | 96.54%        | 279,774,260           | 3.46%        |
| 30 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU     | 716,084,000            | 676,872,970            | 94.52%        | 39,211,030            | 5.48%        |
| 31 | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG                            | 18,012,892,000         | 17,352,821,396         | 96.34%        | 660,070,604           | 3.66%        |
| 32 | DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN | 25,892,650,000         | 24,727,884,500         | 95.50%        | 1,164,765,500         | 4.50%        |
| 33 | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH                    | 8,716,908,000          | 8,065,499,700          | 92.53%        | 651,408,300           | 7.47%        |
| 34 | DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA                            | 6,808,548,000          | 6,334,682,577          | 93.04%        | 473,865,423           | 6.96%        |
|    | <b>TOTAL</b>  | <b>478,332,033,000</b> | <b>457,616,396,370</b> | <b>95.67%</b> | <b>20,715,636,630</b> | <b>4.33%</b> |

**PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
BERDASARKAN JENIS KELAMIN  
PER 31 DESEMBER 2019**

| No.                          | Unit Kerja   | Jenis Kelamin |            | Jumlah       |
|------------------------------|--|---------------|------------|--------------|
|                              |  | Laki-Laki     | Perempuan  |              |
| 1                            | Badan PPSDMP                                       | 1             | -          | 1            |
| 2                            | Sekretariat Badan                                  | 71            | 59         | 130          |
| 3                            | Pusat Penyuluhan Pertanian                         | 32            | 32         | 64           |
| 4                            | Pusat Pendidikan Pertanian                         | 18            | 20         | 38           |
| 5                            | Pusat Pelatihan Pertanian                          | 19            | 22         | 41           |
| 6                            | Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepimpinan Pertanian | 105           | 49         | 154          |
| 7                            | Politeknik Pembangunan Pertanian Medan             | 37            | 43         | 80           |
| 8                            | Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor             | 95            | 49         | 144          |
| 9                            | Politeknik Pembangunan Pertanian YOMA              | 120           | 77         | 197          |
| 10                           | Politeknik Pembangunan Pertanian Malang            | 100           | 44         | 144          |
| 11                           | Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa              | 64            | 35         | 99           |
| 12                           | Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari         | 42            | 26         | 68           |
| 13                           | Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang            | 62            | 43         | 105          |
| 14                           | Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara     | 45            | 22         | 67           |
| 15                           | Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu              | 57            | 28         | 85           |
| 16                           | Balai Besar Pertanian Ketindan                     | 46            | 33         | 79           |
| 17                           | Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku       | 52            | 26         | 78           |
| 18                           | Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang            | 39            | 18         | 57           |
| 19                           | Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang            | 38            | 23         | 61           |
| 20                           | Balai Pelatihan Pertanian Jambi                    | 50            | 28         | 78           |
| 21                           | Balai Pelatihan Pertanian Lampung                  | 38            | 23         | 61           |
| 22                           | SMK-Pertanian Pembangunan Negri Sembawa            | 50            | 29         | 79           |
| 23                           | SMK-Pertanian Pembangunan Negri Banjar Baru        | 36            | 20         | 56           |
| 24                           | SMK-Pertanian Pembangunan Negri Kupang             | 37            | 13         | 50           |
| 25                           | Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia          | 10            | 4          | 14           |
| <b>TOTAL PEGAWAI BPPSDMP</b> |  | <b>1,264</b>  | <b>766</b> | <b>2,030</b> |

Sumber Data. Bagian Umum Sekretariat Badan PPSDMP, 2019

**PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG  
PER 31 DESEMBER 2019**

| No.          | Unit Kerja                                     | Golongan |   |    |    |    |       |    |     |     |     |     |       |     |     |       |     |    |       |    |    | Jumlah |       |  |       |  |
|--------------|--|----------|---|----|----|----|-------|----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|----|-------|----|----|--------|-------|--|-------|--|
|              |  | I        |   |    |    |    | Total | II |     |     |     |     | Total | III |     |       |     |    | Total | VI |    |        |       |  | Total |  |
|              |  | a        | b | c  | d  | a  |       | b  | c   | d   | a   | b   |       | c   | d   | a     | b   | c  |       | d  | e  |        |       |  |       |  |
| 1            | Badan PPSDMP                                   | -        | - | -  | -  | -  | -     | -  | -   | -   | -   | -   | -     | -   | -   | -     | -   | -  | -     | -  | 1  | 1      | 1     |  |       |  |
| 2            | Sekretariat Badan                              | -        | - | -  | -  | -  | 4     | 2  | 7   | 7   | 20  | 13  | 30    | 27  | 25  | 95    | 10  | 4  | -     | 1  | -  | 15     | 130   |  |       |  |
| 3            | Pusat Penyuluhan Pertanian                     | -        | - | -  | -  | -  | -     | -  | 3   | 1   | 4   | 1   | 6     | 9   | 16  | 32    | 14  | 4  | 5     | -  | 5  | 28     | 64    |  |       |  |
| 4            | Pusat Pendidikan Pertanian                     | -        | - | -  | -  | -  | -     | -  | -   | 1   | 1   | 4   | 5     | 11  | 10  | 30    | 5   | 2  | -     | -  | -  | 7      | 38    |  |       |  |
| 5            | Pusat Pelatihan Pertanian                      | -        | - | -  | -  | -  | -     | -  | 1   | 1   | 2   | 1   | 8     | 9   | 13  | 31    | 6   | 1  | 1     | -  | -  | 8      | 41    |  |       |  |
| 6            | PPMKP  | -        | - | 1  | 10 | 11 | 13    | 13 | 12  | 20  | 58  | 17  | 27    | 6   | 11  | 61    | 6   | 5  | 4     | 7  | 2  | 24     | 154   |  |       |  |
| 7            | Politeknik Pembangunan                         | -        | - | -  | -  | -  | 1     | 1  | 5   | 2   | 9   | 17  | 17    | 17  | 14  | 65    | 5   | -  | 1     | -  | -  | 6      | 80    |  |       |  |
| 8            | Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor         | -        | - | 7  | 2  | 9  | 9     | 4  | 7   | 7   | 27  | 11  | 23    | 26  | 18  | 78    | 8   | 6  | 9     | 7  | -  | 30     | 144   |  |       |  |
| 9            | Politeknik Pembangunan Pertanian YOMA          | -        | - | 2  | -  | 2  | 5     | 3  | 19  | 7   | 34  | 22  | 26    | 45  | 42  | 135   | 14  | 8  | 2     | 2  | -  | 26     | 197   |  |       |  |
| 10           | Politeknik Pembangunan Pertanian Malang        | -        | - | 3  | 1  | 4  | 6     | 7  | 5   | 13  | 31  | 20  | 19    | 27  | 28  | 94    | 6   | 4  | 4     | 1  | -  | 15     | 144   |  |       |  |
| 11           | Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa          | -        | - | -  | -  | -  | -     | -  | 3   | 4   | 7   | 11  | 26    | 13  | 24  | 74    | 5   | 9  | 3     | 1  | -  | 18     | 99    |  |       |  |
| 12           | Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari     | -        | - | 2  | -  | 2  | 3     | -  | 1   | 2   | 6   | 7   | 19    | 8   | 16  | 50    | 8   | 2  | -     | -  | -  | 10     | 68    |  |       |  |
| 13           | Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang        | -        | - | -  | -  | -  | 2     | -  | 11  | 6   | 19  | 10  | 25    | 16  | 17  | 68    | 6   | 6  | 2     | 4  | -  | 18     | 105   |  |       |  |
| 14           | Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara | -        | - | -  | 5  | 5  | 1     | 1  | 4   | 3   | 9   | 6   | 12    | 10  | 11  | 39    | 7   | 3  | 2     | -  | 2  | 14     | 67    |  |       |  |
| 15           | Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu          | -        | - | -  | 2  | 2  | 4     | 1  | 9   | 5   | 19  | 8   | 16    | 15  | 7   | 46    | 12  | 4  | 1     | 1  | -  | 18     | 85    |  |       |  |
| 16           | Balai Besar Pertanian Ketindan                 | -        | - | -  | 1  | 1  | 1     | 1  | 4   | 3   | 9   | 9   | 18    | 11  | 13  | 51    | 6   | 5  | 5     | 1  | 1  | 18     | 79    |  |       |  |
| 17           | Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku   | -        | - | -  | 2  | 2  | 1     | 3  | 7   | 2   | 13  | 15  | 10    | 14  | 10  | 49    | 8   | 3  | 3     | -  | -  | 14     | 78    |  |       |  |
| 18           | Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang        | -        | - | -  | 2  | 2  | 4     | -  | 2   | 7   | 13  | 4   | 16    | 7   | 6   | 33    | 5   | 1  | 2     | -  | 1  | 9      | 57    |  |       |  |
| 19           | Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang        | -        | - | -  | -  | -  | 2     | -  | 7   | 2   | 11  | 9   | 18    | 8   | 8   | 43    | 5   | 1  | -     | -  | 1  | 7      | 61    |  |       |  |
| 20           | Balai Pelatihan Pertanian Jambi                | -        | - | 2  | -  | 2  | 1     | 3  | 7   | 4   | 15  | 13  | 17    | 13  | 5   | 48    | 5   | 6  | 2     | -  | -  | 13     | 78    |  |       |  |
| 21           | Balai Pelatihan Pertanian Lampung              | -        | - | -  | 1  | 1  | 1     | 4  | 2   | 2   | 9   | 3   | 21    | 11  | 5   | 40    | 5   | 3  | 1     | 2  | -  | 11     | 61    |  |       |  |
| 22           | SMK-Pertanian Pembangunan Negri Sembawa        | -        | - | -  | -  | -  | 3     | -  | 1   | 12  | 16  | 10  | 26    | 15  | 6   | 57    | 3   | 3  | -     | -  | -  | 6      | 79    |  |       |  |
| 23           | SMK-Pertanian Pembangunan Negri Banjar Baru    | -        | - | -  | -  | -  | -     | 2  | 2   | 3   | 7   | 10  | 19    | 8   | 5   | 42    | 5   | 2  | -     | -  | -  | 7      | 56    |  |       |  |
| 24           | SMK-Pertanian Pembangunan Negrui Kupang        | -        | - | -  | -  | -  | 1     | 3  | 3   | 3   | 10  | 8   | 12    | 10  | 7   | 37    | 3   | -  | -     | -  | -  | 3      | 50    |  |       |  |
| 25           | Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia      | -        | - | -  | -  | -  | -     | -  | -   | 2   | 2   | -   | -     | 5   | 6   | 11    | -   | 1  | -     | -  | -  | 1      | 14    |  |       |  |
| <b>Total</b> |  | -        | - | 17 | 26 | 43 | 62    | 48 | 122 | 119 | 351 | 229 | 416   | 341 | 323 | 1,309 | 157 | 83 | 47    | 27 | 13 | 327    | 2,030 |  |       |  |

Sumber Data. Bagian Umum Sekretariat Badan PPSDMP, 2019

**PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
BERDASARKAN PENDIDIKAN  
PER 31 DESEMBER 2019**

| No           | Unit Kerja   | Tingkat pendidikan |     |     |     |    |    |    |    |      |      |    | Jumlah |
|--------------|--|--------------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|------|------|----|--------|
|              |  | S3                 | S2  | S1  | D4  | SM | D3 | D2 | D1 | SLTA | SLTP | SD |        |
| 1            | Badan PPSDMP                                       | 1                  | -   | -   | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -    | -  | 1      |
| 2            | Sekretariat Badan                                  | 3                  | 34  | 39  | 2   | -  | 10 | -  | -  | 33   | 5    | 4  | 130    |
| 3            | Pusat Penyuluhan Pertanian                         | 5                  | 24  | 28  | -   | -  | -  | -  | -  | 7    | -    | -  | 64     |
| 4            | Pusat Pendidikan Pertanian                         | 5                  | 8   | 18  | 2   | -  | 1  | -  | -  | 4    | -    | -  | 38     |
| 5            | Pusat Pelatihan Pertanian                          | 1                  | 16  | 15  | -   | -  | 2  | -  | -  | 7    | -    | -  | 41     |
| 6            | Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepimpinan Pertanian | 6                  | 36  | 21  | -   | -  | 2  | 1  | -  | 52   | 21   | 15 | 154    |
| 7            | Politeknik Pembangunan                             | 3                  | 38  | 14  | 4   | -  | 3  | -  | -  | 17   | -    | 1  | 80     |
| 8            | Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor             | 16                 | 51  | 12  | 16  | -  | 4  | -  | -  | 26   | 10   | 9  | 144    |
| 9            | Politeknik Pembangunan Pertanian YOMA              | 12                 | 60  | 41  | 29  | 1  | 7  | 1  | -  | 37   | 5    | 4  | 197    |
| 10           | Politeknik Pembangunan Pertanian Malang            | 11                 | 48  | 18  | 19  | -  | 8  | -  | -  | 35   | 4    | 1  | 144    |
| 11           | Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa              | 5                  | 50  | 15  | 22  | -  | 2  | -  | -  | 5    | -    | -  | 99     |
| 12           | Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari         | 2                  | 32  | 15  | 11  | -  | 2  | -  | -  | 2    | 1    | 3  | 68     |
| 13           | Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang            | -                  | 40  | 35  | 2   | -  | 5  | -  | -  | 19   | 2    | 2  | 105    |
| 14           | Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara     | -                  | 25  | 16  | 3   | -  | 4  | -  | -  | 12   | 2    | 5  | 67     |
| 15           | Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu              | -                  | 30  | 17  | 10  | -  | 2  | -  | -  | 20   | 2    | 4  | 85     |
| 16           | Balai Besar Pertanian Ketindan                     | 3                  | 26  | 25  | 7   | -  | 5  | -  | -  | 11   | 1    | 1  | 79     |
| 17           | Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku       | 1                  | 22  | 30  | 2   | -  | 1  | -  | -  | 17   | 4    | 1  | 78     |
| 18           | Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang            | 1                  | 18  | 16  | 1   | -  | 1  | -  | -  | 14   | 4    | 2  | 57     |
| 19           | Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang            | -                  | 20  | 12  | 7   | -  | 3  | -  | -  | 17   | -    | 2  | 61     |
| 20           | Balai Pelatihan Pertanian Jambi                    | 2                  | 25  | 20  | 8   | -  | 1  | -  | -  | 19   | 1    | 2  | 78     |
| 21           | Balai Pelatihan Pertanian Lampung                  | -                  | 22  | 22  | -   | -  | 3  | -  | -  | 12   | 1    | 1  | 61     |
| 22           | SMK-Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa           | 1                  | 20  | 30  | 6   | -  | 4  | -  | -  | 17   | -    | 1  | 79     |
| 23           | SMK-Pertanian Pembangunan Negeri Banjar Baru       | -                  | 14  | 20  | 5   | -  | 1  | -  | -  | 15   | 1    | -  | 56     |
| 24           | SMK-Pertanian Pembangunan Negeri Kupang            | -                  | 10  | 13  | 11  | -  | -  | -  | -  | 12   | 1    | 3  | 50     |
| 25           | Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia          | 5                  | 5   | 1   | 1   | -  | 2  | -  | -  | -    | -    | -  | 14     |
| <b>TOTAL</b> |  | 83                 | 674 | 493 | 168 | 1  | 73 | 2  | -  | 410  | 65   | 61 | 2,030  |

Sumber Data. Bagian Umum Sekretariat Badan PPSDMP, 2019

Monitoring Nilai Kinerja Unit Eselon I Tahun Anggaran 2019

Total ada 1 Record

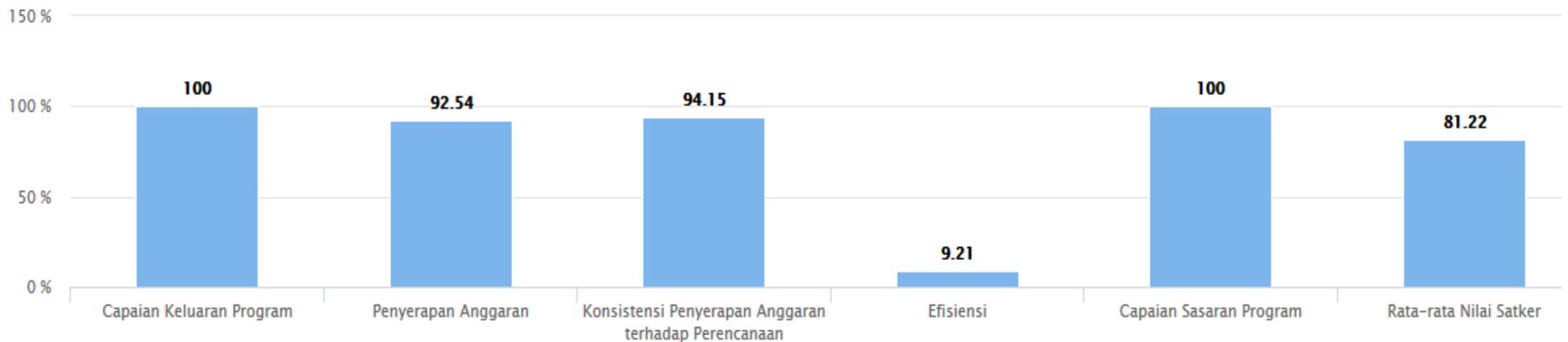
| No. | Kode Unit | Unit Eselon I   | Capaian Sasaran Program | Penyerapan | Konsistensi | Capaian Keluaran Program | Efisiensi | Rata-rata Nilai Kinerja Satker | Nilai Kinerja Unit Eselon I | Rincian |
|-----|-----------|---|-------------------------|------------|-------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|---------|
| 1.  | 10        | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | 100.00                  | 92.54      | 94.15       | 100.00                   | 9.21      | 81.22                          | 89.03                       | ...     |

Pencapaian Kinerja

**89.03**

Pencapaian Kinerja

Tahun Anggaran: 2019



\* Capaian Keluaran Program (CKP) dan Capaian Sasaran Program (CSP) diukur menggunakan formula rata - rata geometrik.

# EVIDANCE I

**Realisasi rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019**

| URAIAN   |   | JUMLAH         |
|--|---|----------------|
| <b>Jumlah Poktan yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu (Poktan)</b> |   | <b>92.092</b>  |
| <b>a.</b>  | <b>Jumlah poktan yang mengikuti kegiatan SL</b>                                   | <b>62.09</b>   |
|  | - Sekolah Lapangan  | 46.5           |
|  | - IPDMIP  | 14.589         |
|  | - READSI  | 1.001          |
| <b>b.</b>  | <b>Jumlah poktan yang mengikuti kegiatan adaptasi teknologi spesifik lokalita</b> | <b>14.566</b>  |
|  | - Pusluh  | 1.7            |
|  | - Pelatihan pejabat fungsional  | 5.432          |
|  | - IPDMIP  | 3.56           |
|  | - Pelatihan teknis non aparatur   | 1.804          |
|  | - Pengabdian kepada masyarakat  | 860            |
|  | - PKL mahasiswa polbangtan  | 1.21           |
| <b>c.</b>  | <b>Jumlah Tumbuh kembang penyuluh swadaya</b>                                     | <b>15.436</b>  |
|  | - Posluhdes   | 14             |
|  | - P4S   | 936            |
|  | - Agrosociopreneur (PWMP)   | 500            |
| <b>Jumlah Poktan Nasional (berdasarkan SIMLUHTAN)</b>                  |   | <b>588.637</b> |
| <b>RASIO (%)</b>   |   | <b>15,64</b>   |

Sumber data. Pusat Lingkup Badan PPSDMP

# EVIDANCE II

**REKAPITULASI KELEMBAGAAN PETANI YANG MENINGKAT KAPASITASNYA  
TAHUN 2019**

| No | Provinsi                     | KAB/<br>KOTA | BP3K         | PENYULUH PNS  |                    | THL-TB PP     |                    |
|----|------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
|    |                              |              |              | ALOKASI       | CAPAIAN<br>KINERJA | ALOKASI       | CAPAIAN<br>KINERJA |
|    |                              |              |              |               | POKTAN             |               | POKTAN             |
| 1  | ACEH                         | 23           | 268          | 1,356         | 6,780              | 984           | 4,920              |
| 2  | SUMATERA UTARA               | 33           | 336          | 1,279         | 6,395              | 943           | 4,715              |
| 3  | SUMATERA BARAT               | 19           | 157          | 839           | 4,195              | 408           | 2,040              |
| 4  | RIAU                         | 12           | 116          | 657           | 3,285              | 205           | 1,025              |
| 5  | JAMBI                        | 11           | 133          | 870           | 4,350              | 181           | 905                |
| 6  | SUMATERA SELATAN             | 17           | 202          | 725           | 3,625              | 371           | 1,855              |
| 7  | BENGKULU                     | 10           | 101          | 679           | 3,395              | 252           | 1,260              |
| 8  | LAMPUNG                      | 15           | 238          | 854           | 4,270              | 514           | 2,570              |
| 9  | KEPULAUAN BANGKA<br>BELITUNG | 7            | 31           | 199           | 995                | 63            | 315                |
| 10 | KEPULAUAN RIAU               | 7            | 18           | 32            | 160                | 10            | 50                 |
| 11 | DKI JAKARTA                  | 6            | 7            | 64            | 320                | 14            | 70                 |
| 12 | JAWA BARAT                   | 27           | 480          | 1,205         | 6,025              | 823           | 4,115              |
| 13 | JAWA TENGAH                  | 35           | 551          | 1,675         | 8,375              | 1,098         | 5,490              |
| 14 | DI YOGYAKARTA                | 5            | 56           | 272           | 1,360              | 170           | 850                |
| 15 | JAWA TIMUR                   | 38           | 581          | 1,485         | 7,425              | 1,065         | 5,325              |
| 16 | BANTEN                       | 8            | 118          | 331           | 1,655              | 200           | 1,000              |
| 17 | BALI                         | 9            | 58           | 502           | 2,510              | 150           | 750                |
| 18 | NTB                          | 10           | 109          | 870           | 4,350              | 326           | 1,630              |
| 19 | NTT                          | 22           | 264          | 973           | 4,865              | 618           | 3,090              |
| 20 | KALIMANTAN BARAT             | 14           | 145          | 862           | 4,310              | 195           | 975                |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH            | 14           | 108          | 760           | 3,800              | 165           | 825                |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN           | 13           | 129          | 951           | 4,755              | 262           | 1,310              |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR             | 10           | 80           | 618           | 3,090              | 82            | 410                |
| 24 | KALIMANTAN UTARA             | 5            | 28           | 150           | 750                | 18            | 90                 |
| 25 | SULAWESI UTARA               | 15           | 167          | 780           | 3,900              | 76            | 380                |
| 26 | SULAWESI TENGAH              | 13           | 144          | 991           | 4,955              | 106           | 531                |
| 27 | SULAWESI SELATAN             | 24           | 305          | 1,242         | 6,210              | 545           | 2,725              |
| 28 | SULAWESI TENGGARA            | 17           | 175          | 856           | 4,280              | 222           | 1,110              |
| 29 | GORONTALO                    | 6            | 72           | 372           | 1,860              | 57            | 285                |
| 30 | SULAWESI BARAT               | 6            | 62           | 479           | 2,395              | 50            | 250                |
| 31 | MALUKU                       | 11           | 69           | 392           | 1,960              | 101           | 505                |
| 32 | MALUKU UTARA                 | 10           | 70           | 350           | 1,750              | 95            | 475                |
| 34 | PAPUA                        | 29           | 109          | 742           | 3,710              | 117           | 585                |
| 33 | PAPUA BARAT                  | 13           | 30           | 363           | 1,815              | 57            | 285                |
|    | <b>Jumlah</b>                | <b>514</b>   | <b>5,517</b> | <b>24,775</b> | <b>123,875</b>     | <b>10,543</b> | <b>52,716</b>      |

\* Keterangan KELEMBAGAAN PETANI YANG MENINGKAT KAPASITASNYA TAHUN 2019  
= Jumlah Capaian Kinerja Penyuluh PNS + Jumlah THL-TB PP  
= 123.875 + 52.716  
= 176.591 poktan

**REKAPITULASI DATA PELAKU UTAMA**

| No | Provinsi                  | Jumlah Kelompok Tani | Jumlah         |                |               |              |                 |
|----|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|
|    |                           |                      | Pemula         | Lanjut         | Madya         | Utama        | Belum diketahui |
| 1  | Aceh                      | 23,307               | 12,492         | 5,214          | 532           | 30           | 5,039           |
| 2  | Sumatera Utara            | 40,144               | 27,090         | 5,546          | 609           | 78           | 6,821           |
| 3  | Sumatera Barat            | 16,781               | 11,694         | 4,477          | 328           | 5            | 277             |
| 4  | Riau                      | 16,272               | 11,595         | 3,005          | 306           | 13           | 1,353           |
| 5  | Jambi                     | 13,299               | 5,198          | 2,183          | 271           | 16           | 5,631           |
| 6  | Sumatera Selatan          | 30,138               | 15,064         | 6,596          | 923           | 179          | 7,376           |
| 7  | Bengkulu                  | 11,033               | 6,809          | 1,010          | 49            | 2            | 3,163           |
| 8  | Lampung                   | 32,382               | 15,392         | 8,255          | 1,048         | 52           | 7,635           |
| 9  | Kepulauan Bangka Belitung | 4,584                | 3,362          | 398            | 12            | -            | 812             |
| 10 | Kepulauan Riau            | 1,393                | 900            | 34             | 1             | -            | 458             |
| 11 | Dki Jakarta               | 458                  | 337            | 54             | 11            | -            | 56              |
| 12 | Jawa Barat                | 47,145               | 20,582         | 16,287         | 2,209         | 138          | 7,929           |
| 13 | Jawa Tengah               | 52,625               | 17,211         | 14,722         | 3,713         | 502          | 16,477          |
| 14 | Di Yogyakarta             | 8,565                | 2,084          | 2,263          | 1,288         | 156          | 2,774           |
| 15 | Jawa Timur                | 45,759               | 13,920         | 15,497         | 4,571         | 331          | 11,440          |
| 16 | Banten                    | 8,252                | 4,399          | 2,762          | 619           | 230          | 242             |
| 17 | Bali                      | 9,452                | 2,345          | 2,105          | 996           | 178          | 3,828           |
| 18 | Nusa Tenggara Barat       | 17,945               | 7,612          | 8,358          | 1,028         | 73           | 874             |
| 19 | Nusa Tenggara Timur       | 27,280               | 11,765         | 3,070          | 258           | 29           | 12,158          |
| 20 | Kalimantan Barat          | 17,108               | 10,735         | 2,865          | 276           | 12           | 3,220           |
| 21 | Kalimantan Tengah         | 8,882                | 5,328          | 565            | 45            | -            | 2,944           |
| 22 | Kalimantan Selatan        | 14,797               | 7,052          | 3,646          | 448           | 24           | 3,627           |
| 23 | Kalimantan Timur          | 8,369                | 4,820          | 1,287          | 75            | -            | 2,187           |
| 24 | Kalimantan Utara          | 1,759                | 1,133          | 130            | 21            | 1            | 474             |
| 25 | Sulawesi Utara            | 17,988               | 9,724          | 928            | 62            | 9            | 7,265           |
| 26 | Sulawesi Tengah           | 18,492               | 10,935         | 1,921          | 207           | 5            | 5,424           |
| 27 | Sulawesi Selatan          | 46,585               | 24,593         | 10,198         | 2,123         | 187          | 9,484           |
| 28 | Sulawesi Tenggara         | 12,267               | 6,804          | 2,470          | 175           | 5            | 2,813           |
| 29 | Gorontalo                 | 8,660                | 4,690          | 275            | 17            | 2            | 3,676           |
| 30 | Sulawesi Barat            | 8,435                | 2,653          | 1,733          | 582           | 100          | 3,367           |
| 31 | Maluku                    | 6,501                | 3,175          | 173            | 3             | -            | 3,150           |
| 32 | Maluku Utara              | 4,039                | 2,250          | 109            | 3             | -            | 1,677           |
| 33 | Papua Barat               | 2,538                | 1,800          | 121            | -             | -            | 617             |
| 34 | Papua                     | 5,403                | 2,345          | 641            | 50            | 20           | 2,347           |
|    | <b>J u m l a h</b>        | <b>588,637</b>       | <b>287,888</b> | <b>128,898</b> | <b>22,859</b> | <b>2,377</b> | <b>146,615</b>  |

Per : 29-12-2018

# EVIDANCE III

**REKAPITULASI KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI PER PROVINS  
NASIONAL**

Per :31-12-2019

| No | Provinsi                  | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani | Bentuk Kelembagaan Ekonomi Petani |           |           |              |              |              |                 |
|----|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|    |                           |                                   | Koperasi Tani                     | PT        | CV        | KUB          | LKMA         | Lainnya      | Tidak diketahui |
| 1  | Aceh                      | 858                               | 840                               | -         | -         | 13           | 2            | 3            | -               |
| 2  | Sumatera Utara            | 625                               | 296                               | -         | 1         | 288          | 25           | 15           | -               |
| 3  | Sumatera Barat            | 311                               | 117                               | -         | -         | 133          | 35           | 26           | -               |
| 4  | Riau                      | 199                               | 148                               | -         | 5         | 13           | 2            | 31           | -               |
| 5  | Jambi                     | 407                               | 139                               | -         | -         | 206          | 44           | 18           | -               |
| 6  | Sumatera Selatan          | 404                               | 191                               | -         | -         | 89           | 74           | 50           | -               |
| 7  | Bengkulu                  | 106                               | 53                                | -         | -         | 4            | 41           | 8            | -               |
| 8  | Lampung                   | 372                               | 133                               | 4         | -         | 131          | 51           | 53           | -               |
| 9  | Kepulauan Bangka Belitung | 39                                | 34                                | 1         | -         | 3            | -            | 1            | -               |
| 10 | Kepulauan Riau            | 17                                | 14                                | -         | -         | 2            | -            | 1            | -               |
| 11 | DKI Jakarta               | 6                                 | 6                                 | -         | -         | -            | -            | -            | -               |
| 12 | Jawa Barat                | 1,226                             | 375                               | 3         | 4         | 474          | 216          | 154          | -               |
| 13 | Jawa Tengah               | 2,074                             | 430                               | 5         | 1         | 440          | 841          | 357          | -               |
| 14 | D.I.Yogyakarta            | 480                               | 100                               | -         | -         | 267          | 79           | 34           | -               |
| 15 | Jawa Timur                | 1,303                             | 456                               | -         | 4         | 380          | 267          | 196          | -               |
| 16 | Banten                    | 143                               | 82                                | -         | -         | 24           | 23           | 14           | -               |
| 17 | Bali                      | 69                                | 57                                | -         | 1         | 4            | -            | 7            | -               |
| 18 | Nusa Tenggara Barat       | 526                               | 314                               | 1         | 2         | 86           | 93           | 30           | -               |
| 19 | Nusa Tenggara Timur       | 396                               | 165                               | -         | 2         | 206          | 18           | 5            | -               |
| 20 | Kalimantan Barat          | 210                               | 200                               | -         | 1         | 5            | -            | 4            | -               |
| 21 | Kalimantan Tengah         | 101                               | 63                                | -         | -         | 21           | 3            | 14           | -               |
| 22 | Kalimantan Selatan        | 147                               | 21                                | -         | 2         | 41           | 21           | 62           | -               |
| 23 | Kalimantan Timur          | 75                                | 32                                | -         | 1         | 18           | 12           | 12           | -               |
| 24 | Kalimantan Utara          | 46                                | 38                                | -         | -         | -            | -            | 8            | -               |
| 25 | Sulawesi Utara            | 57                                | 28                                | -         | 2         | 16           | -            | 11           | -               |
| 26 | Sulawesi Tengah           | 186                               | 159                               | -         | -         | 11           | 5            | 11           | -               |
| 27 | Sulawesi Selatan          | 747                               | 261                               | -         | 1         | 335          | 58           | 92           | -               |
| 28 | Sulawesi Tenggara         | 339                               | 179                               | -         | 1         | 110          | 41           | 8            | -               |
| 29 | Gorontalo                 | 37                                | 20                                | -         | -         | 8            | 2            | 7            | -               |
| 30 | Sulawesi Barat            | 458                               | 430                               | -         | -         | 15           | 3            | 10           | -               |
| 31 | Maluku                    | 91                                | 82                                | -         | -         | 8            | 1            | -            | -               |
| 32 | Maluku Utara              | -                                 | -                                 | -         | -         | -            | -            | -            | -               |
| 33 | Papua Barat               | 20                                | 16                                | -         | -         | 4            | -            | -            | -               |
| 34 | Papua                     | 5                                 | 2                                 | -         | -         | 1            | -            | 2            | -               |
|    | <b>J u m l a h</b>        | <b>12,080</b>                     | <b>5,481</b>                      | <b>14</b> | <b>28</b> | <b>3,356</b> | <b>1,957</b> | <b>1,244</b> | <b>-</b>        |

**DATA HASIL VERIFIKASI  
PENERIMA BANTUAN PWMP TAHUN 2016 S.D 2019 BERDASARKAN WILAYAH KOORDINASI**

| NO | WILAYAH KOORDINASI | TAHUN PENERIMAAN BANTUAN (KELOMPOK) |            |            |            | TOTAL KELOMPOK |
|----|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|
|    |                    | 2016                                | 2017       | 2018       | 2019       |                |
| 1  | Medan              | 20                                  | 26         | 36         | 49         | 131            |
| 2  | Bogor              | 20                                  | 28         | 13         | 59         | 120            |
| 3  | Magelang           | 49                                  | 21         | 25         | 55         | 150            |
| 4  | Yogyakarta         | 21                                  | 36         | 42         | 76         | 175            |
| 5  | Malang             | 13                                  | 15         | 37         | 99         | 164            |
| 6  | Gowa               | 41                                  | 24         | 24         | 38         | 127            |
| 7  | Manokwari          | 3                                   | 4          | 17         | 26         | 50             |
|    | <b>TOTAL</b>       | <b>167</b>                          | <b>154</b> | <b>194</b> | <b>402</b> | <b>917</b>     |

**REKAP P4S PER PROPINSI TAHUN 2019**

| <b>NO.</b>   | <b>UPT PEMBINA</b> | <b>PROVINSI</b>     | <b>JUMLAH P4S</b> | <b>JUMLAH BINAAN</b> | <b>KETERANGAN</b> |
|--------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1            | PPMKP Ciawi        | Jawa Tengah         | 130               | 155                  |                   |
|              |                    | DKI Jakarta         | 25                |                      |                   |
| 2            | BBPKH Cinagara     | Banten              | 39                | 85                   |                   |
|              |                    | DI. Yogyakarta      | 46                |                      |                   |
| 3            | BBPP Lembang       | Jawa Barat          | 237               | 237                  |                   |
| 4            | BBPP Ketindan      | Jawa Timur          | 158               | 158                  |                   |
| 5            | BBPP Batu          | Papua               |                   | 85                   |                   |
|              |                    | Papua Barat         |                   |                      |                   |
|              |                    | Nusa Tenggara Barat | 55                |                      |                   |
|              |                    | Maluku Utara        | 4                 |                      |                   |
|              |                    | Bali                | 23                |                      |                   |
|              |                    | Maluku              | 3                 |                      |                   |
| 6            | BBPP Kupang        | Nusa Tenggara Timur | 73                | 73                   |                   |
| 7            | BBPP Batangkaluku  | Sulawesi Selatan    | 27                | 93                   |                   |
|              |                    | Sulawesi Barat      | 6                 |                      |                   |
|              |                    | Sulawesi Utara      | 15                |                      |                   |
|              |                    | Sulawesi Tengah     | 10                |                      |                   |
|              |                    | Sulawesi Tenggara   | 14                |                      |                   |
|              |                    | Gorontalo           | 21                |                      |                   |
| 8            | BBPP Benuang       | Kalimantan Selatan  | 25                | 114                  |                   |
|              |                    | Kalimantan Tengah   | 13                |                      |                   |
|              |                    | Kalimantan Barat    | 25                |                      |                   |
|              |                    | Kalimantan Timur    | 37                |                      |                   |
|              |                    | Kalimantan Utara    | 14                |                      |                   |
| 9            | BPP Jambi          | NAD                 | 11                | 85                   |                   |
|              |                    | Sumatera Utara      | 12                |                      |                   |
|              |                    | Sumatera Barat      | 36                |                      |                   |
|              |                    | Riau                | 7                 |                      |                   |
|              |                    | Kepulauan Riau      | 1                 |                      |                   |
|              |                    | Jambi               | 18                |                      |                   |
| 10           | BPP Lampung        | Bengkulu            | 38                | 122                  |                   |
|              |                    | Bangka Belitung     | 13                |                      |                   |
|              |                    | Sumatera Selatan    | 16                |                      |                   |
|              |                    | Lampung             | 55                |                      |                   |
| <b>TOTAL</b> |                    |                     | <b>1207</b>       | <b>1207</b>          |                   |

# EVIDANCE IV

## Rekapitulasi Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Badan PPSDMP Tahun 2019

| No. | UPT                  | Responden    | Nilai Rata-Rata | Nilai IKM    | Mutu Pelayanan  |
|-----|----------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1   | PPMKP Ciawi          | 257          | 3.89            | 97.35        | A (Sangat Baik) |
| 2   | Polbangtan Malang    | 762          | 3.35            | 83.78        | B (Baik)        |
| 3   | Polbangtan Bogor     | 746          | 3.58            | 89.5         | A (Sangat Baik) |
| 4   | Polbangtan Medan     | 444          | 3.32            | 83.08        | B (Baik)        |
| 5   | Polbangtan Manokwari | 442          | 3.16            | 78.96        | B (Baik)        |
| 6   | Polbangtan Gowa      | 491          | 3.39            | 84.94        | B (Baik)        |
| 7   | Polbangtan YoMa      | 1.36         | 3.26            | 81.51        | B (Baik)        |
| 8   | BBPP Lembang         | 769          | 3.83            | 95.58        | A (Sangat Baik) |
| 9   | BBPP Batangkaluku    | 284          | 3.63            | 90.61        | A (Sangat Baik) |
| 10  | BBPP Batu            | 578          | 3.52            | 87.99        | B (Baik)        |
| 11  | BBPP Ketindan        | 378          | 3.33            | 83.23        | B (Baik)        |
| 12  | BBPKH Cinagara       | 1,154        | 3.55            | 88.64        | A (Sangat Baik) |
| 13  | BBPP Kupang          | 253          | 3.35            | 83.89        | B (Baik)        |
| 14  | BBPP Binuang         | 263          | 3.67            | 91.68        | A (Sangat Baik) |
| 15  | BPP Jambi            | 116          | 3.51            | 87.71        | B (Baik)        |
| 16  | BPP Lampung          | 245          | 3.46            | 83.88        | B (Baik)        |
| 17  | SMK-PP Sembawa       | 133          | 3.38            | 84.43        | B (Baik)        |
| 18  | SMK-PP Banjarbaru    | 458          | 3.38            | 83.72        | B (Baik)        |
| 19  | SMK-PP Kupang        | 285          | 3.69            | 92.36        | A (Sangat Baik) |
| 20  | PEPI                 | 144          | 3.65            | 91.37        | A (Sangat Baik) |
|     | <b>BPPSDMP</b>       | <b>9,562</b> | <b>3.46</b>     | <b>86.62</b> | <b>B (Baik)</b> |

Sumber data. Sekretariat Badan 2019

# EVIDANCE V

## SEBARAN LULUSAN YANG BEKERJA DIBIDANG PERTANIAN TAHUN 2019

| No | Satker       | Lulusan      | Sebaran Lulusan Yang Bekerja Di Bidang Pertanian |            |           |            |              |
|----|--------------|--------------|--|------------|-----------|------------|--------------|
|    |              |              | Bekerja  | PWMP       | Retooling | Kuliah     | Jumlah       |
| 1  | Medan        | 179          | 0  | 74         | 5         | 0          | 79           |
| 2  | Bogor        | 171          | 0  | 171        | 8         | 0          | 179          |
| 3  | Yoma         | 204          | 0  | 191        | 13        | 0          | 204          |
| 4  | Malang       | 79           | 0  | 157        | 14        | 0          | 171          |
| 5  | Gowa         | 133          | 0  | 109        | 24        | 0          | 133          |
| 6  | Manokwari    | 65           | 0  | 57         | 6         | 0          | 63           |
| 7  | Sembawa      | 184          | 52   | 42         | 0         | 50         | 144          |
| 8  | Banjarbaru   | 146          | 14   | 42         | 0         | 36         | 92           |
| 9  | Kupang       | 105          | 2  | 30         | 0         | 46         | 78           |
|    | <b>TOTAL</b> | <b>1,266</b> | <b>68</b>  | <b>873</b> | <b>70</b> | <b>132</b> | <b>1,143</b> |

# EVIDANCE VI

### Rata-rata Competency Gap Index (CGI) peserta pelatihan (%)

| <b>NO</b> | <b>UPT</b>         | <b>Target (%)</b> | <b>Realisasi (%)</b> | <b>Capaian (Target/Realisasi x 100)</b> |
|-----------|--------------------|-------------------|----------------------|---|
| 1         | PPMKP CIAWI        | 20.00             | 18.24                | 109.65                                  |
| 2         | BBPKH CINAGARA     | 20.00             | 18.63                | 107.35                                  |
| 3         | BBPP LEMBANG       | 20.00             | 14.65                | 136.52                                  |
| 4         | BBPP KETINDAN      | 20.00             | 19.82                | 100.91                                  |
| 5         | BBPP BATU          | 20.00             | 19.89                | 100.55                                  |
| 6         | BBPP BATANGKALUKU  | 20.00             | 17.80                | 112.36                                  |
| 7         | BBPP BINUANG       | 20.00             | 19.56                | 102.25                                  |
| 8         | BBPP KUPANG        | 20.00             | 20.43                | 97.90                                   |
| 9         | BPP LAMPUNG        | 20.00             | 16.03                | 124.77                                  |
| 10        | BBPP JAMBI         | 20.00             | 20.81                | 96.11                                   |
|           | <b>RATA - RATA</b> | <b>20.00</b>      | <b>18.59</b>         | <b>107.61</b>                           |

# EVIDANCE VIII

Monitoring Nilai Kinerja Unit Eselon I Tahun Anggaran 2019

Total ada 1 Record

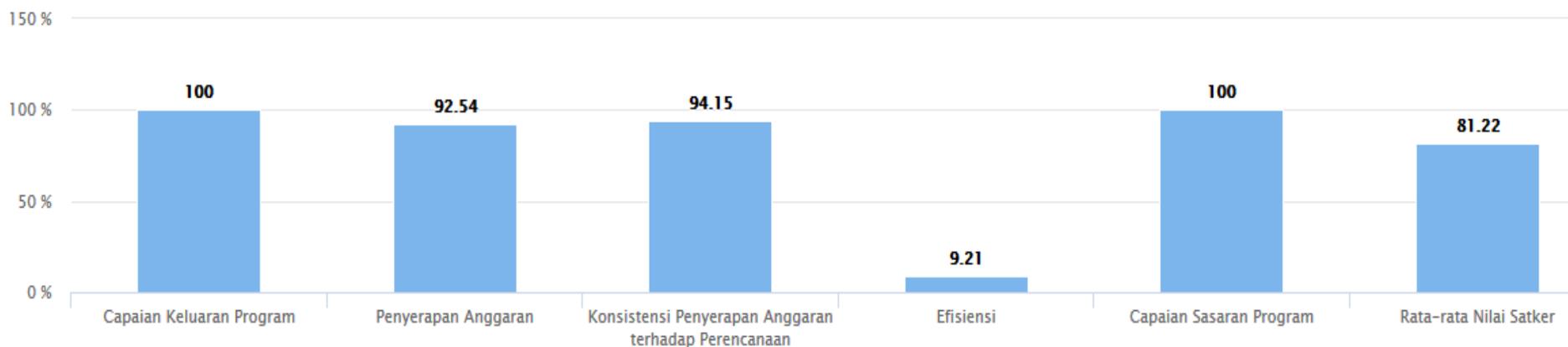
| No. | Kode Unit | Unit Eselon I   | Capaian Sasaran Program | Penyerapan | Konsistensi | Capaian Keluaran Program | Efisiensi | Rata-rata Nilai Kinerja Satker | Nilai Kinerja Unit Eselon I | Rincian |
|-----|-----------|---|-------------------------|------------|-------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|---------|
| 1.  | 10        | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | 100.00                  | 92.54      | 94.15       | 100.00                   | 9.21      | 81.22                          | 89.03                       | ...     |

Pencapaian Kinerja

**89.03**

Pencapaian Kinerja

Tahun Anggaran: 2019



\* Capaian Keluaran Program (CKP) dan Capaian Sasaran Program (CSP) diukur menggunakan formula rata - rata geometrik.